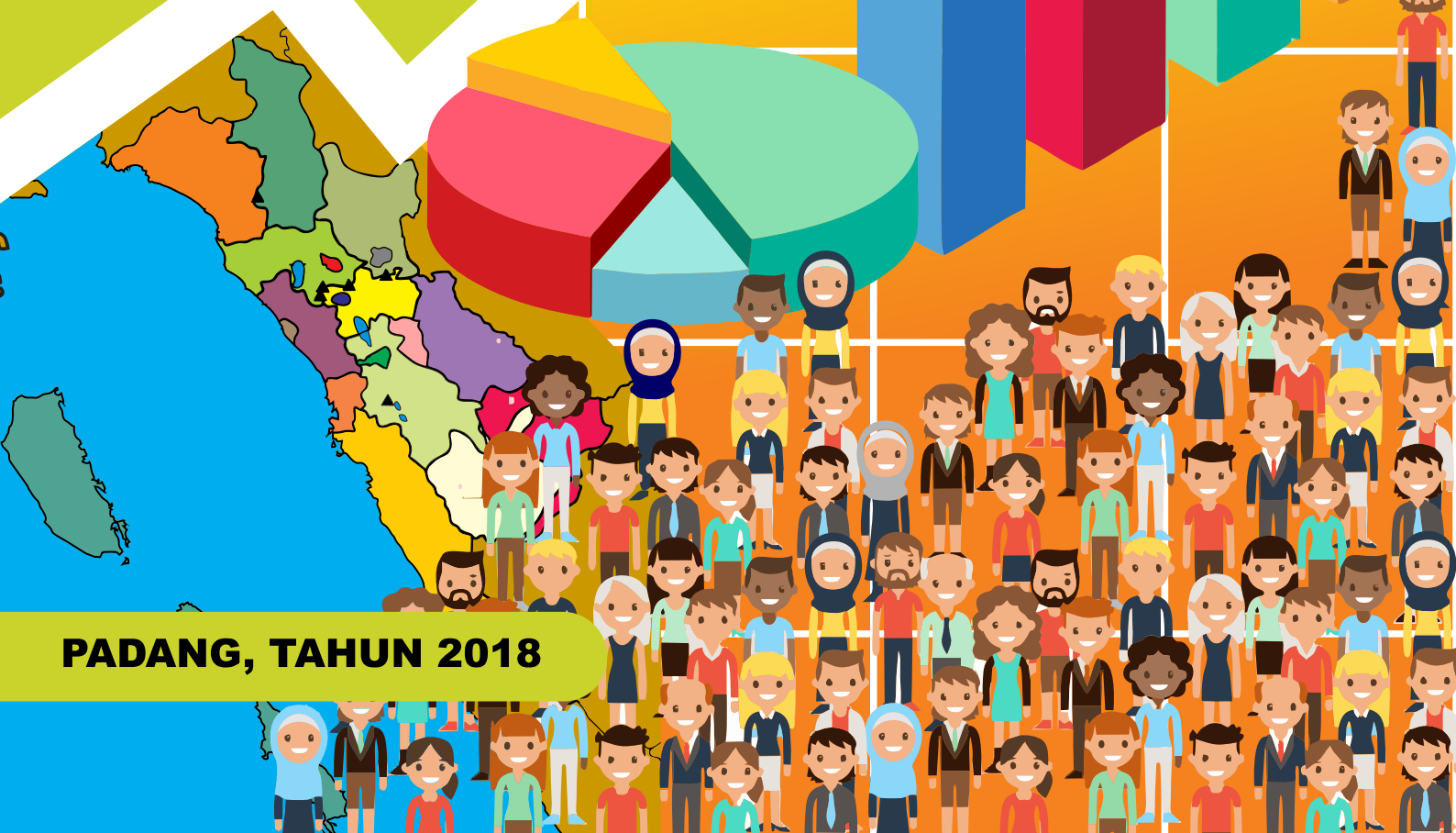




**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SUMATERA BARAT**



PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan rahmat dan perkenannya, Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 dapat diselesaikan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan, pada pasal 4 mengamanatkan bahwa pemerintah provinsi menyusun Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi. Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 ini diterbitkan untuk memenuhi amanat tersebut sekaligus memberikan gambaran kondisi dan perkembangan kependudukan di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 ini adalah data kependudukan hasil konsolidasi dan pembersihan data yang dilakukan oleh Tim Teknis Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia per 31 Desember 2017, data perkembangan kependudukan Kabupaten/Kota, dan data pendukung dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait, yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.

Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dalam perumusan kebijakan, penyusunan perencanaan dan strategi pembangunan di berbagai bidang agar tepat sasaran, serta untuk evaluasi kebijakan pembangunan yang berwawasan kependudukan yaitu pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada, dan penduduk harus dijadikan titik sentral dalam proses pembangunan serta penduduk harus dijadikan subjek dan objek dalam pembangunan. Dengan kata lain pembangunan adalah oleh

penduduk dan untuk penduduk. Disisi lain, pembangunan juga harus semakin menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia disamping pembangunan infrastruktur.

Disadari bahwa penyajian data dalam Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, tanggapan dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan, guna penyempurnaan penyajian Profil Perkembangan Kependudukan dimasa yang akan datang.

Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 ini diucapkan terima kasih. Semoga Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 ini dapat bermanfaat untuk semua pihak, khususnya dalam rangka menunjang perencanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat.

Padang, 30 Agustus 2018

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
KB, Dukcapil Provinsi Sumatera Barat



H. NOVRIAL, S.E., M.A., Akt
Pembina Utama Muda/NIP.19661105 199403 1 005

DAFTAR ISI

Halaman

3) Rasio Kepadatan Penduduk (Population Density Ratio)		55
4) Angka Pertumbuhan Penduduk		57
b. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Sosial		59
1) Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan		59
2) Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan		62
3) Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kecacatan		66
4) Penduduk Menurut Status Kawin		70
c. Keluarga		73
1) Jumlah Keluarga dan Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga		74
2) Status Hubungan Dengan Kepala Keluarga (SHDK)		76
3) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Umur		77
4) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin		78
5) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Kawin		80
6) Karakteristik Kepala Keluarga Menurut Pendidikan		83
7) Karakteristik Kepala Keluarga Menurut Status Bekerja		85
d. Kelahiran (Fertilitas)		87
1) Jumlah Kelahiran		88
2) Angka Kelahiran Kasar (Crude Birth Rate/CBR)		89
2. Kualitas Penduduk		90
a. Kesehatan		90
1) Rasio Anak dan Perempuan (Child women Ratio/CWR)		90
2) Kematian (Mortalitas)		91
a) Angka Kematian Bayi (<i>Infant Mortality Rate/</i> <i>IMR/AKB</i>)		92

b) Angka Kematian Neonatal (Kematian Bayi Baru Lahir/NNDR)		94
c) Angka Kematian Post Neo- Natal (Angka Kematian Lepas Baru Lahir/PNNDR)		95
d) Angka Kematian Anak		97
e) Angka Kematian Balita		98
f) Angka Kematian Ibu (<i>Maternity Mortality</i> <i>Rate/AKI</i>)		99
b. Pendidikan		101
1) Angka Partisipasi Kasar (APK)		102
2) Angka Partisipasi Murni (APM)		103
3) Angka Putus Sekolah (APS)		105
c. Ekonomi		105
1) Jumlah Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja (Bekerja dan Menganggur/Pencari Kerja		106
a) Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja		106
b) Jumlah dan Proporsi Angkatan Kerja (Bekerja dan Menganggur/Pencari Kerja)		107
2) Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK)		109
3) Jumlah dan Proporsi Penduduk yang Bekerja menurut Jenis Pekerjaan		110
4) Pengangguran Terbuka		113
d. Sosial		114
1) Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial		114
2) Proporsi Penduduk Penyandang Cacat		116
3. Mobilitas Penduduk		118
a. Angka Migrasi Masuk (in- migration/Mi)		119
b. Angka Migrasi Keluar (out- migration/Mo)		120

	c. Angka Migrasi Neto (nett-migration/Mn)	122
	d. Transmigrasi	124
4.	Kepemilikan Dokumen	
	Kependudukan	125
	a. Kepemilikan Kartu Keluarga	125
	b. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	126
	c. Kepemilikan Akta	127
	1) Kepemilikan Akta Kelahiran	127
	2) Kepemilikan Akta Perkawinan	128
	3) Kepemilikan Akta Perceraian	129
	4) Kepemilikan Akta Kematian	131
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	133
	B. Saran	134
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jumlah Penduduk per Kabupaten/Kota Menurut Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017	11
Tabel 2. Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2017	13
Tabel 3. Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Barat Menurut Wilayah dan Jenis Kelamin Per 31 Desember 2017	42
Tabel 4. Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Barat Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Per 31 Desember 2017	44
Tabel 5. Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2017	46
Tabel 6. Rasio Jenis Kelamin Menurut Wilayah Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2017	48
Tabel 7. Rasio Jenis Kelamin Menurut Kelompok Umur Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2017	49
Tabel 8. Rasio Ketergantungan Menurut Kelompok Umur Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2017	54
Tabel 9. Rasio Kepadatan Penduduk Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2017	56
Tabel 10. Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017	58
Tabel 11. Distribusi Penduduk Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan Dan Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2017	60
Tabel 12. Distribusi Penduduk Menurut Agama dan Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2017	64
Tabel 13. Distribusi Penduduk Menurut Agama dan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2017	65
Tabel 14. Distribusi Penduduk Menurut Jenis Kecacatan dan Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2017	66

Tabel 15. Distribusi Penduduk Menurut Jenis Kecacatan dan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2017	69
Tabel 16. Distribusi Penduduk Menurut Status Kawin dan Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2017	70
Tabel 17. Distribusi Penduduk Menurut Status Kawin dan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2017	71
Tabel 18. Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2017	75
Tabel 19. Distribusi Anggota Keluarga Berdasarkan Status Hubungan Dengan Kepala Keluarga Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2017	76
Tabel 20. Kepala Keluarga Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2017	78
Tabel 21. Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin dan Wilayah Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2017	79
Tabel 22. Kepala Keluarga Menurut Status Kawin dan Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2017	81
Tabel 23. Kepala Keluarga Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2017	84
Tabel 24. Distribusi Kepala Keluarga Menurut Status Bekerja dan Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2017	85
Tabel 25. Jumlah Kelahiran Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017	88
Tabel 26. Rasio Anak dan Perempuan (Child Women Ratio/CWR) Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2017	91
Tabel 27. Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rate) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017	93
Tabel 28. Angka Kematian Neonatal (Kematian Bayi Baru Lahir/NNDR) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017	95
Tabel 29. Angka Kematian Post Neo-Natal (Kematian Lepas Baru Lahir/PNNDR) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017	96

Tabel 30. Angka Kematian Anak Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017		97
Tabel 31. Angka Kematian Balita Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017		99
Tabel 32. Angka Kematian Ibu (Maternity Mortality Ratio/MMR) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017		100
Tabel 33. Jumlah Penduduk Menurut Usia Sekolah Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2017		101
Tabel 34. Angka Partisipasi Kasar (APK)/Gross Enrollment Ratio Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017		103
Tabel 35. Angka Partisipasi Murni (APM)/Net Enrollment Ratio Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017		104
Tabel 36. Angka Putus Sekolah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017		105
Tabel 37. Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2017		107
Tabel 38. Jumlah dan Proporsi Angkatan Kerja Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2017		108
Tabel 39. Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2017		110
Tabel 40. Jumlah dan Proporsi Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2017		112
Tabel 41. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2017		113
Tabel 42. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2017		115
Tabel 43. Jumlah Penduduk Penyandang Cacat Menurut Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2017		116
Tabel 44. Angka Penyandang Cacat Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2017		117
Tabel 45. Angka Migrasi Masuk Per Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017		119
Tabel 46. Angka Migrasi Keluar Per Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017		121
Tabel 47. Angka Migrasi Neto Per Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017		123

Tabel 48. Data Penempatan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2017		124
Tabel 49. Kepemilikan Kartu Keluarga Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2017		125
Tabel 50. Kepemilikan KTP-el Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2017		126
Tabel 51. Kepemilikan Akta Kelahiran Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2017		127
Tabel 52. Kepemilikan Akta Perkawinan Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2017		129
Tabel 53. Kepemilikan Akta Perceraian Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2017		130
Tabel 54. Kepemilikan Akta Kematian Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017		132

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Grafik Kepadatan Penduduk Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017	14
Gambar 2. Piramida Penduduk Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017	51

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN

Penyusunan Profil Kependudukan Provinsi merupakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Jumlah penduduk yang semakin bertambah dari tahun ke tahun akan berimplikasi terhadap meningkatnya kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, energi, meningkatnya kebutuhan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, meningkatnya persaingan lapangan kerja, semakin sempitnya lapangan dan peluang kerja, meningkatnya pengangguran khususnya bagi mereka yang tidak mampu bersaing.

Untuk mengatasi masalah kependudukan tersebut sudah barang tentu diperlukan data kependudukan yang benar, valid, dan akurat. Data penduduk yang dihasilkan dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) merupakan salah satu alternatif yang dapat dimanfaatkan untuk mengetahui informasi kependudukan seperti jumlah penduduk, struktur dan komposisi penduduk serta persebarannya.

Tersedianya data kependudukan yang baik, dalam arti mampu mengobservasikan peristiwa-peristiwa vital, kelahiran, kematian, dan perpindahan dirasakan semakin penting dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat.

Data dan informasi mengenai kependudukan yang sudah cukup lama dan tersebar di berbagai instansi atau lembaga pemerintahan sudah banyak dikembangkan untuk berbagai kebutuhan. Apabila data dan informasi yang ada tersebut berhasil diintegrasikan secara menyeluruh, niscaya akan

menjadi aset sekaligus informasi yang berarti untuk perencanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat.

Komposisi data penduduk yang senantiasa berubah, wajib dimutakhirkan dan divalidasi secara berkelanjutan melalui mekanisme pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota, dimana saat ini telah terbangun dalam suatu SIAK dan telah terintegrasi dengan database e-KTP yang telah menjamin ketunggalan data dengan merekam data biometric penduduk seperti iris mata dan sidik jari sehingga keakuratan dan kevalidan data semakin tinggi.

Dengan demikian, upaya pengembangan sebuah sistem administrasi kependudukan memang merupakan suatu keharusan karena akan mendorong terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan tersedianya database kependudukan, khususnya yang bersumber pada SIAK.

Sejalan dengan itu guna memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa data kependudukan harus digunakan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan, maka dengan disusunnya Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat ini akan memberikan data dan informasi yang berguna untuk proses lebih lanjut dalam perencanaan, alokasi anggaran, pelayanan publik, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal bagi pihak-pihak terkait dan yang berkepentingan di Sumatera Barat.

B. TUJUAN

Adapun tujuan dari penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan ini adalah :

1. Memberikan informasi dan gambaran tentang kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan di Provinsi Sumatera Barat.

2. Sebagai alat publikasi dan meningkatkan pelayanan publik guna membangun komitmen semua pihak untuk lebih meningkatkan peran dan partisipasi penduduk dalam pembangunan di Provinsi Sumatera Barat.
3. Sebagai acuan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat.

C. RUANG LINGKUP

1. Kuantitas Penduduk, meliputi komposisi dan persebaran penduduk.
2. Kualitas Penduduk, yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial.
3. Mobilitas Penduduk
4. Kepemilikan dokumen kependudukan.

D. PENGERTIAN

1. **Penduduk** adalah Warga Negara Indonesia yang termasuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan.
2. **Kependudukan** adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
3. **Administrasi kependudukan** adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan sektor lain.
4. **Data** adalah fakta yang sudah ditulis dalam bentuk catatan, gambar atau direkam kedalam berbagai bentuk media.

5. **Database** kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
6. **Data kependudukan** adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
7. **Perkembangan kependudukan** adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
8. **Profil Perkembangan Penduduk** adalah gambaran kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan.
9. **Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)** adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat penyelenggaraan dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
10. **Kuantitas penduduk** adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati dan pindah tempat tinggal.
11. **Kualitas penduduk** adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik serta ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang berbudaya, berkepribadian dan layak.
12. **Mobilitas Penduduk** adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas administrasi daerah Kabupaten/Kota.
13. **Persebaran penduduk** adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan.
14. **Struktur penduduk** adalah pengelompokan penduduk menurut karakteristik tertentu misalnya umur, jenis kelamin, pendidikan, agama,

status hubungan dalam keluarga, status perkawinan dan lapangan pekerjaan.

15. **Pertumbuhan penduduk** adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan mengurangi jumlah penduduk di suatu wilayah, dimana pertumbuhan penduduk tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah dan migrasi neto.
16. **Angka pertumbuhan penduduk** adalah besaran persentase perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk pada waktu sebelumnya.
17. **Proporsi penduduk** adalah jumlah dan informasi penduduk menurut pengelompokan tertentu, seperti umur dan jenis kelamin.
18. **Rasio jenis kelamin** adalah perbandingan penduduk laki-laki terhadap perempuan di suatu wilayah tertentu dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki per seratus penduduk perempuan.
19. **Piramida Penduduk** adalah gambar yang menunjukkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang disajikan secara grafik;
20. **Rasio ketergantungan atau rasio beban tanggungan (*dependency ratio*)** adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia dibawah 15 tahun dan penduduk usia 65 tahun atau lebih) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun). Rasio ketergantungan menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk produktif terhadap penduduk tidak produktif.
21. **Rasio kepadatan penduduk** adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk terhadap luas wilayah atau berapa banyaknya penduduk per kilometer persegi pada periode tahun tertentu.

22. **Lahir Hidup** adalah suatu kelahiran bayi tanpa memperhitungkan lamanya didalam kandungan, dimana si bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan, misalnya ada nafas, ada denyut jantung atau denyut tali pusar atau gerakan otot.
23. **Lahir Mati** adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan.
24. **Angka Kematian Bayi** adalah banyaknya kematian bayi usia kurang dari satu tahun pada satu periode per 1000 kelahiran hidup pada pertengahan periode yang sama.
25. **Angka Kematian Ibu** adalah banyaknya kematian ibu pada waktu dilahirkan selama 42 hari sejak terminasi kelahiran per 100.000 kelahiran hidup tanpa memandang lama dan tempat kelahiran yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya.
26. **Sekolah** adalah kegiatan seseorang untuk bersekolah di sekolah formal, mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tertinggi, selama seminggu yang lalu sebelum pencacahan. Termasuk pula kegiatan dari mereka yang sedang libur sekolah.
27. **Pendidikan tertinggi yang ditamatkan** adalah tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu tingkatan sekolah dengan mendapatkan tanda tamat (ijazah).
28. **Angka Partisipasi Kasar (APK)** adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.
29. **Angka Partisipasi Murni (APM)** adalah persentase jumlah peserta didik SD, jumlah peserta didik SLTP, jumlah peserta didik SLTA dibagi jumlah kelompok usia dari masing-masing jenjang pendidikan.

30. **Penduduk Usia Kerja** adalah penduduk yang berusia 15 tahun dan lebih.
31. **Angkatan Kerja** adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
32. **Bekerja** adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam terus-menerus dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.
33. **Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK)** adalah proporsi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.
34. **Pengangguran** adalah orang yang termasuk angkatan kerja, namun pada saat pendataan/survey atau sensus tidak bekerja dan sedang mencari kerja.
35. **Angka Pengangguran** adalah proporsi jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja.
36. **Jenis pekerjaan/jenis jabatan** adalah macam pekerjaan yang sedang dilakukan oleh orang-orang yang termasuk golongan bekerja atau orang-orang yang sementara tidak bekerja, yang dibagi menjadi 8 golongan besar yaitu : 1) tenaga profesional, teknisi dan sebagainya; 2) tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan; 3) tenaga tata usaha dan tenaga yang sejenis; 4) tenaga usaha penjualan; 5) tenaga usaha jasa; 6) tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan, perikanan; 7) tenaga produksi, operator alat angkutan, pekerja kasar; 8) lainnya.
37. **Status pekerjaan** adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

A. LETAK GEOGRAFIS DAERAH

Secara geografis, Provinsi Sumatera Barat terletak pada 1° 54' Lintang Utara dan 3° 30' Lintang Selatan serta 98° 36' dan – 101° 53' Bujur Timur dan memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Utara.
- Sebelah Selatan dengan Provinsi Bengkulu dan Provinsi Jambi.
- Sebelah Timur dengan Provinsi Riau.
- Sebelah Barat dengan Samudera Hindia.

Provinsi Sumatera Barat terletak di pesisir barat bagian tengah pulau Sumatera yang terdiri dari dataran rendah di pantai barat dan dataran tinggi vulkanik yang dibentuk oleh Bukit Barisan. Provinsi ini memiliki daratan seluas 42.125 kilometer persegi. Dari luas tersebut, lebih dari 45,17 persen merupakan kawasan yang masih ditutupi hutan lindung. Garis pantai provinsi ini seluruhnya bersentuhan dengan Samudera Hindia sepanjang 2.420.357 kilometer dengan luas perairan laut 186.580 kilometer persegi. Kepulauan Mentawai yang terletak di Samudera Hindia termasuk dalam provinsi ini.

Seperti daerah lainnya di Indonesia, iklim Sumatera Barat secara umum bersifat tropis dengan suhu udara yang cukup tinggi, yaitu antara 22,6°C sampai 31,5°C. Provinsi ini juga dilalui oleh garis khatulistiwa, tepatnya di Bonjol, Pasaman. Gunung tertinggi di Provinsi Sumatera Barat adalah Gunung Talamau dengan ketinggian 2.913 meter dari permukaan laut.

Sumatera Barat merupakan salah satu daerah rawan gempa di Indonesia. Hal ini disebabkan karena letaknya yang berada pada

jalur patahan Semangko, tepat di antara pertemuan dua lempeng benua besar, yaitu Eurasia dan Indo-Australia. Oleh karenanya, wilayah ini sering mengalami gempa bumi. Beberapa gempa bumi besar terakhir yang terjadi di Sumatera Barat diantaranya adalah gempa bumi 30 September 2009 dan gempa bumi Kepulauan Mentawai Tahun 2010.

Provinsi Sumatera Barat berdiri pada tanggal 31 Juli 1958 berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958. Ibukota Provinsi Sumatera Barat adalah Kota Padang. Secara administratif, Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 12 Kabupaten, 7 Kota, 179 Kecamatan, 928 Desa, dan 230 Kelurahan. Kesembilan belas Kabupaten/Kota itu adalah :

- 1) Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari 15 Kecamatan dan 182 Desa.
- 2) Kabupaten Solok terdiri dari 14 Kecamatan dan 74 Desa.
- 3) Kabupaten Sijunjung terdiri dari 8 Kecamatan dan 61 Desa.
- 4) Kabupaten Tanah Datar terdiri dari 14 Kecamatan dan 75 Desa.
- 5) Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari 17 Kecamatan dan 103 Desa.
- 6) Kabupaten Agam terdiri dari 16 Kecamatan dan 82 Desa.
- 7) Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari 13 Kecamatan dan 79 Desa.
- 8) Kabupaten Pasaman terdiri dari 12 Kecamatan dan 37 Desa.
- 9) Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri dari 10 Kecamatan dan 43 Desa.
- 10) Kabupaten Dharmasraya terdiri dari 11 Kecamatan dan 52 Desa.
- 11) Kabupaten Solok Selatan terdiri dari 7 Kecamatan dan 39 Desa.
- 12) Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari 11 Kecamatan dan 19 Desa.
- 13) Kota Padang terdiri dari 11 Kecamatan dan 104 Kelurahan.
- 14) Kota Solok terdiri dari 2 Kecamatan dan 13 Kelurahan.

- 15) Kota Sawahlunto terdiri dari 4 Kecamatan, 27 Desa, dan 10 Kelurahan.
- 16) Kota Padang Panjang terdiri dari 2 Kecamatan dan 16 Kelurahan.
- 17) Kota Bukittinggi terdiri dari 3 Kecamatan dan 24 Kelurahan.
- 18) Kota Payakumbuh terdiri dari 5 Kecamatan dan 47 Kelurahan.
- 19) Kota Pariaman terdiri dari 4 Kecamatan, 55 Desa, dan 16 Kelurahan.

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan Kabupaten/Kota terbesar dengan luas wilayah 5.998 kilometer persegi atau 14,24 persen dari luas Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Kota Padang Panjang merupakan Kabupaten/Kota terkecil dengan luas wilayah 21 kilometer persegi atau 0,05 persen dari luas Provinsi Sumatera Barat.

B. KONDISI DEMOGRAFIS DAERAH

Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017 adalah sebanyak 5.511.246 jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak 2.789.477 jiwa (50,61 persen) dan perempuan sebanyak 2.721.769 jiwa (49,39 persen). Penyebaran penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 1.

Jika diperhatikan menurut jenis kelamin, nampak bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Gambaran ini terlihat di seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 1.
Jumlah Penduduk per Kabupaten/Kota Menurut Jenis Kelamin
Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017

No	Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin (Jiwa)		Total (Jiwa)
		Laki-Laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1	Kabupaten Pesisir Selatan	263.870	255.652	519.522
2	Kabupaten Solok	191.256	186.036	377.292
3	Kabupaten Sijunjung	119.075	115.840	234.915
4	Kabupaten Tanah Datar	184.306	183.448	367.754
5	Kabupaten Padang Pariaman	236.179	228.381	464.560
6	Kabupaten Agam	265.949	260.892	526.841
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	187.981	187.497	375.478
8	Kabupaten Pasaman	159.867	156.753	316.620
9	Kabupaten Kep. Mentawai	44.691	40.978	85.669
10	Kabupaten Dharmasraya	105.915	101.968	207.883
11	Kabupaten Solok Selatan	91.482	87.205	178.687
12	Kabupaten Pasaman Barat	218.730	211.174	429.904
13	Kota Padang	448.894	438.781	887.675
14	Kota Solok	36.087	35.636	71.723
15	Kota Sawahlunto	32.617	32.425	65.042
16	Kota Padang Panjang	28.568	27.994	56.562
17	Kota Bukittinggi	59.810	59.373	119.183
18	Kota Payakumbuh	68.236	66.973	135.209
19	Kota Pariaman	45.964	44.763	90.727
	SUMATERA BARAT	2.789.477	2.721.769	5.511.246

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2017 (diolah)

Tingkat pertumbuhan penduduk Provinsi Sumatera Barat untuk periode Semester I – Semester II Tahun 2017 adalah sebesar 0,77 persen. Penyebaran penduduk yang tidak merata dan luas wilayah Kabupaten/Kota yang berbeda-beda menyebabkan jumlah penduduk disetiap Kabupaten/Kota sangatlah bervariasi dengan tingkat kepadatan penduduk Provinsi Sumatera Barat adalah 130,83 jiwa per kilometer persegi.

Tingkat kepadatan penduduk tertinggi berada di Kota Bukittinggi yaitu 4.965,96 jiwa per kilometer persegi dengan luas wilayah yang hanya 24

kilometer persegi dan merupakan wilayah dengan luas terkecil kedua setelah Kota Padang Panjang. Hal ini disebabkan karena perkembangan penduduk Kota Bukittinggi yang tidak terlepas dari keberadaan dan peran kota ini sesuai dengan potensi dibidang pendidikan, kesehatan, pariwisata, serta perdagangan dan jasa yang mengakibatkan meningkatnya arus urbanisasi yaitu perpindahan penduduk yang datang ke Kota Bukittinggi.

Sementara itu, wilayah dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu hanya 14,28 jiwa per kilometer persegi dengan luas wilayah terbesar yaitu 5.998 kilometer persegi. Ini disebabkan karena Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan Kabupaten yang bentuk wilayah geografisnya adalah kepulauan, dimana terdiri dari 4 (empat) pulau besar yang berpenghuni yaitu Pulau Siberut, Sipora, Pagai Utara, dan Pagai Selatan yang dihuni oleh mayoritas suku Mentawai dan 95 (sembilan puluh lima) pulau-pulau kecil lainnya yang menyebar di sekeliling Kabupaten Kepulauan Mentawai. Namun, sebagian besar pulau yang lain hanya ditanami dengan pohon kelapa dan jarak rumah penduduk yang jauh antara satu sama lainnya.

Gambaran jumlah penduduk, luas wilayah, dan kepadatan penduduk secara keseluruhan di Provinsi Sumatera Barat per Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Tabel 2 dan Gambar 1.

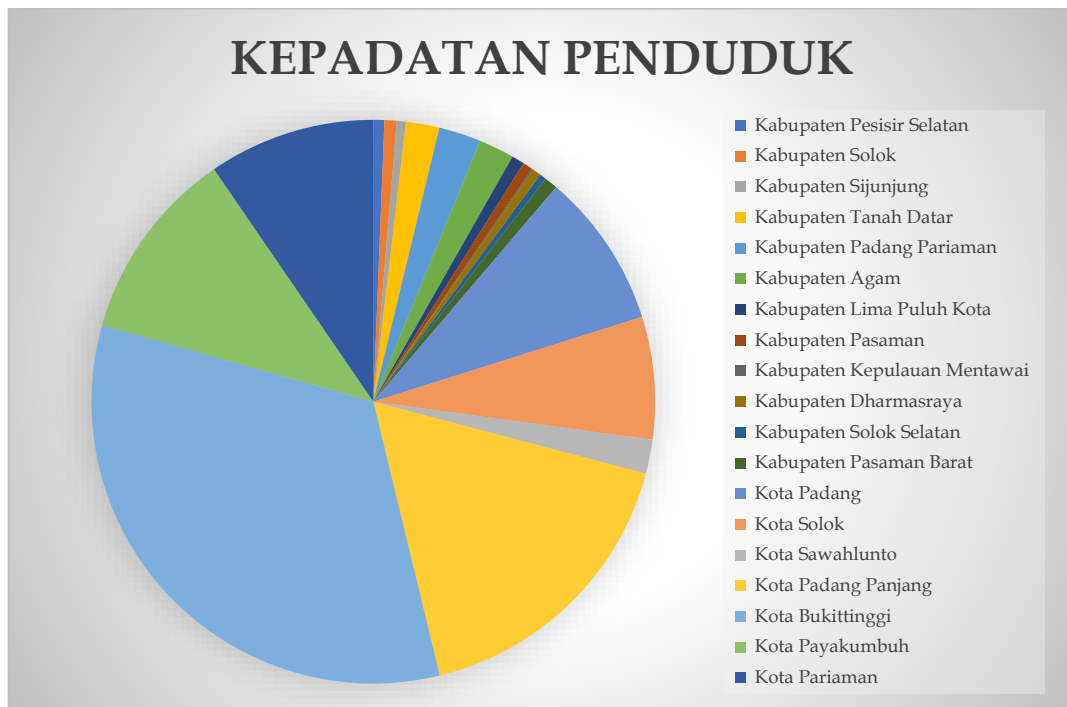
PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN PROVINSI SUMATERA BARAT

2017

Tabel 2.
Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk
Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017

No	Kabupaten/Kota	Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
1	2	3	4	5
1	Kabupaten Pesisir Selatan	519.522	6.106	85,08
2	Kabupaten Solok	377.292	3.247	116,20
3	Kabupaten Sijunjung	234.915	3.068	76,57
4	Kabupaten Tanah Datar	367.754	1.315	279,66
5	Kabupaten Padang Pariaman	464.560	1.354	343,10
6	Kabupaten Agam	526.841	2.238	235,41
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	375.478	3.324	112,96
8	Kabupaten Pasaman	316.620	3.936	80,44
9	Kabupaten Kepulauan Mentawai	85.669	5.998	14,28
10	Kabupaten Dharmasraya	207.883	3.018	68,88
11	Kabupaten Solok Selatan	178.687	3.612	49,47
12	Kabupaten Pasaman Barat	429.904	3.738	115,01
13	Kota Padang	887.675	686	1.293,99
14	Kota Solok	71.723	61	1.175,79
15	Kota Sawahlunto	65.042	239	272,14
16	Kota Padang Panjang	56.562	21	2.693,43
17	Kota Bukittinggi	119.183	24	4.965,96
18	Kota Payakumbuh	135.209	75	1.802,79
19	Kota Pariaman	90.727	65	1.395,80
	SUMATERA BARAT	5.511.246	42.125	130,83

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2017 (diolah)



Gambar 1. Grafik Kepadatan Penduduk Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

Sedangkan berdasarkan agama, penduduk Provinsi Sumatera Barat didominasi oleh pemeluk agama Islam yaitu sebanyak 5.381.178 jiwa atau 97,64 persen dan pemeluk agama lainnya adalah Kristen sebanyak 80.504 jiwa atau 1,46 persen, Katholik sebanyak 45.496 jiwa atau 0,83 persen Hindu sebanyak 106 jiwa atau 0 persen, Budha sebanyak 3.717 jiwa atau 0,07 persen, Konghucu sebanyak 7 jiwa atau 0 persen, dan Kepercayaan sebanyak 238 jiwa atau 0 persen.

C. GAMBARAN EKONOMI DAERAH

Ekonomi Sumbar tumbuh moderat, dengan realisasi pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2017 sebesar 5,37% (yoy) atau sedikit melambat dibandingkan triwulan III 2017 sebesar 5,39% (yoy). Perlambatan bersumber dari menurunnya kinerja konsumsi pemerintah dan investasi, yang disebabkan oleh faktor menurunnya tingkat realisasi belanja pemerintah

baik di sisi penerimaan maupun pengeluaran serta menurunnya porsi dan realisasi belanja modal dalam struktur APBD. Di sisi lapangan usaha (LU), perlambatan bersumber dari LU pertanian, LU perdagangan dan LU industri pengolahan. Tingginya curah hujan dan serangan hama berpengaruh pada penurunan kinerja LU pertanian. Selanjutnya, perilaku sebagian masyarakat yang menahan pembelian kendaraan bermotor berimbas pada melambatnya LU perdagangan. Sementara penurunan kapasitas produksi akibat turunnya permintaan berdampak pada tertahannya LU industri pengolahan untuk tumbuh lebih tinggi. Secara keseluruhan tahun, perekonomian Sumatera Barat tahun 2017 tumbuh 5,29% (yoy) atau sedikit meningkat dibandingkan tahun 2016 sebesar 5,27% (yoy). Sumber penopang pertumbuhan tahun 2017 berasal dari meningkatnya konsumsi rumah tangga, dan ekspor luar negeri. Sedangkan secara lapangan usaha, pertumbuhan terjadi karena adanya perbaikan kinerja pertanian dan perdagangan.

Perekonomian Sumatera Barat pada triwulan I 2018 diperkirakan melambat dalam kisaran 5,1 – 5,5% (yoy). Melambatnya kinerja konsumsi rumah tangga dan masih terbatasnya aktivitas swasta dan pemerintah di awal tahun menahan laju perekonomian pada triwulan I 2018. Sementara itu realisasi belanja modal pemerintah dan investasi sektor swasta yang juga masih rendah di awal tahun berdampak pada tertahannya kinerja investasi. Meningkatnya harga komoditas internasional seperti CPO diharapkan dapat berdampak pada peningkatan kinerja ekspor dan industri pengolahan.

Kinerja realisasi keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat triwulan IV 2017 secara umum meningkat. Dana Perimbangan yang naik dibandingkan realisasi pada triwulan IV 2016 menyebabkan realisasi pendapatan Provinsi Sumatera Barat pada triwulan IV 2017 mencapai Rp5.767,50 miliar. Peningkatan juga terjadi pada realisasi belanja triwulan IV 2017 yang mencapai Rp5.755,98 miliar karena meningkatnya biaya belanja

pegawai dari pengalihan sumber penggajian sebagian Aparatur Sipil Negara (ASN) dari APBD kabupaten/kota menjadi APBD provinsi. Selain itu peningkatan juga tercatat pada belanja barang/jasa dan modal di 19 kabupaten/kota yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Tren rendahnya inflasi di triwulan III 2017 berlanjut ke penghujung tahun 2017. Laju inflasi Sumbar pada triwulan IV 2017 tercatat 2,03% (yoy), dipicu oleh menurunnya tekanan harga dari kelompok administered price dan keberhasilan pengendalian inflasi volatile food. Terjaganya pasokan pangan serta kenaikan harga tarif angkutan udara yang tidak setinggi tahun sebelumnya menjadi faktor penjaga inflasi pada triwulan IV 2017. Mulai terbatasnya pasokan komoditas hortikultura di tengah permintaan yang tinggi berdampak pada meningkatnya tekanan inflasi Sumbar pada triwulan I 2018. Berdasarkan Survei Pemantauan Harga, naiknya harga cabai merah, bawang merah, dan ayam ras memicu naiknya inflasi Sumbar pada triwulan I 2018 yang diperkirakan pada kisaran 2,0% - 2,4% (yoy).

Secara umum, stabilitas keuangan daerah relatif terjaga. Hal tersebut didukung oleh kinerja sektor rumah tangga dan sektor korporasi yang ditopang oleh membaiknya harga komoditas unggulan Sumatera Barat, yakni CPO dan karet hingga triwulan IV 2017 ini. Kenaikan harga dua komoditas ini juga menyebabkan naiknya pendapatan masyarakat Sumatera Barat yang turut mendorong konsumsi rumah tangga sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Selain itu, maraknya penyelenggaraan event berskala nasional maupun internasional dan semakin giatnya aktivitas pariwisata di Sumatera Barat ikut serta mendorong pendapatan dan konsumsi masyarakat Sumbar sebagaimana tercermin dalam Survei Konsumen (SK) berupa Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK), dan Indeks Kondisi Ekonomi (IKE). Membaiknya kinerja sektor rumah tangga juga berkorelasi

positif dengan peningkatan kredit multiguna dan kredit kepemilikan rumah (KPR). Sedangkan kinerja sektor korporasi juga menunjukkan perbaikan pada triwulan IV 2017 akibat membaiknya permintaan domestik dan ekspor. Kredit sektor rumah tangga sedikit mengalami pertumbuhan pada triwulan IV 2017. Kredit perbankan yang disalurkan untuk sektor rumah tangga pada triwulan IV 2017 mencapai Rp24,4 triliun atau tumbuh sebesar 8,07% (yoy), serta ditopang oleh kredit KPR yang tumbuh sebesar 8,72% (yoy). Di sisi lain, pertumbuhan kredit rumah tangga lebih lanjut tertahan oleh kredit kendaraan bermotor (KKB) yang mengalami kontraksi dibanding triwulan sebelumnya

Transaksi non tunai di Sumatera Barat menunjukkan tren penurunan. Transaksi kliring Sumatera Barat triwulan IV 2017 cenderung lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun-tahun sebelumnya. Namun sebaliknya, transaksi uang elektronik mencatatkan kenaikan signifikan akibat mulai masuknya beberapa penyelenggara baru di Sumatera Barat. Perkembangan juga disebabkan oleh perubahan mekanisme panyaluran bantuan sosial kepada masyarakat Kota Padang menjadi non tunai melalui automatic teller machine atau agen-agen bank yang telah ditunjuk menggunakan kartu. Dari sisi pengelolaan uang rupiah di Sumatera Barat, transaksi tunai masih menjadi pilihan utama masyarakat Sumatera Barat sepanjang tahun 2017 yang berimbas pada tingginya jumlah uang tidak layak edar yang dimusnahkan mencapai 247,55 juta lembar bilyet atau setara Rp8,87 triliun. Pengelolaan uang rupiah, terjadi anomali arus kas (cashflow) perbankan. Karakteristik cashflow di Sumatera Barat pada triwulan IV dalam kurun waktu empat tahun terakhir menunjukkan kondisi net inflow. Namun, berbeda dengan triwulan IV 2017 yang justru mencatat net outflow.

Perbaikan kinerja perekonomian Sumatera Barat ternyata belum sejalan dengan tingkat penyerapan tenaga kerja, tercermin dari menurunnya

tingkat partisipasi angkatan kerja yang diiringi oleh peningkatan pengangguran terbuka pada Agustus 2017. Perluasan lapangan kerja tidak dapat mengimbangi melonjaknya angkatan kerja baru. Keterbatasan jumlah industri dan ketidaksesuaian kualitas pencari kerja dengan kualifikasi perusahaan turut menyumbang turunnya angka penyerapan tenaga kerja. Secara sektoral, penyerapan tenaga kerja (Agustus 2017) masih didominasi oleh sektor pertanian dan perdagangan.

Kesejahteraan daerah terpantau membaik pada tahun 2017, tercermin dari menurunnya jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, dan indeks keparahan kemiskinan secara merata di perdesaan maupun perkotaan. Peningkatan harga internasional (CPO dan karet) yang terjadi sejak akhir tahun 2016 berimbas pada meningkatnya pendapatan masyarakat yang sebagian besar mata pencahariannya bergantung pada dua komoditas tersebut. Selain itu, kualitas hidup masyarakat Sumatera Barat juga relatif meningkat dengan membaiknya IPM, diikuti oleh perbaikan pada indeks ketimpangan atau ketidakmerataan ekonomi penduduk di Sumatera Barat. Angka rasio gini Sumatera Barat terpantau cukup baik, yakni berada pada urutan terendah ke-2 (dua) di Sumatera atau ke-5 (lima) secara nasional.

Perekonomian Sumatera Barat pada triwulan II 2018 diperkirakan tumbuh pada kisaran 5,2% - 5,6% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya dengan prakiraan sebesar 5,1% - 5,5% (yoy) disebabkan faktor siklikal perayaan keagamaan Idul Fitri dan perhelatan Pilkada di empat daerah Sumbar. Di sisi permintaan, kondisi ini berdampak pada akselerasi konsumsi rumah tangga, sementara di sisi lapangan usaha (LU) berdampak positif pada LU perdagangan dan LU transportasi. Lebih lanjut, perkiraan meningkatnya harga komoditas CPO dan karet diperkirakan mampu mengangkat kinerja ekspor dan industri pengolahan. Secara keseluruhan

tahun, pertumbuhan ekonomi Sumbar di tahun 2018 diperkirakan berada pada kisaran 5,1% - 5,5% (yoy), cenderung stabil dibandingkan tahun 2017. Seperti halnya tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Sumbar dominan bersumber dari konsumsi rumah tangga, investasi dan ekspor. Konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh moderat sejalan dengan peningkatan pertumbuhan kelas menengah dan pelaksanaan Pilkada serentak pada pertengahan tahun 2018 yang diperkirakan mampu meningkatkan geliat LNPRT. Sementara itu, peningkatan harga komoditas internasional juga diperkirakan dapat mengangkat kinerja ekspor.

Laju inflasi di triwulan II 2018 diperkirakan meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya, dengan rentang inflasi 3,5% - 3,9% (yoy) yang dominan didorong oleh peningkatan harga volatile food dan administered price. Inflasi di triwulan II 2018 diperkirakan bersumber dari komoditas cabai merah dan tarif angkutan udara menjelang Idul Fitri. Konsumsi masyarakat yang meningkat juga diperkirakan berdampak pada inflasi inti. Lebih lanjut, tren kenaikan minyak dunia dan batubara berpotensi mengakibatkan kenaikan BBM nonsubsidi dan tarif listrik.

Laju inflasi Sumbar tahun 2018 diproyeksikan pada kisaran $3,5\% \pm 1\%$ (yoy) atau meningkat dibandingkan tahun 2017. Dari sisi eksternal, inflasi ini relatif terjaga dengan terkendalinya volatilitas nilai tukar dan harga komoditas internasional. Dari sisi internal Sumbar, meningkatnya permintaan domestik diperkirakan masih dapat diimbangi oleh sisi penawaran. Tekanan inflasi di tahun 2018 diperkirakan dominan bersumber dari kelompok volatile foods. Sementara pada kelompok administered price, adanya jaminan dari pemerintah pusat untuk tidak menaikkan harga barang/jasa yang diatur pemerintah seperti BBM subsidi dan LPG 3 kg menjadi faktor penting penahan inflasi di tahun 2018. Mencermati risiko inflasi yang lebih tinggi, upaya pengendalian inflasi di 2018 akan

dititikberatkan pada percepatan implementasi kerja sama antar daerah yang telah diijazahkan pada tahun 2017.

D. POTENSI DAERAH

Sumatera Barat, salah satu provinsi di Indonesia di wilayah Pulau Sumatera, dilengkapi dengan keanekaragaman hayati. Dengan kondisi wilayah yang dikelilingi oleh laut dan juga barisan pegunungan, maka mengakibatkan daerah Sumatera Barat dikelilingi oleh hutan Hujan Tropis, dengan kondisi curah hujan dan kelembaban yang mendukung bagi berbagai jenis tanaman tropis. Oleh karena itu, hampir 70 persen wilayah hutan di Sumatera Barat dijadikan Hutan Konservasi (32 persen) dan Hutan Lindung (35 persen). Dukungan Geografi tersebut membuat sektor pertanian menjadi unggulan di Sumatera Barat dari sembilan jenis sektor usaha lainnya.

Tidak hanya hutan, Sumatera Barat juga terkenal dengan bentangan pegunungan Bukit Barisan. Pegunungan Bukit Barisan terbentang dari Utara Pulau Sumatera yaitu Nangroe Aceh Darusalam sampai ujung Selatan yaitu Lampung, dengan puncak tertinggi Gunung Kerinci yang terbentang di Jambi. Rangkaian Pegunungan Bukit Barisan merupakan rangkaian pegunungan pertemuan dari pelat tektonik Euroasia dan Australia. Pelat Tektonik tersebut mengandung banyak mineral dan bebatuan. Kondisi geografis alam tersebut memberikan implikasi adanya keanekaragaman batuan yang mungkin mendukung kapasitas produksi daerah. Terkhusus di Sumatera Barat, yang terkenal adalah Pasaman Area, masih dalam eksplorasi diperkirakan memiliki potensi tambang emas.

Sumatera Barat juga dapat dikategorikan sebagai daerah Hinterland untuk beberapa sektor yang dikuasai oleh Sumatera Barat. Hinterland merupakan istilah untuk daerah atau kota yang memiliki kemampuan

dalam memenuhi kebutuhan di daerah lainnya, dengan spesifikasi komoditi tertentu. Kategori Hinterland tersebut dimaksudkan untuk daerah yang memiliki LQ atau *Location Quotient*. LQ menggambarkan seberapa besar porsi kapasitas produksi suatu sektor dapat memenuhi kebutuhan nasional di sektor tersebut. Jika LQ lebih dari 1, maka menandakan bahwa daerah tersebut menjadi Hinterland bagi daerah lain pada sektor tersebut, jika LQ kurang dari satu, maka daerah tersebut masih harus dibantu untuk memenuhi kebutuhan domestik daerah tersebut.

Iklim Sumatera Barat yang sangat mendukung untuk berbagai jenis tanaman dan kekayaan akan Hutan Hujan Tropis, maka dapat diperkirakan bahwa sektor pertanian di Sumatera Barat mampu mendukung kondisi kebutuhan pertanian di daerah lain. Hal ini terbukti dari perkembangan LQ Sumatera Barat dalam sektor pertanian bahan pangan yang meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2005, LQ produksi pertanian bahan pangan menunjukkan angka 0,92, sedangkan pada tahun 2006, LQ melonjak mencapai 2,17, dan diperkirakan terus menguat sampai akhir 2008. Oleh karena itu potensi pertanian dan berbagai keanekaragaman hayati sangat besar dan masih layak untuk dikembangkan, melalui investasi teknologi dan ilmu pengetahuan Holtikultura.

Sesuai paparan di atas, kondisi iklim dan cuaca di Sumatera Barat mendukung untuk memiliki kondisi dan kekayaan hutan. Namun, kekayaan keanekaragaman jenis tanaman hutan hujan tropis Sumatera Barat membuat lebih dari 50 persen hutan dijadikan hutan lindung dan konservasi, namun angka LQ masih menunjukkan bahwa Sumatera Barat masih mampu mendukung kebutuhan hasil produksi hutan daerah lain. Pada tahun 2005 LQ produksi pertanian-kehutanan sebesar 2,47, yang artinya Sumatera Barat masih mampu memenuhi kebutuhan hasil produksi hutan oleh daerah lain.

Namun, terjadi penurunan pada tahun 2006, LQ menunjukkan posisi 1,6, sedangkan pertumbuhan hasil hutan mencapai 19,6 persen, sedangkan pada tahun sebelumnya hanya tumbuh 3,7 persen. Kondisi yang kontradiktif ini menunjukkan adanya implikasi perkembangan produksi di sektor lain melampaui perkembangan sektor kehutanan di Sumatera Barat. Walaupun begitu, Sumatera Barat masih mampu menjadi *Hinterland* bagi daerah lain pada sektor hasil sumber daya hayati.

Sumatera Barat memiliki potensi bahan tambang golongan A, B dan C. Bahan tambang golongan A, yaitu batu bara terdapat di Kabupaten Sijunjung dan Kota Sawahlunto.

Sedangkan Bahan tambang golongan B yang terdiri dari air raksa, belerang, pasir besi, tembaga, timah hitam dan perak menyebar di wilayah kabupaten Sijunjung, Solok, Lima Puluh Kota, Pasaman, dan Tanah Datar.

Bahan tambang golongan C menyebar di seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat, sebagian besar terdiri dari pasir, batu dan kerikil sedangkan di Padang Pariaman terdapat obsidian dan batu andesit.

Salah satu yang telah banyak memberi manfaat bagi Sumatera Barat adalah batuan kapur sebagai bahan dasar industri semen. PT Semen Padang di Padang telah memanfaatkan kekayaan alam Sumatera Barat ini selama puluhan tahun. Batu kapur banyak terdapat di sekitar Padang, daerah sekitar Danau Singkarak dan Padang Panjang. Di Padang Panjang saja, deposit batu kapur yang dapat dieksploitasi mencapai 43 juta ton.

Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi pertambangan yang relatif banyak. Barang tambang potensial meliputi :

- (a) Barang tambang yang diperoleh dari dalam bumi antara lain : batu bara, pasir besi, bijih timah, bijih nikel, bijih tembaga, bijih bauksit, bijih mangan, bijih emas dan perak, minyak bumi, gas bumi, yodium, belerang dan posfor;

- (b) Barang-barang galian antara lain : batu, pasir, kapur, tanah liat, kaolin dan garam (BPS, Sumatera Barat, 2008).

Berikut beberapa komoditi di sektor pertambangan yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat yang memiliki potensi untuk dikembangkan, di antaranya adalah :

1. Batu Bara

Potensi Pengembangan Pertambangan Batu Bara yang terdapat di :

- 1) Daerah Ombilin Kota Sawahlunto dengan cadangan $\pm 887.449.125$ ton, terukur $132.872.875$ ton dan tereka $1.076.250$ ton. Cadangan batu bara tersebut termasuk cadangan yang layak tambang (*mineable reserve*) di wilayah kuasa pertambangan PT. Tambang Batu Bara Bukit Asam (PTBA) – Unit Pertambangan Ombilin (UPO) sebesar $\pm 106.875.000$ ton (cadangan terbuka $\pm 4.177.000$ ton dan cadangan tambang dalam $\pm 102.608.000$).
- 2) Daerah Kiliranjao, Kabupaten Sijunjung dengan cadangan $\pm 8.676.373$ ton.
- 3) Sawah, Kabupaten Sijunjung dengan cadangan $1.702.355$ ton.
- 4) Lubuk Tarab, Kabupaten Sijunjung dengan cadangan hipotetik 121.500 ton.
- 5) Jujuhan, Sinamar di Kabupaten Sijunjung dengan cadangan terindikasi $65.750.000$ ton.
- 6) Lumpo IV Jurai (Kabupaten Pesisir Selatan) dengan cadangan hipotetik 926.525 ton.
- 7) Penadah Pacung Soal (Kabupaten Pesisir Selatan) dengan cadangan terukur $2.319.188$ ton.
- 8) Tapan di Kabupaten Pesisir Selatan dengan cadangan 850.000 ton.
- 9) Daerah Sulit Air, Air Luo, Timbulun, Alahan Panjang, dan Sungai Abu di Kabupaten Solok dengan cadangan belum diketahui.

2. Emas

Potensi Pengembangan Pertambangan Emas yang terdapat di daerah :

- 1) Kinadam (Pasaman) dengan cadangan ± 537 kg (kadar konsentrat)
- 2) Balimbing, Bonjol, Silaping, Muaro Tambangan, Tamping, dan Rao Mapat Tunggul di Kabupaten Pasaman cadangan belum diketahui.
- 3) Manggani dan Pagadis di Kabupaten Lima Puluh Kota cadangan belum diketahui.
- 4) Lubuk Selasih, talang Babungo, Sungai Abu, Sungai Sapek, Sungai Batang Hari, Supayang, Blangsi di Kabupaten Solok dengan cadangan belum diketahui.
- 5) Sawah Tembangan, Sungai Dareh, Sungai Batang Hari Kabupaten Dharmasraya.
- 6) Mundam Sakti/Pelangki, Kabupaten Sijunjung.
- 7) Salido dan Gunung Harun, Kabupaten Pesisir Selatan cadangan belum diketahui.

3. Biji Besi

Potensi Pengembangan Pertambangan Biji Besi, antara lain terdapat di daerah :

- 1) Paninggahan, Lubuk Selasih, Gunung Talang, Air Dingin Lembah Gumanti dan Surian Kabupaten Solok.
- 2) Bukit Batu Besi Kabupaten Tanah Datar,
- 3) Palembayan Kabupaten Agam,
- 4) Batu Manjukur Kabupaten Sijunjung,
- 5) Bonjol Kabupaten Pasaman.

4. Pasir Besi

Potensi Pengembangan Pertambangan Pasir Besi, antara lain terdapat di daerah :

- 1) Pantai Sunur di Padang Pariaman dengan kadar besi 2 – 5% dan ketebalan bervariasi antara 2 mm – 10 cm.
- 2) Pasir Ganting Kec. Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan dengan kadar besi 2 – 5% dan ketebalan 2 mm – 5 cm.
- 3) Muara Batang Masang Gadang Kabupaten Pasaman Barat dengan kadar besi 3 – 7% dan ketebalan 2 mm – 10 cm.
- 4) Katiangan Pasaman dengan kadar besi 3 – 5% dan ketebalan 2 mm – 10 cm.

5. Tembaga

Potensi Pengembangan Pertambangan Tembaga, antara lain terdapat di daerah :

- 1) Timbulun (Kabupaten Solok) dengan kadar Cu = 12%,
- 2) Lubuk Selasih (Kabupaten Solok) dengan kadar Cu = 0,9 – 1,3%,
- 3) Paninggahan X Kota Singkarak (Kabupaten Solok) dengan cadangan belum diketahui,
- 4) Sei. Pagu Kabupaten Solok Selatan dengan cadangan 5.000 ton (hipotetik) dan kadar Cu = 0,20 – 0%.

6. Mangan

Potensi Pengembangan Pertambangan Mangan, antara lain terdapat di daerah Kabupaten Solok (Bukit Sileh, Gunung Talang, Bali Bawah, Batu Bajanjang) dengan cadangan belum diketahui. Terdapat pula di daerah Gunung Marapi (Kabupaten Agam dan Tanah Datar). dengan cadangan hipotetik ± 100 ton.

7. Timah Hitam

Potensi Pengembangan Pertambangan Timah Hitam yang antara lain terdapat di daerah :

- 1) Tanjung Balit di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan cadangan terukur ± 322.575 ton dan tereka ± 287.250 ton.

- 2) Lubuk Gadang (Kabupaten Solok) cadangan hipotetik ± 280.000 ton.
- 3) Lubuk Selasih, Talang Kabupaten Solok cadangan belum diketahui.
- 4) Sungai Pagu, Sangir Kabupaten Solok Selatan,
- 5) Sumpu, Pamanongan, Sungai Alai Kabupaten Pasaman cadangan belum diketahui.

8. Belerang

Potensi Pengembangan Pertambangan Belerang, antara lain terdapat di daerah Kabupaten Solok (Bukit Sileh, Gunung Talang, Bali Bawah, Batu Bajanjang) cadangan belum diketahui, dan Gunung Marapi (Agam dan Tanah Datar) cadangan hipotetik ± 100 ton.

9. Air Raksa

Potensi Pengembangan Pengolahan Air Raksa, antara lain terdapat di daerah Gade Talang, Sungai Tapir dan Sibalabu, Kabupaten Sijunjung cadangan belum diketahui. Dan terdapat Bahan Galian Industri.

10. Batu Gamping/Batu Kapur

Potensi Pengembangan Pertambangan Batu Gamping/Batu Kapur antara lain terdapat di daerah :

- 1) Kamang (Kabupaten Agam) tersebar pada area 2.660 ha, Simarasap tersebar pada area 2.660 ha dan daerah Baso Kabupaten Agam tersebar pada area 120 ha.
- 2) Indarung Kota Padang dengan cadangan tereka 500.000.000 ton, terukur 400.461.775 ton, terindikasi 13.000.000 ton.
- 3) Silungkang Kota Sawahlunto tersebar pada area 1.155,69 ha. Di Tanjung Lolo tersebar pada area 8.926,43 ha.
- 4) Gadang, Kabupaten Sijunjung tersebar pada area 596,29 ha.
- 5) Muaro, Kecamatan Sijunjung tersebar pada area 2.977,09 ha.

- 6) Sumpur Kudus (Kabupaten Sijunjung) tersebar pada area 8.618,99 ha.
- 7) Tungkar (Kabupaten Lima Puluh Kota) tersebar pada area 585,38 ha,
- 8) Halaban (Kabupaten Lima Puluh Kota) tersebar pada area 1.312,42 ha,
- 9) Sitanang (Kabupaten Lima Puluh Kota) tersebar pada area 27,37 ha,
- 10) Batuhampar (Kabupaten Lima Puluh Kota) tersebar pada area 143,56 ha,
- 11) Siguntur (Kabupaten Pesisir Selatan) tersebar pada area 5 ha.
- 12) Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok tersebar pada area seluas 2.435,29 ha.
- 13) Kecamatan X Koto Singkarak tersebar pada area seluas 691,30 ha.
- 14) Kecamatan IX Koto Sungai Lasi tersebar pada area seluas 332,62 ha.
- 15) Muara Kiawai (Kabupaten Pasaman Barat) tersebar pada area 2.500 ha.
- 16) Kajai (Pasaman) pada area 100 ha.

11. Dolomit

Potensi Pengembangn Dolomit yang antara lain terdapat di daerah :

- 1) Tanjung Lolo (Kabupaten Sijunjung) dengan cadangan belum diketahui.
- 2) Mudik Palupuh (Kabupaten Agam) dengan cadangan belum diketahui.
- 3) Lembah Gumati (Kabupaten Solok) dengan cadangan belum diketahui.
- 4) Taraktak di Kabupaten Sijunjung dengan cadangan belum diketahui.

12. Batu Marmer

Potensi Pengembangan Batu Marmer terdapat di daerah :

- 1) Sibiluru (Kabupaten Sijunjung) dengan cadangan hipotetik 62.500.000 ton.
- 2) Tanjung Lolo dengan cadangan belum diketahui.
- 3) Takung di Kabupaten Sijunjung dengan cadangan belum diketahui.
- 4) Silungkang di Sawahlunto dengan cadangan belum diketahui.
- 5) Palupuh dan Matur di Kabupaten Agam dengan cadangan hipotetik 62.500.000 ton.
- 6) Sitanang dengan cadangan hipotetik 1.249.792 ton.
- 7) Daerah Tungkur di Kabupaten 50 Kota dengan cadangan 37.500.000 ton.
- 8) Daerah Muara Kiawai di Kabupaten Pasaman Barat dengan cadangan hipotetik 187.500.000 ton.

13. Batu Granit

Program Pengembangan Pertambangan Batu Granit di daerah :

- 1) Air Bangis di Kabupaten Pasaman Barat dengan cadangan hipotetik 6.000.000.000 ton.
- 2) Panti Kabupaten Pasaman dengan cadangan hipotetik 300.000.000.000 ton.
- 3) Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung dengan cadangan hipotetik 250.000.000.000 ton.
- 4) Padang Ganting di Kabupaten Tanah Datar dengan cadangan hipotetik 25.000.000.000 ton.
- 5) Ombilin dengan cadangan hipotetik 800.000.000 ton.
- 6) Salibutan di Kabupaten Padang Pariaman dengan cadangan hipotetik 1.300.000.000 ton.

- 7) Lembah Anai di Kabupaten Tanah Datar dengan cadangan hipotetik 22.500.000.000 ton.
- 8) Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya dengan cadangan hipotetik 937.000.000.000 ton.

14. Andesit dan Basalt

Potensi Pengembangan Pertambangan Andesit dan Basalt di daerah Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota dengan cadangan belum diketahui dan mutu baik, dan Sungai Sirah Kabupaten Pesisir Selatan.

15. Feldspar

Potensi Pengembangan Feldspar di daerah Lundar di Kabupaten Pasaman dengan cadangan dan mutu belum diketahui, dan di daerah Sulit Air di Kabupaten Solok juga dengan cadangan dan mutu belum diketahui.

16. Batu Apung

Potensi Pengembangan Pertambangan Batu Apung (Purnice) terdapat di beberapa daerah, seperti :

- 1) Sicincin (Kabupaten Padang Pariaman) dengan cadangan dan mutu belum diketahui.
- 2) Sungai Limau di Kabupaten Padang Pariaman dan di daerah Ngarai Sianok di Kabupaten Agam dengan cadangan dan mutu belum diketahui.

17. Batu Tulis

Potensi Pengembangan Pertambangan Batu Tulis (Slate) terdapat di daerah :

- 1) Talang Babungo dan Tanjung Balit di Lembah Gumanti di Solok dengan cadangan hipotetik masing-masing 1.750.000 ton dan 6.250.000 ton.

- 2) Taratak Kabupaten Sijunjung dengan cadangan hipotetik 1.875.000 ton.

18. Obsidian

Potensi Pengembangan Pertambangan Obsidian antara lain terdapat di daerah :

- 1) Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman jumlah cadangan belum diketahui.
- 2) Singkarak di Solok jumlah cadangan 3.537.500 ton, dan tereka 3.125.000 ton, dengan minimum ekspansi 8,5%.
- 3) Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman jumlah cadangan belum diketahui.
- 4) Simabur Kabupaten Tanah Datar jumlah cadangan belum diketahui.

19. Perlit

Potensi Pengembangan Pertambangan Perlit terdapat di daerah :

- 1) Bukit Rasam Kabupaten Pasaman dengan ekspansi minimum 50% dan ekspansi maksimum 251,51%.
- 2) Bukit Batu Kambing di Solok dengan ekspansi minimum 50% dan ekspansi maksimum 63,15%.
- 3) Sungai Geringging di Kabupaten Padang Pariaman jumlah cadangan belum diketahui.

20. Trass

Potensi Pengembangan Pertambangan Trass terdapat di daerah :

- 1) Matur di Kabupaten Agam dengan cadangan hipotetik sebesar 4.375 ton.
- 2) Sicincin di Kabupaten Padang Pariaman cadangan hipotetik sebesar 81.250.000 ton.

- 3) Batipuh Kabupaten Tanah Datar cadangan hipotetik sebesar 1.250.000 ton.
- 4) Piladang di Kabupaten Payakumbuh cadangan hipotetik sebesar 11.013.750 ton.

21. Kaolin

Potensi Pengembangan Pertambangan Kaolin antara lain terdapat di daerah :

- 1) Bonjol di Kabupaten Pasaman dengan cadangan terindikasi 20.265.000 ton tersebar pada areal seluas 140 ha dengan kemurnian 30%.
- 2) Mudik Palupuh di Kabupaten Agam dengan cadangan belum diketahui.
- 3) Lembah Gumanti di Solok dengan cadangan belum diketahui.
- 4) Taratak di Kabupaten Sijunjung dengan cadangan belum diketahui.

22. Lempung/Tanah Liat (clay)

Sedang Potensi Pengembangan Lempung/Tanah Liat (clay) terdapat di daerah :

- 1) Kabupaten Pesisir Selatan dengan cadangan hipotetik 4.625.000 ton.
- 2) Kabupaten Solok dengan cadangan hipotetik 750.000 ton.
- 3) Kabupaten Sijunjung dengan cadangan hipotetik 4.250.000 ton.
- 4) Kabupaten Tanah Datar dengan cadangan hipotetik 1.250.000 ton.
- 5) Kabupaten Lima Puluh Kota dengan cadangan hipotetik 5.375.000 ton.
- 6) Kabupaten Agam dengan cadangan hipotetik 1.875.000 ton.
- 7) Kabupaten Padang Pariaman dengan cadangan hipotetik 375.000 ton.

- 8) Kabupaten Pasaman dengan cadangan hipotetik 1.500.000 ton.
- 9) Indarung (Kota Padang) dengan cadangan terukur 10.319.272 ton.
- 10) Kota Solok dengan cadangan hipotetik 125.000 ton.
- 11) Kota Padang Panjang dengan cadangan hipotetik 62.500 ton.
- 12) Kota Sawahlunto dengan cadangan hipotetik 2.125.000 ton.

23. Rijang

Potensi Pengembangan Rijang di daerah Indarung Lubuk Kilangan Kota Padang hipotetik sebesar 3.720.753 ton.

24. Oker

Potensi Pengembangan Oker di daerah Muaro Labuh Solok Selatan jumlah cadangan belum diketahui, dan Tanjung Gadang di Kabupaten Sijunjung jumlah cadangan belum diketahui.

25. Pasir Kuarsa

Potensi Pasir Kuarsa terdapat di daerah :

- 1) Saruaso Kec. Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar dengan cadangan hipotetik 3.000.000 ton.
- 2) Sungai Nyalo Kec XI Terusan Kabupaten Pesisir Selatan dengan cadangan hipotetik 93.750 ton.
- 3) Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung dengan cadangan hipotetik 62.500.000 ton.

26. Fosfat

Potensi Pengembangan Fosfat terdapat di daerah :

- 1) Ngalau Sirangkiang, Ulu Air, Guo Pintu di Kabupaten Tanah Datar dengan mutu belum diketahui.
- 2) Ngalau Bunian, Biaro di Kabupaten Agam dengan cadangan dan mutu belum diketahui.
- 3) Indarung Lubuk Kilangan Kota Padang jumlah cadangan dan mutu belum diketahui pula.

27. Tawas

Potensi Pengembangan Tawas terdapat di daerah Bonjol Kabupaten Pasaman dengan cadangan hipotetik 20.875 ton dan Bayang di Kabupaten Pesisir Selatan dengan cadangan hipotetik sebesar 9.375 ton.

Sumatera Barat masih membutuhkan investasi di pertambangan, 70 persen dari seluruh daerah di Sumatera Barat didominasi oleh bagian bentangan pegunungan bukit barisan. Mengingat bukit barisan merupakan jenis lempengan tektonik, maka sudah dapat diperkirakan bumi Sumatera Barat kaya akan sumber mineral batuan. Salah satu indikasinya adalah adanya pabrik Semen Padang di Sumatera Barat, yang menunjukkan bahwa adanya sumber batuan kapur.

Beberapa daerah yang terkenal dengan hasil pertambangan tembaga, timah dan peraknya adalah area Sawahlunto dan Kabupaten Tanah Datar. Tanah Datar pada tahun 2005 berhasil membukukan nilai produksi batuan kapur sebesar Rp. 123 juta hanya untuk satu kabupaten.

Sawahlunto pernah menjadi tulang punggung perekonomian Sumatera Barat dengan spesifikasi batu bara. Kondisi topografi Sawahlunto yang terdiri dari perbukitan yang terjal mendukung untuk dikembangkannya areal pertambangan batu bara.

Dari seluruh penggunaan tanah di Sawahlunto, sebenarnya areal pertambangan hanya memanfaatkan sebesar 3,25 persen, dan terluas adalah penggunaan untuk pertanian. Namun, dengan areal yang sedikit tersebut mampu memiliki cadangan yang siap diproduksi sebesar 53.176 juta ton batu bara, yang dihasilkan dari empat blok pertambangan, telah melampaui kebutuhan domestik Sumatera Barat sendiri yang berkisar pada angka 1,3 juta ton/tahun. Kondisi ini memberikan implikasi masih kurangnya investasi di bidang pertambangan di Sawahlunto untuk meningkatkan hasil produksi batu baranya.

Data BPS menunjukkan rata-rata nilai produksi batu bara Sumatera Barat mencapai nilai 212 milyar rupiah, dengan kondisi masih jauh dibawah potensial daerah. Oleh karena itu, masih besar potensi pertambangan yang harus dieksplorasi di Sumatera Barat.

Keindahan alam dan budaya Minangkabau di propinsi Sumatera Barat sudah terkenal dan mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai objek pariwisata. Umumnya tiap kabupaten dan kota di Sumatera Barat mempunyai obyek pariwisata minimal satu kategori yang potensi untuk dijadikan daerah tujuan wisata alam dan budaya.

Kategori dari obyek pariwisata ini dapat berupa obyek pemandangan alam dari pantai seperti Teluk Bayur, wilayah pegunungan yang sangat mempesona, danau, ngarai dan lembah atau obyek kebudayaan.

Tujuan wisata budaya di Sumatera Barat mempunyai prospek yang tinggi untuk dikembangkan, dimana kekayaan budaya Minangkabau seperti rumah Gadang maupun kebudayaan suku Mentawai termasuk salah satu yang unik di nusantara dan dapat menjadi salah satu daerah tujuan wisata yang menarik untuk dikunjungi.

Provinsi Sumatera Barat memiliki berbagai jenis daerah dan tempat wisata antara lain : Danau Singkarak (terbesar di Sumatera Barat), Danau Maninjau, Danau Kembar, Ngarai Sianok, Lembah Anai, Lembah Harau maupun pulau Cubadak.

Di sektor pariwisata, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, di Sumatera Barat telah ditetapkan 2 Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) yaitu DPN Mentawai Mentawai-Siberut dan Sekitarnya dan DPN Padang-Bukittinggi dan Sekitarnya. Dari 2

DPN tersebut telah ditetapkan 10 Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) yaitu :

1. KPPN Siberut dan sekitarnya.
2. KPPN Sipora dan sekitarnya.
3. KPPN Pagai Utara dan sekitarnya.
4. KPPN Padang dan sekitarnya.
5. KPPN Bukittinggi dan sekitarnya.
6. KPPN Singkarak dan sekitarnya.
7. KPPN Batusangkar dan sekitarnya.
8. KPPN Maninjau dan sekitarnya.
9. KPPN Sawahlunto dan sekitarnya.
10. KPPN Pesisir Selatan dan sekitarnya.

Dengan telah ditetapkannya secara normatif potensi yang dimiliki Sumatera Barat di bidang kepariwisataan oleh Pemerintah Pusat, maka kedepan arah pengembangan kepariwisataan oleh Pemerintah Daerah akan semakin jelas. Kekhasan wilayah geografi dan bentuk topografi, mulai dari daerah pesisir pantai, pulau-pulau, sampai dengan daerah dataran tinggi, pegunungan, danau dan sungai menjadi potensi pengembangan pariwisata Sumatera Barat.

Keunikan wilayah Sumatera Barat didukung pula oleh iklim tropis sebagai daerah perlintasan garis khatulistiwa. Keindahan alami hutan tropis dan keelokan pemandangan jajaran perbukitan, sawah dan ladang di sepanjang jalan yang menghubungkan antar daerah dan wilayah Sumatera Barat telah didukung dengan sarana prasarana jalan dan transportasi yang memadai, menjadi bagian dari potensi pengembangan pariwisata.

Penduduk Sumatera Barat yang ramah, religius dan terbuka menganut nilai-nilai matriakat yang berbeda dengan masyarakat daerah lainnya di Indonesia yang menganut sistim patriakat. Keunikan lokal seperti

ini dan hal lainnya yang terkait budaya, kesenian, kearifan lokal, kuliner dan peran sejarah dalam kemerdekaan RI telah memperkaya potensi wisata Sumatera Barat. Dengan beragamnya objek dan tujuan wisata yang dapat dikunjungi serta dinikmati di Sumatera Barat, maka pariwisata berpotensi sebagai lokomotif dalam percepatan pembangunan daerah.

Berdasarkan Data BPS, jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke Sumatera Barat melalui Bandara Internasional Minangkabau (BIM) dan Pelabuhan Teluk Bayur bulan Desember 2017 mencapai 8.568 orang, mengalami peningkatan 85,37 persen dibanding wisman November 2017 yang tercatat sebanyak 4.622 orang.

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Sumatera Barat bulan Desember 2017 mencapai rata-rata 64,89 persen; mengalami penurunan 0,16 poin dibanding TPK bulan November 2017 sebesar 65,05 persen.

BAB III

SUMBER DATA DAN KOMPONEN KEPENDUDUKAN

A. SUMBER DATA

Hasil dari pemanfaatan database kependudukan pada dasarnya mencakup struktur umur, komposisi dan persebaran penduduk. Dari struktur umur dapat diturunkan (dihitung) berbagai indikator seperti umur median (*median age*), rasio jenis kelamin (*sex ratio*), piramida penduduk, rasio ketergantungan (*dependency ratio*), dan indikator lainnya. Dari komposisi penduduk, database kependudukan dapat memberikan informasi dari aspek sosial seperti pendidikan, status perkawinan, agama dan status hubungan dalam rumah tangga. Sedangkan dari aspek penyebaran penduduk memperlihatkan bagaimana distribusi penduduk menurut Kabupaten/Kota.

Adapun database kependudukan yang telah diolah ini bersumber dari database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang terintegrasi dengan database e-KTP dan telah dibersihkan (dikonsolidasikan) secara nasional oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk posisi per 31 Desember 2017 dan data yang berasal dari OPD teknis (lintas sektor) terkait yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Dinas Sosial.

Publikasi informasi perkembangan kependudukan berupa jumlah penduduk, struktur dan komposisi penduduk, distribusi dan kepadatan penduduk. Komposisi penduduk dapat berupa data kuantitas penduduk mencakup bidang kependudukan, pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial dan administrasi kependudukan dilakukan secara periodik untuk memberikan informasi pada stakeholder disetiap level pemerintahan.

B. KOMPONEN KEPENDUDUKAN

1. Kuantitas Penduduk

Komposisi dan Persebaran Penduduk

Bagian ini menjelaskan mengenai komposisi dan persebaran (distribusi) penduduk dilihat dari berbagai aspek atau karakteristik.

Penduduk dapat dikelompokkan menurut karakteristik tertentu, seperti kelompok umur, karakteristik sosial ekonomi, dan persebaran atau distribusi tempat tinggalnya.

Pengelompokan ini sangat berguna untuk :

- Mengetahui jumlah sumber daya manusia yang ada menurut umur, jenis kelamin maupun karakteristik lainnya.
- Mengembangkan suatu kebijakan yang berhubungan dengan pembangunan berwawasan kependudukan.
- Menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitas yang diperlukan.
- Membandingkan keadaan suatu penduduk dengan keadaan penduduk lainnya.
- Mengetahui “proses demografi” yang telah terjadi pada penduduk melalui piramida penduduk.

Komposisi penduduk berdasarkan ciri-ciri atau karakteristik tertentu dapat diklasifikasikan menurut :

- Karakteristik demografi, seperti umur, jenis kelamin, jumlah wanita usia subur, dan jumlah anak.
- Karakteristik sosial, antara lain tingkat pendidikan dan status perkawinan.
- Karakteristik ekonomi, antara lain kegiatan penduduk yang aktif secara ekonomi, lapangan usaha, status dan jenis pekerjaan, serta tingkat pendapatan.

- Karakteristik geografis atau persebaran, antara lain berdasarkan tempat tinggal, daerah perkotaan-pedesaan, kecamatan, provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Sedangkan persebaran (distribusi) penduduk adalah kondisi sebaran penduduk menurut keruangan. Sementara itu, penyebaran adalah upaya mengubah persebaran penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Persebaran penduduk (distribusi penduduk) dibedakan menjadi dua, yaitu :

- Persebaran penduduk secara geografis.
- Persebaran penduduk berdasarkan administrasi pemerintahan.

a. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Demografi

Karakteristik penduduk sangat berpengaruh terhadap proses demografi dan tingkah laku sosial ekonomi. Karakteristik penduduk yang paling penting adalah umur dan jenis kelamin. Distribusi penduduk menurut umur dikelompokkan menurut umur satu tahunan atau umur tunggal (*single age*) dan lima tahunan, namun dapat juga dikelompokkan menurut distribusi umur tertentu sesuai dengan kebutuhan, seperti pengelompokan penduduk menurut usia sekolah (SD = 7-12 tahun; SLTP = 13-15 tahun; SLTA = 16-18 tahun; dan Perguruan Tinggi = 19-24 tahun).

Selain pengelompokan berdasarkan distribusi umur penduduk, terdapat juga pengelompokan penduduk berdasarkan struktur umur penduduk yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok besar, yaitu :

- Penduduk usia muda, yaitu penduduk usia dibawah 15 tahun atau kelompok umur 0-14 tahun.

- Penduduk usia produktif, yaitu penduduk umur 15-59 tahun.
- Penduduk usia lanjut, yaitu penduduk umur 60 tahun keatas (mengikuti ketentuan WHO).

Struktur penduduk menurut umur dapat digunakan untuk mengetahui apakah penduduk di suatu wilayah termasuk kelompok umur muda atau tua. Penduduk suatu wilayah dianggap penduduk muda apabila jumlah penduduk yang berumur dibawah 15 tahun mencapai sebesar 40 persen atau lebih.

Suatu daerah yang mempunyai karakteristik penduduk muda membutuhkan investasi sosial ekonomi yang berbeda dengan investasi untuk kelompok penduduk tua. Kelompok penduduk muda membutuhkan fasilitas pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sandang dan lain sebagainya. Sementara kelompok penduduk tua tidak membutuhkan fasilitas pendidikan, tetapi fasilitas untuk ketenagakerjaan, kesehatan, kebutuhan sosial lainnya dan lain sebagainya.

Indikator yang menunjukkan komposisi penduduk menurut karakteristik demografi adalah :

- Umur Median (*Median Age*)
- Rasio Jenis Kelamin (*sex ratio*)
- Rasio Ketergantungan atau Rasio Beban Tanggungan (*dependency ratio*)

1) *Jumlah Penduduk*

Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan mengurangi jumlah penduduk di suatu wilayah, dimana pertumbuhan penduduk tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah dan

migrasi neto. Secara terus menerus jumlah penduduk akan dipengaruhi oleh banyaknya bayi yang lahir (menambah jumlah penduduk), tetapi disisi lain akan dikurangi oleh jumlah kematian yang terjadi pada semua kelompok umur. Sementara itu migrasi juga berperan dalam mempengaruhi jumlah dimana penduduk imigran (pendatang) akan menambah dan emigran (penduduk yang keluar) akan mengurangi jumlah penduduk. Jadi, pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh tiga komponen demografi, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi (masuk/*inmigration* dan keluar/*outmigration*). Selisih antara fertilitas dan mortalitas disebut perubahan reproduktif (*reproductive change*) atau pertumbuhan alamiah (*natural growth*), sedangkan selisih antara migrasi masuk dan migrasi keluar disebut migrasi neto (*net migration*).

Namun, dengan telah berjalannya sistem registrasi penduduk melalui pelayanan pendaftaran penduduk, maka data jumlah penduduk dapat diketahui secara langsung dari database kependudukan pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan telah dibersihkan (dikonsolidasikan) oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri setiap 6 (enam) bulan sekali dan menjadi Data Konsolidasi Bersih (DKB).

Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Barat menurut Wilayah dan Jenis Kelamin per 31 Desember 2017 dapat dilihat pada Tabel 3 dibawah ini :

Tabel 3.
Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Barat menurut Wilayah
Dan Jenis Kelamin per 31 Desember 2017

Kode Wilayah	Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin (Jiwa)					
		Laki-Laki	%	Perempuan	%	Total	%
1301	Kabupaten Pesisir Selatan	263.870	9,46	255.652	9,39	519.522	9,43
1302	Kabupaten Solok	191.256	6,86	186.036	6,84	377.292	6,85
1303	Kabupaten Sijunjung	119.075	4,27	115.840	4,26	234.915	4,26
1304	Kabupaten Tanah Datar	184.306	6,61	183.448	6,74	367.754	6,67
1305	Kabupaten Padang Pariaman	236.179	8,47	228.381	8,39	464.560	8,43
1306	Kabupaten Agam	265.949	9,53	260.892	9,59	526.841	9,56
1307	Kabupaten Lima Puluh Kota	187.981	6,74	187.497	6,89	375.478	6,81
1308	Kabupaten Pasaman	159.867	5,73	156.753	5,76	316.620	5,74
1309	Kabupaten Kepulauan Mentawai	44.691	1,60	40.978	1,51	85.669	1,55
1310	Kabupaten Dharmasraya	105.915	3,80	101.968	3,75	207.883	3,77
1311	Kabupaten Solok Selatan	91.482	3,28	87.205	3,20	178.687	3,24
1312	Kabupaten Pasaman Barat	218.730	7,84	211.174	7,76	429.904	7,80
1371	Kota Padang	448.894	16,09	438.781	16,12	887.675	16,11
1372	Kota Solok	36.087	1,29	35.636	1,31	71.723	1,30
1373	Kota Sawahlunto	32.617	1,17	32.425	1,19	65.042	1,18
1374	Kota Padang Panjang	28.568	1,02	27.994	1,03	56.562	1,03
1375	Kota Bukittinggi	59.810	2,14	59.373	2,18	119.183	2,16
1376	Kota Payakumbuh	68.236	2,45	66.973	2,46	135.209	2,45
1377	Kota Pariaman	45.964	1,65	44.763	1,64	90.727	1,65
	SUMATERA BARAT	2.789.477	100,00	2.721.769	100,00	5.511.246	100,00

Sumber : Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester II Tahun 2017 (diolah)

Jika diperhatikan menurut jenis kelamin, nampak bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan dan gambaran ini terlihat pada semua Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

2) *Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin*

Informasi tentang jumlah penduduk menurut jenis kelamin, penting diketahui terutama untuk mengetahui banyaknya orang yang tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu. Selain itu, jumlah dan proporsi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat digunakan untuk merencanakan pelayanan sosial

ekonomi seperti pendidikan, kesehatan, sandang, pangan dan papan serta kebutuhan sosial dasar lainnya sesuai kelompok umur penduduk. Informasi jumlah dan proporsi umur penduduk dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik atau piramida penduduk, sehingga memudahkan untuk menginterpretasikan informasi tersebut.

Distribusi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat disajikan dalam bentuk tabel menurut umur tunggal, kelompok umur lima tahunan atau kelompok umur yang sesuai dengan kebutuhan seperti pengelompokan umur usia sekolah.

Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat menurut kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 4, yang menunjukkan bahwa penduduk Provinsi Sumatera Barat kondisi per 31 Desember 2017 sebagian besar merupakan penduduk usia produktif yaitu pada kelompok umur antara 15-64 tahun dengan komposisi terbesar berada pada penduduk berumur 15-19 tahun. Demikian pula dengan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, nampak bahwa penduduk laki-laki yang terbesar berada pada kelompok umur 10-14 tahun, sedangkan penduduk perempuan berada pada kelompok umur 15-19 tahun. Kondisi ini sangat menguntungkan karena sebagian besar (diatas 50 persen) yaitu sebesar 68,45 persen merupakan penduduk usia kerja (usia produktif), dan sisanya sebanyak 24,47 persen merupakan penduduk usia muda (berusia dibawah 15 tahun) dan 7,08 persen merupakan penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas).

Tabel 4.
Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Barat menurut Kelompok Umur
Dan Jenis Kelamin Per 31 Desember 2017

KELOMPOK UMUR	JENIS KELAMIN (JIWA)				TOTAL (JIWA)	
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN			
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
00-04	175.617	6,30	162.611	5,97	338.228	6,14
05-09	263.073	9,43	244.777	8,99	507.850	9,21
10-14	278.099	9,97	258.616	9,50	536.715	9,74
15-19	277.032	9,93	259.731	9,54	536.763	9,74
20-24	257.804	9,24	242.574	8,91	500.378	9,08
25-29	219.824	7,88	205.830	7,56	425.654	7,72
30-34	229.754	8,24	214.138	7,87	443.892	8,05
35-39	218.093	7,82	202.039	7,42	420.132	7,62
40-44	188.646	6,76	185.758	6,82	374.404	6,79
45-49	164.375	5,89	165.060	6,06	329.435	5,98
50-54	137.772	4,94	146.308	5,38	284.080	5,15
55-59	125.293	4,49	132.578	4,87	257.871	4,68
60-64	101.019	3,62	109.165	4,01	210.184	3,81
65-69	66.353	2,38	68.724	2,52	135.077	2,45
70-74	35.465	1,27	47.175	1,73	82.640	1,50
> 75	51.258	1,84	76.685	2,82	127.943	2,32
JUMLAH	2.789.477	100,00	2.721.769	100,00	5.511.246	100,00

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2017 (diolah)

Penduduk berusia kurang dari 15 tahun cukup besar pula yaitu seperempat penduduk Provinsi Sumatera Barat berjumlah 1.382.793 jiwa (24,47 persen). Hal ini harus menjadi perhatian karena 5 tahun mendatang kelompok ini akan menjadi entry tenaga kerja baru, yang memerlukan skill dan kualitas SDM yang memadai baik keterampilan maupun etos kerja dan kepribadian. Untuk memperoleh hal tersebut, diperlukan asupan gizi yang cukup, pendidikan yang memadai serta lingkungan pergaulan yang positif, baik di rumah maupun di masyarakat sehingga ketika mereka memasuki pasar kerja,

mampu bersaing memperoleh peluang kerja yang tersedia. Disisi lain diharapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus mampu pula menciptakan lapangan pekerjaan yang dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi.

Jika dicermati lebih lanjut, ternyata 338.228 jiwa (6,14 persen) penduduk Provinsi Sumatera Barat kondisi per 31 Desember 2017 merupakan balita. Kondisi ini juga menuntut perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam penanganan penduduk balita terutama dari segi kesehatan dan investasi bidang pendidikan.

a) Umur Median (*Median Age*)

Umur median adalah umur yang membagi penduduk menjadi dua bagian dengan jumlah yang sama, yaitu bagian yang pertama lebih muda dan bagian yang kedua lebih tua dari umur median. Kegunaan dari umur median adalah untuk mengukur tingkat pemusatan penduduk pada kelompok-kelompok umur tertentu.

Berdasarkan umur median ini, penduduk di suatu daerah dikategorikan :

- Penduduk muda, jika umur median kurang dari 20 tahun.
- Penduduk intermediate, jika umur median antara 20-30 tahun.
- Penduduk tua, jika umur median lebih dari 30 tahun.

Berdasarkan Tabel 5, dapat dihitung umur median (*median age*) di Provinsi Sumatera Barat yaitu sebagai berikut :

$$\text{Umur Median (Md)} = I_{Md} + \left(\frac{\frac{N}{2} - f_x}{f_{Md}} \times i \right)$$

$$\begin{aligned}\text{Umur Median (Md)} &= 25 + \left(\frac{2.755.623 - 2.419.934}{425.654} \times 5 \right) \\ \text{Umur Median (Md)} &= 25 + 3,94 \\ \text{Umur Median (Md)} &= \mathbf{28,94 \text{ tahun}}\end{aligned}$$

Keterangan :

- I_{Md} = Batas bawah kelompok umur yang mengandung $N/2$
 N = Jumlah penduduk total
 f_x = Jumlah penduduk kumulatif sampai dengan kelompok umur yang mengandung $N/2$
 f_{Md} = Jumlah penduduk pada kelompok umur dimana terdapat nilai $N/2$
 i = Kelas interval umur

Tabel 5.
Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2017

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk	Kumulatif (fx)	% Kumulatif
00-04	338.228	338.228	6,14
05-09	507.850	846.078	15,35
10-14	536.715	1.382.793	25,09
15-19	536.763	1.919.556	34,83
20-24	500.378	2.419.934	43,91
25-29	425.654	2.845.588	51,63
30-34	443.892	3.289.480	59,69
35-39	420.132	3.709.612	67,31
40-44	374.404	4.084.016	74,10
45-49	329.435	4.413.451	80,08
50-54	284.080	4.697.531	85,24
55-59	257.871	4.955.402	89,91
60-64	210.184	5.165.586	93,73
65-69	135.077	5.300.663	96,18
70-74	82.640	5.383.303	97,68
> 75	127.943	5.511.246	100,00
JUMLAH	5.511.246		

Sumber : DKB Semester II 2017 (diolah)

Dengan demikian, umur median penduduk Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017 adalah 28,94 tahun, yang berarti setengah penduduk Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017 berusia dibawah 28,94 tahun dan setengahnya lagi berusia lebih tua dari 28,94 tahun. Umur median ini terletak diantara 20-30 tahun. Dengan kata lain, penduduk Provinsi Sumatera Barat dikategorikan sebagai penduduk *intermediate* yaitu transisi dari muda (*young population*) ke penduduk tua (*old population*).

b) Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*)

Rasio Jenis Kelamin (RJK) adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki dan banyaknya jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan.

Besar kecilnya rasio jenis kelamin ini dipengaruhi oleh :

- Rasio jenis kelamin waktu lahir (*sex ratio at birth*), biasanya perbandingan antara bayi laki-laki dan perempuan pada waktu lahir berkisar antara 103-105 bayi laki-laki per 100 bayi perempuan.
- Pola mortalitas antara penduduk laki-laki dan perempuan.
- Pola migrasi antara penduduk laki-laki dan perempuan.

Informasi tentang rasio jenis kelamin dapat disajikan menurut kelompok umur maupun wilayah dalam bentuk tabel maupun grafik. Informasi ini dapat berguna untuk perencanaan pembangunan berwawasan gender, terutama

yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Selain itu, informasi rasio jenis kelamin juga penting diketahui oleh para politisi, terutama untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen.

Rasio jenis kelamin berdasarkan wilayah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017 dan rasio jenis kelamin berdasarkan kelompok umur Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017 tersaji pada Tabel 6 dan Tabel 7 berikut ini :

Tabel 6.
Rasio Jenis Kelamin Menurut Wilayah Provinsi Sumatera Barat
Per 31 Desember 2017

No	Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin (Jiwa)		Total (Jiwa)	Sex Ratio
		Laki-Laki	Perempuan		
1	Kabupaten Pesisir Selatan	263.870	255.652	519.522	103,21
2	Kabupaten Solok	191.256	186.036	377.292	102,81
3	Kabupaten Sijunjung	119.075	115.840	234.915	102,79
4	Kabupaten Tanah Datar	184.306	183.448	367.754	100,47
5	Kabupaten Padang Pariaman	236.179	228.381	464.560	103,41
6	Kabupaten Agam	265.949	260.892	526.841	101,94
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	187.981	187.497	375.478	100,26
8	Kabupaten Pasaman	159.867	156.753	316.620	101,99
9	Kabupaten Kep. Mentawai	44.691	40.978	85.669	109,06
10	Kabupaten Dharmasraya	105.915	101.968	207.883	103,87
11	Kabupaten Solok Selatan	91.482	87.205	178.687	104,90
12	Kabupaten Pasaman Barat	218.730	211.174	429.904	103,58
13	Kota Padang	448.894	438.781	887.675	102,30
14	Kota Solok	36.087	35.636	71.723	101,27
15	Kota Sawahlunto	32.617	32.425	65.042	100,59
16	Kota Padang Panjang	28.568	27.994	56.562	102,05
17	Kota Bukittinggi	59.810	59.373	119.183	100,74
18	Kota Payakumbuh	68.236	66.973	135.209	101,89
19	Kota Pariaman	45.964	44.763	90.727	102,68
	SUMATERA BARAT	2.789.477	2.721.769	5.511.246	102,49

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2017 (diolah)

Tabel 7.
Rasio Jenis Kelamin Menurut Kelompok Umur
Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2017

Kelompok Umur	Jenis Kelamin (Jiwa)		Total (Jiwa)	Sex Ratio
	Laki-Laki	Perempuan		
00-04	175.617	162.611	338.228	108,00
05-09	263.073	244.777	507.850	107,47
10-14	278.099	258.616	536.715	107,53
15-19	277.032	259.731	536.763	106,66
20-24	257.804	242.574	500.378	106,28
25-29	219.824	205.830	425.654	106,80
30-34	229.754	214.138	443.892	107,29
35-39	218.093	202.039	420.132	107,95
40-44	188.646	185.758	374.404	101,55
45-49	164.375	165.060	329.435	99,58
50-54	137.772	146.308	284.080	94,17
55-59	125.293	132.578	257.871	94,51
60-64	101.019	109.165	210.184	92,54
65-69	66.353	68.724	135.077	96,55
70-74	35.465	47.175	82.640	75,18
> 75	51.258	76.685	127.943	66,84
JUMLAH	2.789.477	2.721.769	5.511.246	102,49

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2017 (diolah)

Dari Tabel 6 dan Tabel 7 nampak bahwa Rasio Jenis Kelamin (RJK) atau *Sex Ratio* di Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017 adalah 102,49 yang berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 100-103 orang penduduk laki-laki. Namun demikian, jika dilihat dari kelompok umur menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan cenderung lebih besar berada pada kelompok umur 45 tahun ke atas. Hal ini diduga disebabkan penduduk laki-laki lebih banyak yang bermigrasi dibandingkan dengan penduduk perempuannya. Sedangkan jika dilihat

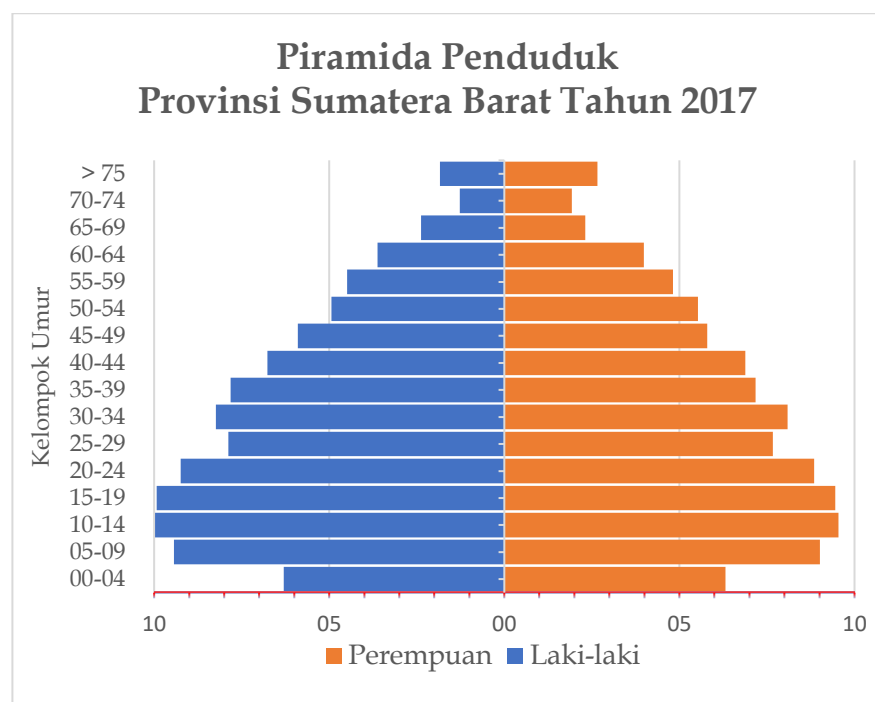
pada kelompok umur 0-4 tahun sebesar 108,00 yang artinya terdapat 108 balita berjenis kelamin laki-laki dari 100 balita perempuan. Secara biologis jumlah kelahiran bayi laki-laki pada umumnya lebih besar dibanding dengan kelahiran bayi perempuan, namun bayi laki-laki lebih rentan terhadap kematian dibanding bayi perempuan. Rasio jenis kelamin pada kelompok umur diatas 60 tahun juga menunjukkan penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Ini menunjukkan bahwa teori yang mengatakan bahwa umur harapan hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki adalah benar, karena secara biologis umur harapan hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki.

c) Piramida Penduduk

Piramida penduduk menunjukkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang disajikan secara grafik. Sumbu horizontal (dasar piramida penduduk) menunjukkan jumlah penduduk dapat menggunakan jumlah absolut atau persentase. Sumbu vertikal menunjukkan umur, baik menurut kelompok umur satu tahunan maupun lima tahunan. Dasar piramida dimulai dengan kelompok umur termuda dan dilanjutkan ke atas untuk kelompok umur yang lebih tua dan biasanya puncak piramida untuk kelompok umur yang lebih tua sering dibuat dengan sistem umur terbuka (75+) dan bagian kiri piramida digunakan untuk mewakili penduduk laki-laki serta bagian kanan untuk penduduk perempuan.

Piramida penduduk merupakan refleksi struktur umur penduduk menurut jenis kelamin dimana bentuknya ditentukan oleh kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), dan perpindahan penduduk (mobilitas).

Piramida Penduduk Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2017 dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah ini :



Gambar 2. Piramida Penduduk Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

Menurut bentuknya, piramida penduduk Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017 dinamakan “Piramida penduduk dengan bentuk “kendi”. Piramida bentuk ini biasa terdapat pada daerah/negara yang mengalami penurunan tingkat kelahiran secara drastis dengan tingkat kematian bayi yang semakin menurun.

Sedangkan berdasarkan cirinya, Piramida Penduduk Sumatera Barat per 31 Desember 2017 dinamakan Konstriktif (*Constrictive*), dimana bagian dasar piramida kecil dan sebagian besar penduduk masih berada dalam kelompok umur muda.

Piramida penduduk ini dapat digunakan untuk membuat perencanaan pembangunan dengan memperhatikan umur dan jenis kelamin secara cepat dan juga berguna untuk evaluasi data kependudukan yang dikumpulkan. Piramida yang disajikan dari periode-periode yang lain dapat menunjukkan perkembangan dan kecenderungan penduduk di masa lalu, saat ini dan masa yang akan datang. Dengan melihat gambar piramida penduduk, kita dapat mengetahui struktur umur penduduk dan implikasinya terhadap tuntutan penyediaan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kebutuhan dasar penduduk (baik balita, remaja, dewasa, laki-laki, perempuan dan lansia) sekaligus melihat potensi tenaga kerja serta membayangkan kebutuhan akan tambahan kesempatan kerja yang harus diciptakan.

Berdasarkan Piramida Penduduk Sumatera Barat per 31 Desember 2017, dapat dilihat bahwa struktur umur penduduk Sumatera Barat saat ini didominasi oleh penduduk usia muda, terutama penduduk pada usia 10-14 tahun, sehingga penyediaan pelayanan pendidikan agar dapat lebih ditingkatkan. Komposisi ini juga menunjukkan bahwa kedepan nanti, penduduk Sumatera Barat sedang mengarah pada struktur penduduk usia produktif sehingga

perlu disiapkan ketersediaan atas tambahan kesempatan kerja yang harus diciptakan.

Pada piramida ini juga terlihat bahwa jumlah penduduk kelompok umur 0-4 tahun yang terletak pada dasar piramida mulai mengecil. Ini berarti angka kelahiran mulai menurun. Demikian juga dengan jumlah penduduk 5-9 tahun masih terlihat lebar, berarti lima tahun ke depan dibutuhkan fasilitas pendidikan dasar dan menengah yang cukup untuk menampung penduduk kelompok ini.

Penduduk lansia (65 tahun ke atas), menunjukkan proporsi yang masih kecil yaitu 7,08 persen kondisi per 31 Desember 2017. Namun dimasa depan proporsi penduduk lansia akan terus merambat naik, karena pergeseran umur penduduk serta usia harapan hidup yang semakin meningkat. Pertambahan jumlah penduduk lansia ini harus mulai diantisipasi dari sekarang, karena kelompok ini akan terus membesar di masa depan, sehingga diperlukan kebijakan seperti ketenagakerjaan, kesehatan, pelayanan lansia serta kebutuhan sosial dasar lainnya.

d) Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*)

Rasio ketergantungan menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk produktif (15-64 tahun) terhadap penduduk tidak produktif (< 15 tahun dan 65 tahun ke atas). Semakin tinggi persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Demikian pula penduduk berusia 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Rasio ketergantungan ini merupakan indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah. Rasio ketergantungan atau rasio beban tanggungan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017 dapat dilihat pada Tabel 8, di bawah ini :

Tabel 8.
Rasio Ketergantungan Menurut Kelompok Umur
Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2017

Kelompok Umur	Jenis Kelamin (Jiwa)		Total (Jiwa)	% Total	Dependency Ratio
	Laki-Laki	Perempuan			
0-14 tahun (Umur Muda)	716.789	666.004	1.382.793	24,47	36,55
15-64 tahun (Umur Produktif)	1.919.612	1.863.181	3.782.793	68,45	100,00
> 65 tahun (Umur Tua)	153.076	192.584	345.660	7,08	9,14
JUMLAH	2.789.477	2.721.769	5.511.246	100,00	

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2017 (diolah)

Dari tabel 8 di atas diketahui bahwa rasio ketergantungan total Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017 adalah sebesar 45,69 persen, artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif (usia kerja) mempunyai beban tanggungan sebanyak 45 sampai 46 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan sebesar 45,69 persen ini terdiri dari rasio penduduk muda sebesar 36,55 persen dan rasio penduduk tua sebesar 9,14 persen.

Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan kesempatan kerja, kualitas penduduk dan tetap mempertahankan laju pertumbuhan penduduk yang rendah.

3) *Rasio Kepadatan Penduduk (Population Density Ratio)*

Kepadatan penduduk merupakan kondisi yang mengalami perubahan dari tahun ke tahun karena perubahan jumlah penduduk di satu wilayah/area, baik secara alami maupun karena perpindahan penduduk dari daerah satu ke daerah lainnya. Indikator kepadatan penduduk berguna untuk melihat kerapatan jumlah penduduk dalam satu satuan keruangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 56/PRP/1960, ada 4 (empat) klasifikasi kepadatan penduduk yaitu tidak padat, dengan tingkat kepadatan 1-50 jiwa per kilometer persegi, kurang padat dengan tingkat kepadatan 51-250 jiwa per kilometer persegi, cukup padat dengan tingkat kepadatan 251-400 jiwa per kilometer persegi dan sangat padat dengan tingkat kepadatan lebih besar dari 401 jiwa/kilometer persegi.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Provinsi Sumatera Barat tergolong provinsi yang kurang padat,

hal ini dapat dilihat pada Tabel 9 di bawah ini. Tabel 9 memperlihatkan rasio kepadatan penduduk di Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017. Dengan luas 42.125 kilometer persegi, Provinsi Sumatera Barat didiami oleh penduduk sebesar 5.511.246 jiwa atau dengan kepadatan sebesar 130,83 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2017. Dengan kata lain rata-rata setiap kilometer persegi Provinsi Sumatera Barat didiami sebanyak 130 sampai dengan 131 jiwa.

Tabel 9.
Rasio Kepadatan Penduduk Provinsi Sumatera Barat
Per 31 Desember 2017

No	Kabupaten/Kota	Penduduk (Jiwa)	LUAS WILAYAH (Km ²)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
1	Kabupaten Pesisir Selatan	519.522	6.106	85,08
2	Kabupaten Solok	377.292	3.247	116,20
3	Kabupaten Sijunjung	234.915	3.068	76,57
4	Kabupaten Tanah Datar	367.754	1.315	279,66
5	Kabupaten Padang Pariaman	464.560	1.354	343,10
6	Kabupaten Agam	526.841	2.238	235,41
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	375.478	3.324	112,96
8	Kabupaten Pasaman	316.620	3.936	80,44
9	Kabupaten Kepulauan Mentawai	85.669	5.998	14,28
10	Kabupaten Dharmasraya	207.883	3.018	68,88
11	Kabupaten Solok Selatan	178.687	3.612	49,47
12	Kabupaten Pasaman Barat	429.904	3.738	115,01
13	Kota Padang	887.675	686	1.293,99
14	Kota Solok	71.723	61	1.175,79
15	Kota Sawahlunto	65.042	239	272,14
16	Kota Padang Panjang	56.562	21	2.693,43
17	Kota Bukittinggi	119.183	24	4.965,96
18	Kota Payakumbuh	135.209	75	1.802,79
19	Kota Pariaman	90.727	65	1.395,80
	SUMATERA BARAT	5.511.246	42.125	130,83

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2017 (diolah)

Dari Tabel 9 juga terlihat bahwa rasio kepadatan penduduk tertinggi di Provinsi Sumatera Barat berada di Kota Bukittinggi dengan luas wilayah hanya 24 kilometer persegi didiami oleh penduduk sebanyak 119.183 jiwa dan rasio kepadatan penduduk terendah berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan luas wilayah 5.998 kilometer persegi didiami oleh penduduk hanya sebanyak 85.669 jiwa.

4) *Angka Pertumbuhan Penduduk*

Angka pertumbuhan penduduk merupakan angka yang menggambarkan penambahan penduduk yang dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah maupun migrasi penduduk. Indikator laju pertumbuhan penduduk berguna untuk melihat kecenderungan dan memproyeksikan jumlah penduduk di masa depan.

Angka Pertumbuhan penduduk Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 disajikan pada Tabel 10, dimana dapat dilihat angka pertumbuhan penduduk Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2016 ke tahun 2017 termasuk rendah, karena hanya bertambah sebesar 1,08 persen. Angka pertumbuhan penduduk ini dihitung berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) hasil pembersihan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang telah diintegrasikan dengan data hasil perekaman KTP Elektronik. Pertumbuhan Penduduk yang rendah ini sangat menguntungkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, karena apabila pertumbuhan penduduk tidak terkendali, maka implikasi dari hal tersebut adalah munculnya berbagai masalah sosial ekonomi seperti kemiskinan, pertumbuhan daerah kumuh, kriminalitas dan lain sebagainya.

Angka pertumbuhan penduduk di atas dipengaruhi oleh masih terdapatnya data ganda antar Kabupaten/Kota se-Indonesia yang terdeteksi oleh Tim Konsolidasi Data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sehingga banyak data ganda yang harus dihapus dari database kependudukan Kabupaten/Kota.

Tabel 10.
Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Pertumbuhan Penduduk
		2016	2017	
1	Kabupaten Pesisir Selatan	516.719	519.522	0,54
2	Kabupaten Solok	374.676	377.292	0,70
3	Kabupaten Sijunjung	232.749	234.915	0,93
4	Kabupaten Tanah Datar	365.040	367.754	0,74
5	Kabupaten Padang Pariaman	460.742	464.560	0,83
6	Kabupaten Agam	523.335	526.841	0,67
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	372.949	375.478	0,68
8	Kabupaten Pasaman	314.530	316.620	0,66
9	Kabupaten Kep. Mentawai	83.267	85.669	2,88
10	Kabupaten Dharmasraya	204.149	207.883	1,83
11	Kabupaten Solok Selatan	176.931	178.687	0,99
12	Kabupaten Pasaman Barat	427.358	429.904	0,60
13	Kota Padang	881.128	887.675	0,74
14	Kota Solok	67.942	71.723	5,57
15	Kota Sawahlunto	64.106	65.042	1,46
16	Kota Padang Panjang	52.935	56.562	6,85
17	Kota Bukittinggi	115.639	119.183	3,06
18	Kota Payakumbuh	129.362	135.209	4,52
19	Kota Pariaman	88.717	90.727	2,27
	SUMATERA BARAT	5.452.274	5.511.246	1,08

Sumber : DKB Semester II Tahun 2016 dan Semester II 2017 (diolah)

b. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Sosial

1) Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Bagian ini menggambarkan jumlah dan proporsi penduduk berdasarkan jenjang pendidikan terakhir yang ditamatkan di suatu provinsi pada waktu tertentu yang disajikan berdasarkan jenis kelamin dalam bentuk tabel.

Informasi tentang jumlah penduduk menurut pendidikan ini menunjukkan karakteristik penduduk berdasarkan jenjang pendidikan dan gambaran pencapaian pembangunan pendidikan di suatu Kabupaten/Kota.

Tingkat pendidikan merupakan salah satu ukuran untuk kualitas penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan semakin baik kualitas SDM di wilayah tersebut. Namun ukuran ini masih harus ditambah dengan etos kerja dan keterampilan baik *hard skill* maupun *soft skill*. Beberapa pelaku usaha menyatakan bahwa yang dibutuhkan tidak saja keterampilan tetapi juga kepribadian, karena keterampilan bisa ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan.

Tamat sekolah didefinisikan sebagai jenjang pendidikan yang telah berhasil diselesaikan oleh seseorang dengan dibuktikan adanya ijazah atau surat tanda tamat belajar. Tetapi jika menggunakan ukuran menurut jenjang tertinggi merupakan jenjang atau kelas tertinggi yang pernah ditempuh oleh seseorang maka tentunya hasilnya akan berbeda dengan definisi di atas. Namun demikian, dalam struktur database, ketepatan pelaporan atau kejujuran masyarakat juga sangat menentukan dalam pengklasifikasian distribusi penduduk menurut tingkat

pendidikan ini. Oleh sebab itu sangat diharapkan sekali masyarakat agar melaporkan data-data yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sehingga database yang terbentuk menjadi akurat dan berkualitas serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Tabel distribusi penduduk menurut pendidikan yang ditamatkan dan jenis kelamin Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017 dapat dilihat pada Tabel 11 berikut ini :

Tabel 11.
Distribusi Penduduk Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan
Dan Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Barat
Per 31 Desember 2017

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin (Jiwa)				Total (Jiwa)	
	Laki-laki		Perempuan			
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tidak/Belum Sekolah	595.173	21,34	563.398	20,70	1.158.571	21,02
Belum Tamat SD/Sederajat	477.939	17,13	449.747	16,52	927.686	16,83
Tamat SD/Sederajat	564.077	20,22	562.786	20,68	1.126.863	20,45
SLTP/Sederajat	427.877	15,34	387.604	14,24	815.481	14,80
SLTA/Sederajat	577.706	20,71	537.780	19,76	1.115.486	20,24
Diploma I/II	11.158	0,40	29.745	1,09	40.903	0,74
Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda	30.024	1,08	52.338	1,92	82.362	1,49
Diploma IV/ Strata I	96.157	3,45	130.682	4,80	226.839	4,12
Strata II	8.511	0,31	7.209	0,26	15.720	0,29
Strata III	855	0,03	480	0,02	1.335	0,02
JUMLAH	2.789.477	100,00	2.721.769	100,00	5.511.246	100,00

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2017 (diolah)

Dari Tabel 11 terlihat bahwa penduduk Provinsi Sumatera Barat kondisi per 31 Desember 2017 sebesar 20,24 persen berpendidikan SLTA/ sederajat. Persentase penduduk perempuan yang berpendidikan SLTA sedikit lebih rendah dibandingkan dengan penduduk laki-laki yang berpendidikan SLTA. Hal ini mencerminkan bahwa partisipasi penduduk perempuan untuk bersekolah lebih rendah dibandingkan penduduk laki-laki. Permintaan pasar tenaga kerja yang mensyaratkan minimal pendidikan SLTA, menyebabkan penduduk berusaha untuk mencapai jenjang pendidikan tersebut untuk bisa masuk ke pasar kerja non pertanian. Sedangkan persentase penduduk yang tamat SLTP untuk perempuan lebih rendah dibandingkan dengan persentase penduduk laki-laki. Pada jenjang pendidikan dasar, persentase penduduk yang tamat SD untuk penduduk perempuan juga lebih rendah dibandingkan dengan persentase penduduk laki-laki. Untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi, persentase penduduk perempuan yang tamat Diploma I/II, Akademi/Diploma III/Sarjana Muda, dan Diploma IV/Strata I lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Hanya untuk tingkat pendidikan Strata II dan Strata III, jumlah penduduk laki-laki yang menamatkannya lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk perempuan.

Ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender dalam mengenyam pendidikan telah berkembang dengan baik di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, dimana diharapkan tidak terjadi lagi kesenjangan pendidikan antara penduduk laki-laki dengan perempuan. Jika penduduk

perempuan mempunyai pendidikan yang tinggi tentunya ketergantungan terhadap laki-laki bisa sedikit ditekan dan tentunya keinginan untuk bertahan hidup akan semakin tinggi bagi penduduk perempuan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu memperhatikan kondisi diatas mengingat bahwa era globalisasi sebentar lagi akan berlangsung dan persaingan untuk memperoleh pekerjaan semakin ketat dimana warga negara asing pun bisa mencari pekerjaan ke Indonesia. Peningkatan pendidikan *vocasional*, akses ke pendidikan terutama untuk penduduk miskin, perlu dilakukan mengingat bahwa sebagian besar peluang kerja membutuhkan tenaga terdidik yang memiliki keterampilan khusus.

2) *Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan*

Bagian ini menggambarkan jumlah dan proporsi penduduk berdasarkan agama di suatu provinsi pada waktu tertentu yang disajikan per Kabupaten/Kota dalam bentuk tabel maupun gambar. Dari tabel dan gambar tersebut akan diketahui karakteristik penduduk berdasarkan pemeluk agama (Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, Khonghucu, dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa).

Informasi tentang jumlah penduduk berdasarkan agama ini diperlukan untuk merencanakan suatu program kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama. Dari Tabel 12 dapat dilihat bahwa penduduk Provinsi Sumatera Barat pada umumnya memeluk agama Islam sebanyak 97,64 persen, disusul kemudian pemeluk agama Kristen 1,46 persen, Katholik 0,83 persen. Sedangkan penganut agama Hindu hanya 106 orang (0

persen), Budha 3.717 orang (0,07 persen), Konghucu hanya 7 orang (0 persen), dan Kepercayaan sebanyak 238 orang (0 persen).

Jika dikaitkan dengan wilayah Kabupaten/Kota, sebagaimana terlihat pada Tabel 13, maka agama Islam mendominasi di 18 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Hanya Kabupaten Kepulauan Mentawai yang didominasi oleh agama Kristen dan Katholik. Agama kedua terbesar setelah Islam yang tersebar di setiap Kabupaten/Kota adalah agama Kristen. Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kota Padang merupakan wilayah dengan agama Kristen dan Katholik terbesar yaitu 42.776 jiwa penganut Kristen di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan 13.982 jiwa di Kota Padang. Penganut Katholik sebanyak 24.716 jiwa di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan 12.852 jiwa di Kota Padang. Selain itu, Kota Padang juga merupakan wilayah dengan penganut agama Hindu dan Budha terbesar di seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

Distribusi Penduduk menurut agama dan jenis kelamin Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017 dan distribusi penduduk menurut agama dan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017 dapat dilihat pada Tabel 12 dan Tabel 13 berikut ini :

Tabel 12.
Distribusi Penduduk Menurut Agama dan Jenis Kelamin
Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2017

Agama	Jenis Kelamin (Jiwa)				Total (Jiwa)	
	Laki-Laki		Perempuan			
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Islam	2.722.320	97,59	2.658.858	97,69	5.381.178	97,64
Kristen	41.952	1,50	38.552	1,42	80.504	1,46
Katholik	23.099	0,83	22.397	0,82	45.496	0,83
Hindu	56	0,00	50	0,00	106	0,00
Budha	1.921	0,07	1.796	0,07	3.717	0,07
Konghucu	4	0,00	3	0,00	7	0,00
Kepercayaan	125	0,00	113	0,00	238	0,00
JUMLAH	2.789.477	100,00	2.721.769	100,00	5.511.246	100,00

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2017 (diolah)

**PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

2017

No	Kabupaten/Kota	Agama (Jiwa)														Total (Jiwa)	
		Islam		Kristen		Katholik		Hindu		Budha		Konghucu		Kepercayaan			
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Kabupaten Pesisir Selatan	518.630	9,64	689	0,86	194	0,43	9	8,49	0	0,00	0	0,00	0	0,00	519.522	9,43
2	Kabupaten Solok	376.911	7,00	354	0,44	23	0,05	4	3,77	0	0,00	0	0,00	0	0,00	377.292	6,85
3	Kabupaten Sijunjung	233.687	4,34	911	1,13	301	0,66	7	6,60	2	0,05	0	0,00	7	2,94	234.915	4,26
4	Kabupaten Tanah Datar	367.250	6,82	365	0,45	116	0,25	0	0,00	23	0,62	0	0,00	0	0,00	367.754	6,67
5	Kabupaten Padang Pariaman	462.740	8,60	1.388	1,72	423	0,93	5	4,72	4	0,11	0	0,00	0	0,00	464.560	8,43
6	Kabupaten Agam	522.351	9,71	4.145	5,15	315	0,69	13	12,26	17	0,46	0	0,00	0	0,00	526.841	9,56
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	374.815	6,97	424	0,53	237	0,52	1	0,94	1	0,03	0	0,00	0	0,00	375.478	6,81
8	Kabupaten Pasaman	315.204	5,86	1.281	1,59	134	0,29	1	0,94	0	0,00	0	0,00	0	0,00	316.620	5,74
9	Kabupaten Kepulauan Mentawai	18.040	0,34	42.776	53,14	24.716	54,33	0	0,00	0	0,00	0	0,00	137	57,56	85.669	1,55
10	Kabupaten Dharmasraya	205.661	3,82	1.834	2,28	375	0,82	0	0,00	2	0,05	0	0,00	11	4,62	207.883	3,77
11	Kabupaten Solok Selatan	177.524	3,30	971	1,21	186	0,41	3	2,83	0	0,00	0	0,00	3	1,26	178.687	3,24
12	Kabupaten Pasaman Barat	419.567	7,80	7.370	9,15	2.933	6,45	3	2,83	6	0,16	0	0,00	25	10,50	429.904	7,80
13	Kota Padang	857.460	15,93	13.982	17,37	12.852	28,25	52	49,06	3.279	88,22	6	85,71	44	18,49	887.675	16,11
14	Kota Solok	70.964	1,32	489	0,61	262	0,58	1	0,94	7	0,19	0	0,00	0	0,00	71.723	1,30
15	Kota Sawahlunto	64.649	1,20	275	0,34	118	0,26	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	65.042	1,18
16	Kota Padang Panjang	55.746	1,04	375	0,47	380	0,84	0	0,00	59	1,59	1	14,29	1	0,42	56.562	1,03
17	Kota Bukittinggi	115.980	2,16	1.882	2,34	1.132	2,49	7	6,60	177	4,76	0	0,00	5	2,10	119.183	2,16
18	Kota Payakumbuh	133.619	2,48	770	0,96	680	1,49	0	0,00	140	3,77	0	0,00	0	0,00	135.209	2,45
19	Kota Pariaman	90.380	1,68	223	0,28	119	0,26	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	2,10	90.727	1,65
	SUMATERA BARAT	5.381.178	100,00	80.504	100,00	45.496	100,00	106	100,00	3.717	100,00	7	100,00	238	100,00	5.511.246	100,00

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2017 (diolah)

Tabel 13. Distribusi Penduduk menurut Agama dan Kabupaten/Kota, Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2017

3) Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kecacatan

Bagian ini menggambarkan jumlah dan proporsi penduduk berdasarkan jenis kecacatan (tuna netra, tuna rungu, tuna grahita, dan lain-lain) yang disajikan dalam bentuk tabel.

Data ini sangat diperlukan dalam melakukan perencanaan pelayanan yang akan diberikan kepada penduduk dengan kategori khusus.

Indikator ini menguraikan jumlah dan proporsi penyandang cacat dirinci menurut jenis kelamin dan kelompok umur. Masing-masing disajikan dalam bentuk tabel menurut Kabupaten/Kota.

Distribusi penduduk Provinsi Sumatera Barat menurut jenis kecacatan dan jenis kelamin per 31 Desember 2017 disajikan pada Tabel 14, sedangkan distribusi penduduk Provinsi Sumatera Barat menurut jenis kecacatan dan Kabupaten/Kota per 31 Desember 2017 dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 14.

Distribusi Penduduk Menurut Jenis Kecacatan dan Jenis Kelamin
Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2017

No	Jenis Kecacatan	Jenis Kelamin (Jiwa)				Total (Jiwa)	
		Laki-Laki		Perempuan			
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Cacat Fisik	686	23,61	492	23,42	1.178	23,53
2	Cacat Netra/Buta	274	9,43	210	10,00	484	9,67
3	Cacat Rungu/Wicara	487	16,76	475	22,61	962	19,22
4	Cacat Mental/Jiwa	865	29,78	489	23,27	1.354	27,05
5	Cacat Fisik dan Mental	348	11,98	257	12,23	605	12,09
6	Cacat Lainnya	245	8,43	178	8,47	423	8,45
	JUMLAH	2.905	100,00	2.101	100,00	5.006	100,00

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2017 (diolah)

Dari tabel di atas diketahui bahwa penyandang cacat di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 5.006 jiwa dengan jenis kecacatan yang paling banyak dialami adalah cacat mental/jiwa sebanyak 1.354 jiwa (27,05 persen) dengan persentase tertinggi pada laki-laki sebanyak 865 jiwa (29,78 persen).

Bila dilihat pada Tabel 15, maka distribusi penyandang cacat per Kabupaten/Kota terbanyak berada di Kota Padang dengan jumlah total 934 jiwa (18,66 persen), diikuti oleh Kabupaten Tanah Datar dengan penyandang cacat sebanyak 679 jiwa (13,56 persen), sedangkan penyandang cacat dengan jumlah terkecil berada di Kota Payakumbuh hanya sebanyak 11 jiwa (0,22 persen). Untuk jenis kecacatan yang paling banyak dialami penduduk Provinsi Sumatera Barat, yaitu cacat mental/jiwa, Kabupaten/Kota yang terbanyak adalah Kabupaten Tanah Datar dengan jumlah sebanyak 226 jiwa (16,69 persen) dan selanjutnya Kota Padang sebanyak 209 jiwa (16,94 persen), sedangkan jumlah penyandang cacat mental/jiwa terkecil juga berada di Kota Payakumbuh yaitu sebanyak 2 orang (0,15 persen).

Dari Tabel 15 juga dapat dilihat bahwa untuk masing-masing jenis kecacatan yaitu cacat fisik, jumlah terbesar berada di Kota Padang sebanyak 204 jiwa (17,32 persen) dan jumlah terkecil berada di Kota Payakumbuh sebanyak 2 jiwa (0,17 persen), cacat netra (buta) jumlah terbesar berada di Kabupaten Pasaman dengan jumlah 82 jiwa (16,94 persen) dan jumlah terkecil berada di Kota Payakumbuh sebanyak 1 orang (0,21 persen), cacat rungu (wicara) jumlah terbesar berada di Kota Padang sebanyak 208 jiwa (21,62 persen) dan jumlah terkecil berada di Kota

Payakumbuh sebanyak 2 jiwa (0,21 persen), cacat fisik dan mental jumlah terbesar berada di kota Padang sebanyak 102 jiwa (16,86 persen) dan jumlah terkecil berada di Kota Payakumbuh sebanyak 3 orang (0,50 persen), dan cacat lainnya jumlah terbesar juga berada di Kota Padang sebanyak 140 jiwa (33,10 persen) dan jumlah terkecil sebanyak 1 orang (0,24 persen) juga berada di Kota Payakumbuh.

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa hampir semua jenis kecacatan, jumlah terbesarnya berada di Kota Padang, hanya cacat netra (buta) yang berada di Kabupaten Pasaman dan cacat mental/jiwa yang berada di Kabupaten Tanah Datar, sedangkan jumlah terkecil berada di Kota Payakumbuh. Hal ini menuntut perhatian yang serius dari Pemerintah Kota Padang untuk dapat memperhatikan dan menyiapkan sarana dan prasarana penunjang bagi penduduk penyandang cacat (disabilitas) ini, khususnya untuk pelayanan publik di berbagai sektor agar seluruh penduduk disabilitas ini mendapatkan prioritas pelayanan. Selanjutnya, pemerintah Kota Padang juga harus menyediakan Rumah Sakit khusus bagi penyandang cacat ini agar seluruh penyandang cacat bisa mendapatkan pelayanan yang optimal.

PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN PROVINSI SUMATERA BARAT

2017

No	Kabupaten/Kota	Jenis Kecacatan (Jiwa)												Total (Jiwa)	
		Cacat Fisik		Cacat Netra/Buta		Cacat Rungu/Wicara		Cacat Mental/Jiwa		Cacat Fisik & Mental		Cacat Lainnya			
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Kabupaten Pesisir Selatan	59	5,01	17	3,51	35	3,64	50	3,69	19	3,14	22	5,20	202	4,04
2	Kabupaten Solok	66	5,60	30	6,20	38	3,95	79	5,83	42	6,94	17	4,02	272	5,43
3	Kabupaten Sijunjung	72	6,11	40	8,26	81	8,42	54	3,99	45	7,44	26	6,15	318	6,35
4	Kabupaten Tanah Datar	171	14,52	53	10,95	120	12,47	226	16,69	79	13,06	30	7,09	679	13,56
5	Kabupaten Padang Pariaman	43	3,65	17	3,51	24	2,49	52	3,84	24	3,97	6	1,42	166	3,32
6	Kabupaten Agam	140	11,88	36	7,44	57	5,93	163	12,04	48	7,93	22	5,20	466	9,31
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	22	1,87	11	2,27	21	2,18	41	3,03	11	1,82	13	3,07	119	2,38
8	Kabupaten Pasaman	133	11,29	82	16,94	132	13,72	178	13,15	76	12,56	19	4,49	620	12,39
9	Kabupaten Kepulauan Mentawai	22	1,87	7	1,45	12	1,25	15	1,11	8	1,32	9	2,13	73	1,46
10	Kabupaten Dharmasraya	17	1,44	10	2,07	32	3,33	15	1,11	15	2,48	10	2,36	99	1,98
11	Kabupaten Solok Selatan	22	1,87	12	2,48	29	3,01	17	1,26	20	3,31	3	0,71	103	2,06
12	Kabupaten Pasaman Barat	46	3,90	28	5,79	40	4,16	60	4,43	27	4,46	32	7,57	233	4,65
13	Kota Padang	204	17,32	63	13,02	208	21,62	217	16,03	102	16,86	140	33,10	934	18,66
14	Kota Solok	31	2,63	14	2,89	37	3,85	39	2,88	14	2,31	10	2,36	145	2,90
15	Kota Sawahlunto	41	3,48	12	2,48	45	4,68	50	3,69	29	4,79	34	8,04	211	4,21
16	Kota Padang Panjang	20	1,70	9	1,86	14	1,46	13	0,96	5	0,83	6	1,42	67	1,34
17	Kota Bukittinggi	12	1,02	16	3,31	7	0,73	24	1,77	5	0,83	11	2,60	75	1,50
18	Kota Payakumbuh	2	0,17	1	0,21	2	0,21	2	0,15	3	0,50	1	0,24	11	0,22
19	Kota Pariaman	55	4,67	26	5,37	28	2,91	59	4,36	33	5,45	12	2,84	213	4,25
	SUMATERA BARAT	1.178	100,00	484	100,00	962	100,00	1.354	100,00	605	100,00	423	100,00	5.006	100,00

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2017 (diolah)

Tabel 15. Distribusi Penduduk Menurut Jenis Kecacatan dan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2017

4) Penduduk Menurut Status Kawin

Bagian ini menggambarkan jumlah dan proporsi penduduk menurut status kawin di suatu daerah pada waktu tertentu yang disajikan per wilayah dalam bentuk tabel. Status kawin ini meliputi belum kawin, kawin dan cerai.

Dalam hal ini, konsep perkawinan difokuskan pada keadaan dimana seorang laki-laki dan perempuan hidup bersama dalam jangka waktu yang lama secara sah (de jure) maupun tanpa pengesahan perkawinan (de facto).

Indikator perkawinan berguna bagi penentu kebijakan dalam mengembangkan program-program pembangunan keluarga dan upaya-upaya peningkatan kualitas keluarga dan perencanaan Keluarga Berencana/pembangunan keluarga.

Distribusi penduduk Provinsi Sumatera Barat menurut status kawin dan jenis kelamin per 31 Desember 2017 dapat dilihat pada Tabel 16 berikut ini :

Tabel 16.
Distribusi Penduduk Menurut Status Kawin dan Jenis Kelamin
Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2017

Status Kawin	Jenis Kelamin (Jiwa)				Total (Jiwa)	
	Laki-Laki		Perempuan			
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Belum Kawin	1.544.060	55,35	1.245.322	45,75	2.789.382	50,61
Kawin	1.201.597	43,08	1.232.242	45,27	2.433.839	44,16
Cerai Hidup	16.105	0,58	46.565	1,71	62.670	1,14
Cerai Mati	27.715	0,99	197.640	7,26	225.355	4,09
JUMLAH	2.789.477	100,00	2.721.769	100,00	5.511.246	100,00

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2017 (diolah)

**PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

2017

No	Kabupaten/Kota	Status Kawin (Jiwa)								Total (Jiwa)	
		Belum Kawin		Kawin		Ceraai Hidup		Ceraai Mati			
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Kabupaten Pesisir Selatan	259.161	9,29	232.162	9,54	7.046	11,24	21.153	9,39	519.552	9,43
2	Kabupaten Solok	191.337	6,86	166.896	6,86	2.805	4,48	16.254	7,21	377.310	6,85
3	Kabupaten Sijunjung	115.241	4,13	109.307	4,49	2.009	3,21	8.358	3,71	234.927	4,26
4	Kabupaten Tanah Datar	176.493	6,33	167.008	6,86	4.802	7,66	19.451	8,63	367.775	6,67
5	Kabupaten Padang Pariaman	251.681	9,02	183.312	7,53	7.002	11,17	22.565	10,01	464.588	8,43
6	Kabupaten Agam	271.192	9,72	220.467	9,06	7.084	11,30	28.098	12,47	526.871	9,56
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	176.495	6,33	179.566	7,38	3.598	5,74	15.819	7,02	375.497	6,81
8	Kabupaten Pasaman	165.495	5,93	133.569	5,49	3.072	4,90	14.484	6,43	316.636	5,74
9	Kabupaten Kepulauan Mentawai	46.589	1,67	36.609	1,50	479	0,76	1.992	0,88	85.673	1,55
10	Kabupaten Dharmasraya	97.022	3,48	103.276	4,24	1.542	2,46	6.043	2,68	207.893	3,77
11	Kabupaten Solok Selatan	88.569	3,18	82.379	3,38	1.976	3,15	5.763	2,56	178.697	3,24
12	Kabupaten Pasaman Barat	225.495	8,08	185.354	7,62	4.014	6,40	15.041	6,67	429.926	7,80
13	Kota Padang	449.395	16,11	400.052	16,44	9.924	15,84	28.304	12,56	887.723	16,11
14	Kota Solok	37.128	1,33	31.230	1,28	918	1,46	2.447	1,09	71.727	1,30
15	Kota Sawahlunto	31.386	1,13	29.439	1,21	923	1,47	3.294	1,46	65.046	1,18
16	Kota Padang Panjang	29.677	1,06	23.825	0,98	881	1,41	2.179	0,97	56.565	1,03
17	Kota Bukittinggi	60.969	2,19	52.284	2,15	1.508	2,41	4.422	1,96	119.190	2,16
18	Kota Payakumbuh	66.950	2,40	61.296	2,52	1.786	2,85	5.177	2,30	135.217	2,45
19	Kota Pariaman	49.107	1,76	35.808	1,47	1.301	2,08	4.511	2,00	90.732	1,65
	SUMATERA BARAT	2.789.382	100,00	2.433.839	100,00	62.670	100,00	225.355	100,00	5.511.546	100,00

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II 2017 (diolah)

Tabel 17. Distribusi Penduduk Menurut Status Kawin dan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2017

Tabel 16 menunjukkan bahwa penduduk Provinsi Sumatera Barat didominasi oleh penduduk berstatus belum kawin per 31 Desember 2017 berjumlah 2.789.382 jiwa (50,61 persen). Hal ini terlihat, baik untuk penduduk laki-laki maupun perempuan. Sementara itu, proporsi penduduk laki-laki yang berstatus kawin hampir sama dengan perempuan. Sedangkan, penduduk laki-laki berstatus belum kawin lebih tinggi dibandingkan perempuan, karena biasanya laki-laki masih meneruskan pendidikan atau baru mulai bekerja, sehingga menunda perkawinan. Begitu juga laki-laki yang dikonstruksikan sebagai kepala keluarga yang harus membiayai kebutuhan keluarga, mempunyai keinginan mapan secara ekonomi sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Proporsi penduduk dengan status cerai hidup dan cerai mati lebih tinggi pada perempuan dibandingkan laki-laki. Hal ini disebabkan laki-laki yang bercerai baik karena perceraian maupun karena ditinggal meninggal istri lebih cepat melakukan perkawinan kembali dibandingkan perempuan. Perempuan lebih banyak pertimbangan untuk menikah kembali terutama apabila perempuan tersebut mandiri secara ekonomi. Proporsi penduduk berstatus cerai hidup lebih besar pada perempuan daripada laki-laki. Kemandirian perempuan secara ekonomi serta peningkatan kesadaran tentang hak-hak perempuan dalam rumah tangga, seringkali menjadi penyebab keberanian perempuan menggugat cerai. Banyaknya proporsi belum kawin diduga disebabkan oleh besarnya jumlah penduduk yang berada pada umur sekolah ditambah dengan mereka yang berstatus bekerja.

Jika diklasifikasikan berdasarkan Kabupaten/Kota, pada Tabel 17 dapat dilihat bahwa Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk berstatus kawin dengan persentase tertinggi ada pada Kota Padang dengan jumlah 400.052 jiwa (16,44 persen), diikuti Kabupaten Pesisir Selatan dengan jumlah 232.162 jiwa (9,54 persen), sedangkan Kabupaten/Kota dengan persentase terendah ada pada Kota Padang Panjang dengan jumlah 23.825 jiwa (0,98 persen), diikuti Kota Sawahlunto dengan jumlah 29.439 jiwa (1,21 persen).

Sedangkan untuk Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk cerai hidup dan cerai mati dengan persentase tertinggi juga ada pada Kota Padang dengan jumlah masing-masing 9.924 jiwa (15,84 persen) untuk cerai hidup dan sebanyak 28.304 (12,56 persen) untuk cerai mati.

c. Keluarga

Informasi tentang jumlah keluarga dan komposisi anggota keluarga, diperlukan dalam perencanaan maupun implementasi kebijakan pemenuhan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, kebutuhan pangan, pengentasan kemiskinan, dan sebagainya.

Keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/ hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan sebagainya. Keluarga dapat dibagi menjadi 2 tipe yaitu :

- Keluarga Inti (*Nuclear family*), yaitu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak kandung, anak angkat maupun adopsi

yang belum kawin, atau ayah dengan anak-anak yang belum kawin atau ibu dengan anak-anak yang belum kawin.

- Keluarga Luas (*Extended family*), adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak-anak baik yang sudah kawin atau belum, cucu, orang tua, mertua maupun kerabat-kerabat yang menjadi tanggungan kepala keluarga.

Beberapa indikator yang diperlukan untuk menggambarkan kondisi keluarga antara lain :

1) Jumlah Keluarga dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga

Banyaknya jumlah anggota keluarga dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi lingkungan dan kesejahteraan dalam satu keluarga, dimana diasumsikan semakin kecil jumlah anggota keluarga biasanya akan semakin baik tingkat kesejahtraannya.

Rata-rata jumlah anggota keluarga biasanya digunakan untuk melihat perubahan paradigma dari keluarga luas menjadi keluarga kecil.

Pada Tabel 18 dapat dilihat bahwa jumlah keluarga di Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017 sebanyak 1.481.682 keluarga yang tersebar di 19 Kabupaten/Kota. Kota Padang sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Barat memiliki jumlah keluarga terbesar yaitu 235.551 keluarga kemudian disusul oleh Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 140.735 keluarga, Kabupaten Agam sebanyak 139.080 keluarga, dan Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 117.021 keluarga. Sedangkan jumlah keluarga terkecil berada di Kota Padang Panjang yaitu 14.985 keluarga.

Rata-rata jumlah anggota keluarga di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 3,72 per keluarga. Ini menunjukkan bahwa keluarga di Provinsi Sumatera Barat lebih banyak merupakan keluarga inti dengan jumlah anggota keluarga sebanyak 3-4 orang. Bila diperhatikan menurut Kabupaten/Kota, rata-rata jumlah anggota keluarga di setiap Kabupaten/Kota juga terdiri dari 3-4 orang per keluarga.

Tabel 18.
Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga
Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2017

No	Kabupaten/Kota	Penduduk (Jiwa)		KK (Jiwa)		Rata-rata Jiwa/KK
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1	Kabupaten Pesisir Selatan	519.522	9,43	140.735	9,50	3,69
2	Kabupaten Solok	377.292	6,85	100.163	6,76	3,77
3	Kabupaten Sijunjung	234.915	4,26	62.636	4,23	3,75
4	Kabupaten Tanah Datar	367.754	6,67	103.076	6,96	3,57
5	Kabupaten Padang Pariaman	464.560	8,43	117.021	7,90	3,97
6	Kabupaten Agam	526.841	9,56	139.080	9,39	3,79
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	375.478	6,81	113.100	7,63	3,32
8	Kabupaten Pasaman	316.620	5,74	85.624	5,78	3,70
9	Kabupaten Kepulauan Mentawai	85.669	1,55	21.947	1,48	3,90
10	Kabupaten Dharmasraya	207.883	3,77	57.863	3,91	3,59
11	Kabupaten Solok Selatan	178.687	3,24	48.781	3,29	3,66
12	Kabupaten Pasaman Barat	429.904	7,80	111.176	7,50	3,87
13	Kota Padang	887.675	16,11	235.551	15,90	3,77
14	Kota Solok	71.723	1,30	18.723	1,26	3,83
15	Kota Sawahlunto	65.042	1,18	18.653	1,26	3,49
16	Kota Padang Panjang	56.562	1,03	14.985	1,01	3,77
17	Kota Bukittinggi	119.183	2,16	32.554	2,20	3,66
18	Kota Payakumbuh	135.209	2,45	37.413	2,53	3,61
19	Kota Pariaman	90.727	1,65	22.571	1,52	4,02
	SUMATERA BARAT	5.511.246	100,00	1.481.652	100,00	3,72

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2017 (diolah)

Informasi tentang rata-rata jumlah anggota keluarga ini dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan program keluarga berencana di wilayah Provinsi Sumatera Barat dan dapat digunakan pemerintah provinsi dalam merencanakan

kebutuhan perumahan, seperti untuk menentukan ukuran rumah dengan berbagai tipe agar dapat memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat yang beranggota 3-4 orang.

2) *Status Hubungan Dengan Kepala Keluarga (SHDK)*

Hubungan dengan kepala keluarga digunakan untuk melihat banyaknya kepala keluarga menurut jenis kelamin, pola pengaturan tinggal bersama (living arrangement) dan pola pengasuhan anak dalam keluarga tersebut. Setiap anggota dalam keluarga mempunyai status hubungan dengan kepala keluarga seperti suami, istri, anak, menantu, cucu, keponakan, orang tua, dan mertua, termasuk adanya orang lain yang tinggal bersama seperti pembantu rumah tangga.

Tabel distribusi anggota keluarga berdasarkan status hubungan dengan kepala keluarga Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017 dapat dilihat pada Tabel 19 di bawah ini :

Tabel 19.

Distribusi Anggota Keluarga Berdasarkan Status Hubungan Dengan Kepala Keluarga Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2017

No	Status Hubungan Dalam Keluarga	Laki-Laki (Jiwa)		Perempuan (Jiwa)		Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
01	Kepala Keluarga	1.238.821	44,41	242.831	8,92	1.481.652	26,88
02	Suami	215	0,01	0	0,00	215	0,00
03	Istri	0	0,00	1.169.753	42,98	1.169.753	21,22
04	Anak	1.461.835	52,41	1.200.728	44,12	2.662.563	48,31
05	Menantu	710	0,03	276	0,01	986	0,02
06	Cucu	18.483	0,66	15.191	0,56	33.674	0,61
07	Orang Tua	2.132	0,08	17.002	0,62	19.134	0,35
08	Mertua	4.607	0,17	37.077	1,36	41.684	0,76
09	Famili Lain	57.599	2,06	34.793	1,28	92.392	1,68
10	Pembantu	95	0,00	238	0,01	333	0,01
11	Lainnya	4.980	0,18	3.880	0,14	8.860	0,16
	TOTAL	2.789.477	100,00	2.721.769	100,00	5.511.246	100,00

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2017 (diolah)

Dari Tabel 19 dapat kita ketahui bahwa status hubungan keluarga dengan kepala keluarga yang terbesar adalah anak sebanyak 2.662.563 jiwa (48,31 persen). Dari Tabel 19 juga terlihat bahwa terdapat jumlah Kepala Keluarga yang berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 242.831 jiwa (8,92 persen). Ini terjadi karena adanya perceraian baik cerai mati maupun cerai hidup yang akhirnya terpaksa menjadikan perempuan sebagai kepala keluarga.

3) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Umur

Informasi tentang kelompok umur dari kepala keluarga dan anggota keluarga penting diketahui terutama untuk melakukan analisis kondisi demografi keluarga serta perencanaan kebijakan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, kemiskinan, dan lain-lain.

Tabel kepala keluarga menurut umur dan jenis kelamin Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017 dapat dilihat pada Tabel 20 di bawah. Pada Tabel 20 tersebut terlihat bahwa kepala keluarga terbesar jumlahnya berada pada kelompok umur 40-44 tahun yaitu sebanyak 187.398 jiwa (12,88 persen) dimana jumlah kepala keluarga laki-laki terbesar berada pada kelompok umur 35-39 tahun sebanyak 172.585 jiwa (14,10 persen) dan kepala keluarga perempuan terbesar berada pada kelompok umur 60-64 tahun sebanyak 32.621 jiwa (14,11 persen). Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kesempatan hidup perempuan lebih besar bila dibandingkan dengan laki-laki, dimana mulai pada kelompok umur 45-49, jumlah kepala keluarga perempuan mengalami peningkatan, sedangkan jumlah kepala keluarga laki-laki justru mengalami hal

sebaliknya dengan mengalami penurunan. Untuk itu perlu dipersiapkan perempuan-perempuan dengan ketrampilan-ketrampilan yang dapat menunjang kehidupannya dari sisi sosial, ekonomi, dan psikologi, kelak bila sudah tidak memiliki suami lagi, baik yang disebabkan karena cerai hidup maupun cerai mati.

Tabel 20.
Kepala Keluarga Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2017

No	Kelompok Umur	Laki-Laki (jiwa)		Perempuan (jiwa)		Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	00-04	1	0,00	0	0,00	1	0,00
2	05-09	5	0,00	1	0,00	6	0,00
3	10-14	14	0,00	9	0,00	23	0,00
4	15-19	587	0,05	571	0,24	1.158	0,08
5	20-24	14.626	1,18	3.922	1,62	18.548	1,25
6	25-29	68.980	5,57	7.530	3,10	76.510	5,16
7	30-34	149.044	12,03	10.723	4,42	159.767	10,78
8	35-39	180.054	14,53	13.084	5,39	193.138	13,04
9	40-44	172.514	13,93	16.678	6,87	189.192	12,77
10	45-49	156.023	12,59	20.625	8,49	176.648	11,92
11	50-54	132.817	10,72	25.431	10,47	158.248	10,68
12	55-59	121.614	9,82	31.032	12,78	152.646	10,30
13	60-64	98.404	7,94	33.423	13,76	131.827	8,90
14	65-69	64.270	5,19	26.529	10,92	90.799	6,13
15	70-74	33.808	2,73	20.453	8,42	54.261	3,66
16	> 75	46.060	3,72	32.820	13,52	78.880	5,32
	Total	1.238.821	100,00	242.831	100,00	1.481.652	100,00

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2017 (diolah)

4) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin

Masyarakat Indonesia cenderung menganggap bahwa laki-laki adalah penanggung jawab ekonomi keluarga sekaligus sebagai kepala keluarga. Namun dalam kenyataannya tidak sedikit perempuan yang menjadi kepala keluarga karena pasangan meninggal, cerai atau sebab-sebab yang lain.

Karakteristik kepala keluarga menurut jenis kelamin dapat menunjukkan seberapa banyak perempuan yang menjadi kepala keluarga, bagaimana kecenderungannya di masa depan dan bagaimana gambaran sosial ekonomi keluarga yang dikepalai oleh seorang perempuan.

Penambahan persentase kepala keluarga perempuan tersebut dapat juga menggambarkan tingkat perceraian (baik cerai hidup maupun cerai mati) yang terjadi dan juga dapat menggambarkan salah satu tren gaya hidup modern.

Tabel kepala keluarga menurut jenis kelamin dan wilayah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017 disajikan dalam Tabel 21 berikut ini :

Tabel 21.
Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin dan Wilayah
Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2017

No	Kabupaten/Kota	Laki-Laki (Jiwa)		Perempuan (Jiwa)		Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Kabupaten Pesisir Selatan	118.669	9,58	22.066	9,09	140.735	9,50
2	Kabupaten Solok	84.611	6,83	15.552	6,40	100.163	6,76
3	Kabupaten Sijunjung	55.243	4,46	7.393	3,04	62.636	4,23
4	Kabupaten Tanah Datar	84.400	6,81	18.676	7,69	103.076	6,96
5	Kabupaten Padang Pariaman	93.135	7,52	23.886	9,84	117.021	7,90
6	Kabupaten Agam	112.907	9,11	26.173	10,78	139.080	9,39
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	87.873	7,09	25.227	10,39	113.100	7,63
8	Kabupaten Pasaman	70.495	5,69	15.129	6,23	85.624	5,78
9	Kabupaten Kepulauan Mentawai	19.282	1,56	2.665	1,10	21.947	1,48
10	Kabupaten Dharmasraya	52.196	4,21	5.667	2,33	57.863	3,91
11	Kabupaten Solok Selatan	42.471	3,43	6.310	2,60	48.781	3,29
12	Kabupaten Pasaman Barat	95.251	7,69	15.925	6,56	111.176	7,50
13	Kota Padang	202.145	16,32	33.406	13,76	235.551	15,90
14	Kota Solok	15.976	1,29	2.747	1,13	18.723	1,26
15	Kota Sawahlunto	15.312	1,24	3.341	1,38	18.653	1,26
16	Kota Padang Panjang	12.333	1,00	2.652	1,09	14.985	1,01
17	Kota Bukittinggi	26.936	2,17	5.618	2,31	32.554	2,20
18	Kota Payakumbuh	31.616	2,55	5.797	2,39	37.413	2,53
19	Kota Pariaman	17.970	1,45	4.601	1,89	22.571	1,52
	SUMATERA BARAT	1.238.821	100,00	242.831	100,00	1.481.652	100,00

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2017 (diolah)

Dari Tabel 21 tersebut terlihat bahwa mayoritas kepala keluarga di Provinsi Sumatera Barat adalah laki-laki yaitu sebanyak 1.238.821 jiwa, sedangkan perempuan yang menjadi kepala keluarga sebanyak 242.831 jiwa atau dengan perbandingan 5 : 1, yang artinya dari 5 kepala keluarga laki-laki terdapat 1 kepala keluarga perempuan. Hal yang sama juga terlihat pada di seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, dimana kepala keluarga laki-laki lebih banyak bila dibandingkan dengan kepala keluarga perempuan dengan perbandingan terbesar berada di Kabupaten Dharmasraya, yaitu 9 : 1, dan selanjutnya perbandingan terbesar juga terlihat di Kabupaten Sijunjung yaitu 7 : 1 dan yang terendah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan perbandingan 3 : 1. Dari Tabel 21 juga dapat dilihat bahwa jumlah kepala keluarga laki-laki terbesar berada di Kota Padang sebanyak 202.145 jiwa (16,32 persen), sedangkan untuk kepala keluarga perempuan terbesar juga berada di Kota Padang yaitu sebanyak 33.406 jiwa (13,76 persen).

5) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Kawin

Dalam konsep demografi kepala keluarga merupakan seseorang baik laki-laki maupun perempuan, berstatus menikah maupun tidak, yang mempunyai peran, fungsi, dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologi.

Karakteristik kepala keluarga berdasarkan status kawin dapat digunakan untuk melihat jumlah keluarga yang dikepalai oleh lajang maupun mereka yang berstatus cerai baik hidup maupun mati.

Tabel kepala keluarga berdasarkan status kawin dan jenis kelamin Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017 dapat dilihat pada Tabel 22 di bawah ini :

Tabel 22.
Kepala Keluarga Menurut Status Kawin dan Jenis Kelamin
Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2017

No	Status Kawin	Laki-Laki (jiwa)		Perempuan (jiwa)		Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Belum Kawin	21.530	1,74	12.249	5,04	33.779	2,28
2	Kawin	1.186.202	95,75	46.727	19,24	1.232.929	83,21
3	Cerai Hidup	10.429	0,84	38.400	15,81	48.829	3,30
4	Cerai Mati	20.660	1,67	145.455	59,90	166.115	11,21
	TOTAL	1.238.821	100,00	242.831	100,00	1.481.652	100,00

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2017 (diolah)

Pada umumnya kepala keluarga berstatus kawin yaitu sebesar 1.232.929 jiwa (83,21 persen), dan pada umumnya laki-laki yaitu sebanyak 1.186.202 jiwa (95,75 persen). Kepala keluarga yang berstatus belum kawin hanya 33.779 jiwa (2,28 persen) saja. Meskipun demikian perlu dikaji kembali apakah mereka yang berstatus lajang ini memiliki anggota keluarga atau dia hidup sendirian. Kepala keluarga yang berstatus cerai baik cerai hidup maupun cerai mati, persentase perempuan jauh lebih besar dibandingkan laki-laki yaitu masing-masing 78,64 persen cerai hidup dan 87,56 berstatus cerai mati. Kebiasaan kawin ulang yang cepat dilakukan oleh laki-laki, menyebabkan perbedaan persentase tersebut. Selain itu, perempuan yang berstatus cerai baik hidup maupun mati, mempunyai pertimbangan untuk melakukan kawin ulang terutama apabila mereka telah memiliki anak-anak yang biasanya menjadi tanggung jawab perempuan. Meskipun pada saat ini kecenderungan tersebut sudah mulai menurun tetapi kondisi ini masih terjadi. Faktor yang lain adalah

mereka yang cerai mati, terjadi pada kelompok umur yang lebih tua, yang menyebabkan perempuan enggan untuk menikah kembali.

Dalam administrasi kependudukan, perempuan berstatus kawin yang menjadi kepala keluarga juga diberikan kepada mereka yang berstatus istri kedua, ketiga maupun keempat. Oleh sebab itu proporsi perempuan kepala keluarga yang cukup besar (16,39 persen), diduga termasuk mereka yang menjadi kepala keluarga ini adalah menjadi isteri kedua, ketiga, dan seterusnya. Disamping itu, terlihat pula adanya kepala keluarga yang berstatus belum kawin (lajang) sebanyak 2,28 persen. Proporsi kepala keluarga laki-laki yang belum kawin lebih tinggi daripada kepala keluarga perempuan. Biasanya kepala keluarga yang berstatus belum kawin merupakan anggota keluarga yang menggantikan orang tua yang meninggal, atau kepala keluarga tersebut hidup sendirian.

Ada kecendrungan yang terjadi, jika seorang perempuan mengalami peristiwa perceraian baik cerai hidup maupun kematian, maka ketika dia melakukan perkawinan berikutnya, sering kali mereka tidak melaporkan perkawinannya. Ini terjadi karena kebanyakan mereka melakukan perkawinan siri baik dengan laki-laki yang sudah berstatus duda (tapi tidak cerai secara resmi) maupun dengan laki-laki yang masih berstatus suami perempuan lain, sehingga yang bersangkutan agak sungkan melaporkan perkawinan yang mereka alami. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah khususnya Kementerian Agama agar selalu mensosialisasikan tentang pentingnya pernikahan dilakukan secara resmi melalui Kantor Urusan

Agama (KUA) atau bagi yang telah melakukan pernikahan yang sah secara agama namun tidak memiliki buku nikah, dapat mengajukan permohonan untuk dilakukan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama sehingga perkawinannya tercatat secara hukum negara dan diakui oleh negara, dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut terlindungi haknya secara hukum.

6) Karakteristik Kepala Keluarga Menurut Pendidikan

Pendidikan yang dicapai merupakan salah satu indikator kualitas hidup manusia serta menunjukkan status sosial dan status kesejahteraan seseorang. Semakin tinggi pendidikan yang dicapai oleh seorang kepala keluarga diharapkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan keluarga itu.

Untuk itu jenjang pendidikan yang dicapai oleh kepala keluarga dapat digunakan untuk melihat gambaran kualitas sosial maupun ekonomi keluarga.

Tabel karakteristik kepala keluarga menurut pendidikan dan jenis kelamin Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017 dapat dilihat pada Tabel 23 yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan kepala keluarga yang terbesar adalah tamat SD/ sederajat sebanyak 468.585 jiwa (32,20 persen), kemudian diikuti dengan pendidikan SLTA/ sederajat sebanyak 407.963 jiwa (28,04 persen), dan SLTP/ sederajat sebanyak 266.622 jiwa (18,32 persen). Proporsi kepala keluarga yang berpendidikan D1/D2/D3 hanya sebesar 2,69 persen dan S1/S2/S3 sebesar 6,10 persen, dan masih adanya kepala keluarga yang tidak sekolah dan belum tamat SD persentasenya mencapai 12,66 persen. Gambaran diatas menunjukkan bahwa sebagian besar kepala keluarga masih berpendidikan SD ke bawah. Hal ini sesuai

dengan kondisi pendidikan secara nasional, yang harus memperoleh perhatian serius dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Proses globalisasi yang sebentar lagi berlangsung, bonus demografi yang juga akan berlangsung, harus dimanfaatkan untuk meningkatkan tingkat pendidikan penduduk Provinsi Sumatera Barat agar mempunyai daya saing global, sehingga dapat memanfaatkan bonus demografi yang akan segera berlangsung. Apabila dilihat dari tingkat pendidikan ini, maka kepala keluarga yang mempunyai pendidikan rendah diduga mempunyai pendapatan yang rendah, sehingga diduga mereka tidak mampu memberikan pendidikan yang tinggi bagi anggota keluarganya. Biasanya kepala keluarga yang berpendidikan rendah akan bekerja di sektor informal.

Tabel 23.
Kepala Keluarga Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin
Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2017

No	Pendidikan	Laki-Laki (Jiwa)		Perempuan (Jiwa)		Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Tidak/Belum Sekolah	37.310	3,01	16.182	6,66	53.492	3,61
2	Belum Tamat SD/Sederajat	102.659	8,29	36.569	15,06	139.228	9,40
3	Tamat SD/Sederajat	367.183	29,64	95.903	39,49	463.086	31,25
4	SLTP/Sederajat	236.465	19,09	33.648	13,86	270.113	18,23
5	SLTA/Sederajat	376.451	30,39	44.703	18,41	421.154	28,42
6	Diploma I/II	9.150	0,74	3.046	1,25	12.196	0,82
7	Akademi/Diploma III/Sarmud	23.890	1,93	3.905	1,61	27.795	1,88
8	Diploma IV/Strata I	76.939	6,21	8.233	3,39	85.172	5,75
9	Strata II	7.964	0,64	560	0,23	8.524	0,58
10	Strata III	810	0,07	82	0,03	892	0,06
	TOTAL	1.238.821	100,00	242.831	100,00	1.481.652	100,00

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2017 (diolah)

Jika dikaitkan dengan jenis kelamin, nampak bahwa lebih separuh (61,21 persen) kepala keluarga perempuan yang tidak

bersekolah, belum tamat SD, dan tamat SD. Hal ini lebih tinggi dibandingkan dengan kepala keluarga laki-laki maka dugaan keluarga yang dikepalai perempuan akan mempunyai status ekonomi yang lebih rendah dibandingkan yang dikepalai laki-laki mendekati kenyataan.

Melihat status pendidikan, umur dan jenis kelamin, nampak bahwa kepala keluarga perempuan berada pada umur yang relatif lebih tua dan berpendidikan rendah dibandingkan dengan kepala keluarga laki-laki.

7) Karakteristik Kepala Keluarga Menurut Status Bekerja

Status ekonomi keluarga dapat dilihat dari kegiatan ekonomi kepala keluarga maupun anggota keluarga serta besar sumbangan mereka terhadap ekonomi keluarga. Oleh sebab itu, informasi mengenai kepala keluarga menurut status pekerjaan perlu diketahui untuk perencanaan pelayanan kebutuhan dasar penduduk. Tabel distribusi kepala keluarga menurut status bekerja dan jenis kelamin Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017 dapat dilihat pada Tabel 24 di bawah ini :

Tabel 24.

Distribusi Kepala Keluarga Menurut Status Bekerja dan Jenis Kelamin
Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2017

No	Status Bekerja	Laki-Laki (Jiwa)		Perempuan (Jiwa)		Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Bekerja	1.193.156	96,31	71.506	29,45	1.264.662	85,35
2	Belum/Tidak Bekerja	16.751	1,35	9.440	3,89	26.191	1,77
3	Pelajar/mahasiswa	3.839	0,31	3.324	1,37	7.163	0,48
4	Pensiunan	24.691	1,99	6.581	2,71	31.272	2,11
5	Mengurus Rumah Tangga	384	0,03	151.980	62,59	152.364	10,28
	Total	1.238.821	100,00	242.831	100,00	1.481.652	100,00

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2017 (diolah)

Proporsi kepala keluarga laki-laki yang bekerja lebih besar dibandingkan kepala keluarga perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa peran dan fungsi laki-laki adalah

penanggung jawab ekonomi keluarga sehingga lebih banyak yang harus terjun ke pasar kerja, sementara perempuan biasanya hanya berfungsi sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab atas terselenggaranya keluarga yang bersangkutan. Meskipun demikian, perempuan pada masa kini mulai ikut terjun ke pasar kerja.

Proporsi kepala keluarga laki-laki yang mengurus rumah tangga hanya sebesar 0,03 persen sedangkan kepala keluarga perempuan yakni sebesar 62,59 persen. Untuk kepala keluarga yang belum/tidak bekerja per kondisi 31 Desember 2017 sebanyak 26.191 jiwa (1,77 persen), dimana proporsi kepala keluarga laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan kepala keluarga perempuan. Ini perlu menjadi perhatian serius oleh pemerintah daerah khususnya dalam penyediaan lapangan pekerjaan industri rumah tangga bagi ibu-ibu yang menjadi kepala keluarga. Disamping itu terdapat pula kepala keluarga yang sudah pensiun sebesar 2,11 persen dengan proporsi jumlah pensiunan laki-laki lebih kecil dari kepala keluarga perempuan. Walaupun persentasenya tidak terlalu signifikan, namun hal ini juga harus menjadi perhatian serius pemerintah khususnya instansi terkait dalam hal penyediaan program-program yang memperhatikan para manula yang sudah tidak produktif lagi. Disamping itu, dari Tabel 24 juga terlihat bahwa terdapat 7.163 jiwa (0,48 persen) kepala keluarga yang mempunyai pekerjaan sebagai pelajar/mahasiswa. Walau data ini perlu ditelisik lagi kebenarannya, namun demikian, bukan tidak mungkin ada kepala keluarga yang memang masih usia sekolah, dikarenakan orang tuanya sudah meninggal atau karena alasan

permasalahan sosial masyarakat lainnya sehingga yang bersangkutan terpaksa menanggung beban keluarga dalam melanjutkan kehidupannya. Bagi mereka itu mungkin perlu perhatian dari Dinas Pendidikan khususnya dalam hal menjamin ketersediaan kesempatan menempuh pendidikan bagi mereka sehingga mereka bisa mandiri dan bisa mencapai cita-cita untuk masa depan yang lebih baik.

d. Kelahiran (Fertilitas)

Kelahiran merupakan salah satu komponen pertumbuhan penduduk yang bersifat menambah jumlah penduduk. Banyaknya kelahiran membawa konsekuensi pada pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang bayi, dari pemenuhan gizi, perawatan kesehatan ibu dan anak, dan pada gilirannya membutuhkan fasilitas pendidikan termasuk pemenuhan kesempatan kerja.

Tingkat kelahiran dimasa lalu akan mempengaruhi tinggi rendahnya jumlah kelahiran dimasa kini, sehingga pengetahuan tentang fertilitas beserta indikator-indikatornya, termasuk Keluarga Berencana sangat berguna bagi para penentu kebijakan maupun perencana dalam menyusun program-program pembangunan sosial terutama terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan ibu, anak dan pembangunan keluarga.

Indikator yang biasa digunakan untuk menghitung kelahiran (fertilitas) adalah :

1) Jumlah Kelahiran

Jumlah kelahiran didefinisikan sebagai banyaknya kelahiran hidup yang terjadi pada waktu tertentu pada wilayah tertentu.

Informasi tentang jumlah kelahiran bermanfaat untuk perencanaan pembangunan berbagai fasilitas yang dibutuhkan khususnya pengembangan fasilitas kesehatan ibu dan anak, baik untuk masa kini maupun untuk masa yang akan datang. Selain itu, data tentang jumlah kelahiran hidup merupakan dasar untuk perhitungan berbagai indikator fertilitas lainnya.

Jumlah Kelahiran Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 tersaji pada Tabel 25 di bawah ini :

Tabel 25.
Jumlah Kelahiran Hidup
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kelahiran Hidup (Jiwa)		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Kabupaten Pesisir Selatan	4.628	4.419	9.047
2	Kabupaten Solok	3.370	3.534	6.904
3	Kabupaten Sijunjung	2.199	2.046	4.245
4	Kabupaten Tanah Datar	2.492	2.240	4.732
5	Kabupaten Padang Pariaman	2.625	3.941	6.566
6	Kabupaten Agam	3.879	3.610	7.489
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	3.200	3.122	6.322
8	Kabupaten Pasaman	2.772	2.567	5.339
9	Kabupaten Kepulauan Mentawai	891	939	1.830
10	Kabupaten Dharmasraya	1.580	2.091	3.671
11	Kabupaten Solok Selatan	1.752	1.512	3.264
12	Kabupaten Pasaman Barat	4.342	3.947	8.289
13	Kota Padang	8.415	8.539	16.954
14	Kota Solok	790	636	1.426
15	Kota Sawahlunto	534	479	1.013
16	Kota Padang Panjang	538	551	1.089
17	Kota Bukittinggi	1.219	1.208	2.427
18	Kota Payakumbuh	1.470	1.368	2.838
19	Kota Pariaman	898	782	1.680
	SUMATERA BARAT	47.594	47.531	95.125

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat (diolah)

Dari Tabel 25 tersebut dapat dilihat bahwa banyaknya kelahiran hidup di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017 adalah sebanyak 95.125 jiwa dengan proporsi laki-laki sebanyak 47.594

jiwa dan perempuan 47.531 jiwa. Bila dilihat dari proporsi tersebut jumlah kelahiran hidup yang berjenis kelamin laki-laki sedikit lebih banyak bila dibandingkan perempuan.

2) *Angka Kelahiran Kasar (Crude Birth Rate/CBR)*

Angka kelahiran kasar menunjukkan banyaknya kelahiran di suatu wilayah pada tahun tertentu per 1.000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama. Angka kelahiran kasar merupakan ukuran yang paling mudah dihitung tetapi masih kasar karena tidak memperhitungkan jumlah penduduk yang beresiko melahirkan (laki-laki, anak-anak, dan orang tua). Angka kelahiran kasar (CBR) ini berguna untuk mengetahui tingkat kelahiran yang terjadi di suatu daerah tertentu pada tahun tertentu.

Angka Kelahiran Kasar (CBR) dapat diperoleh melalui perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{CBR} &= \frac{B}{P} \times K \\ \text{CBR} &= \frac{95.125}{\{(5.452.274 + 5.511.246)/2\}} \times 1000 \\ \text{CBR} &= 17,35 \end{aligned}$$

CBR : Angka Kelahiran Kasar

B : Banyaknya kelahiran pada tahun tertentu

P : Jumlah penduduk pada pertengahan tahun tertentu

Dari Tabel 25 diketahui bahwa jumlah kelahiran hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 adalah sebesar 95.125 jiwa. Sementara itu jumlah penduduk pada awal tahun 2017 adalah sebesar 5.452.274 jiwa dan jumlah penduduk pada akhir tahun 2017 adalah sebesar 5.511.246 jiwa sehingga dari perhitungan

diperoleh Angka Kelahiran Kasar (CBR) Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 adalah 17,35, artinya bahwa dari 1.000 penduduk pada pertengahan tahun terjadi 17-18 kelahiran hidup.

2. Kualitas Penduduk

a. Kesehatan

1) Rasio Anak dan Perempuan (*Child Women Ratio/CWR*)

Rasio anak dan perempuan adalah rasio antara jumlah anak dibawah 5 (lima) tahun di suatu tempat pada suatu waktu dengan penduduk perempuan usia 15-49 tahun. Rasio ini untuk melihat tingkat fertilitas pada suatu wilayah dan rasio ini berguna sebagai indikator fertilitas penduduk.

Rasio anak dan perempuan/ Child Women Ratio (CWR) Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017 dapat dilihat pada Tabel 26 di bawah ini, yang menunjukkan angka rasio sebesar 22,93 persen artinya bahwa pada Tahun 2017 per 31 Desember 2017 terdapat 22 sampai dengan 23 anak dibawah 5 tahun (0-4 tahun) dari setiap 100 perempuan usia 15-49 tahun.

Bila diklasifikasikan berdasarkan Kabupaten/Kota, persentase Child Woman Ratio (CWR) terbesar berada pada Kota Padang Panjang yaitu sebesar 30,53 persen, selanjutnya adalah Kota Solok dengan Child Woman Ratio (CWR) sebesar 30,23 persen, sedangkan untuk persentase Child Woman Ratio (CWR) terkecil berada pada Kabupaten Tanah Datar, yaitu sebesar 19,72 persen.

Tabel 26.
Rasio Anak dan Perempuan (Child Women Ratio/CWR)
Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2017

No	Kabupaten/Kota	Penduduk Perempuan Usia 15-49 Tahun	Penduduk Usia 0-4 Tahun	Rasio Anak dan Perempuan (CWR)
1	Kabupaten Pesisir Selatan	139.802	28.917	20,68
2	Kabupaten Solok	101.876	20.086	19,72
3	Kabupaten Sijunjung	64.002	14.665	22,91
4	Kabupaten Tanah Datar	92.693	18.779	20,26
5	Kabupaten Padang Pariaman	118.504	27.600	23,29
6	Kabupaten Agam	133.623	30.444	22,78
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	98.164	21.193	21,59
8	Kabupaten Pasaman	84.441	19.790	23,44
9	Kabupaten Kepulauan Mentawai	23.660	4.791	20,25
10	Kabupaten Dharmasraya	58.590	14.341	24,48
11	Kabupaten Solok Selatan	50.260	10.934	21,75
12	Kabupaten Pasaman Barat	120.065	25.239	21,02
13	Kota Padang	246.619	60.174	24,40
14	Kota Solok	19.606	5.926	30,23
15	Kota Sawahlunto	16.939	4.937	29,15
16	Kota Padang Panjang	15.037	4.591	30,53
17	Kota Bukittinggi	32.042	8.902	27,78
18	Kota Payakumbuh	35.323	10.284	29,11
19	Kota Pariaman	23.884	6.635	27,78
	SUMATERA BARAT	1.475.130	338.228	22,93

Sumber : Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester II Tahun 2017 (diolah)

2) *Kematian (Mortalitas)*

Tinggi rendahnya tingkat kematian (mortalitas) penduduk di suatu daerah akan mempengaruhi pertumbuhan penduduk, tetapi juga merupakan cerminan dari tinggi rendahnya tingkat kesehatan penduduk di daerah tersebut. Sehingga indikator kematian penting dalam merencanakan berbagai kebijakan di bidang kesehatan maupun untuk mengevaluasi program kegiatan pembangunan yang telah dilakukan.

Tingkat kematian dipengaruhi oleh : faktor sosial ekonomi, pekerjaan, tempat tinggal, pendidikan, umur, jenis kelamin, dan lain-lain. Kematian juga dapat dilihat dari penyebab kematian, seperti akibat penyakit menular atau penyakit degeneratif, kecelakaan maupun penyebab yang lain.

Kematian dewasa umumnya disebabkan karena penyakit menular, penyakit degeneratif, kecelakaan atau gaya hidup yang beresiko terhadap kematian. Kematian bayi dan balita umumnya disebabkan oleh penyakit sistem pernapasan bagian atas (ISPA) dan diare, yang merupakan penyakit karena infeksi kuman. Faktor gizi buruk juga menyebabkan anak-anak rentan terhadap penyakit menular, sehingga mudah terinfeksi dan menyebabkan tingginya kematian bayi dan balita di suatu daerah.

Indikator kematian yang biasa digunakan untuk mengukur kualitas hidup/kesehatan di suatu daerah adalah :

a) Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rate/IMR/AKB)

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun, atau didefinisikan sebagai jumlah kematian bayi berusia di bawah 1 tahun pada 1.000 kelahiran hidup dalam tahun tertentu. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen. Kematian *bayi endogen* atau yang umum disebut dengan *kematian neonatal*, adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir,

yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan.

Kematian bayi eksogen atau post-neonatal, adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang terkait dengan pengaruh lingkungan luar

Angka kematian bayi digunakan sebagai indikator yang menggambarkan kemajuan pembangunan yang dapat menggambarkan tingkat pelayanan kesehatan ibu dan anak. Untuk Provinsi Sumatera Barat, AKB/IMR tahun 2017 dapat dilihat dari Tabel 27 di bawah ini :

Tabel 27.
Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rate)
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Kelahiran Hidup		Kematian Bayi		AKB/IMR
		Jumlah (jiwa)	%	Jumlah (jiwa)	%	
1	Kabupaten Pesisir Selatan	9.047	9,51	73	6,40	8,07
2	Kabupaten Solok	6.904	7,26	143	12,54	20,71
3	Kabupaten Sijunjung	4.245	4,46	119	10,44	28,03
4	Kabupaten Tanah Datar	4.732	4,97	79	6,93	16,69
5	Kabupaten Padang Pariaman	6.566	6,90	27	2,37	4,11
6	Kabupaten Agam	7.489	7,87	64	5,61	8,55
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	6.322	6,65	55	4,82	8,70
8	Kabupaten Pasaman	5.339	5,61	51	4,47	9,55
9	Kabupaten Kepulauan Mentawai	1.830	1,92	57	5,00	31,15
10	Kabupaten Dharmasraya	3.671	3,86	51	4,47	13,89
11	Kabupaten Solok Selatan	3.264	3,43	40	3,51	12,25
12	Kabupaten Pasaman Barat	8.289	8,71	138	12,11	16,65
13	Kota Padang	16.954	17,82	141	12,37	8,32
14	Kota Solok	1.426	1,50	10	0,88	7,01
15	Kota Sawahlunto	1.013	1,06	23	2,02	22,70
16	Kota Padang Panjang	1.089	1,14	12	1,05	11,02
17	Kota Bukittinggi	2.427	2,55	12	1,05	4,94
18	Kota Payakumbuh	2.838	2,98	13	1,14	4,58
19	Kota Pariaman	1.680	1,77	32	2,81	19,05
	SUMATERA BARAT	95.125	100,00	1.140	100,00	11,98

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat (diolah)

Dari tabel terlihat bahwa selama tahun 2017, dari 1.000 kelahiran hidup di Provinsi Sumatera Barat, terjadi kematian bayi sebanyak 11-12 bayi. Kematian bayi terbanyak terdapat di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu 31-32 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup.

Angka kematian bayi ini cukup tinggi, dan faktor yang menyebabkannya adalah rendahnya tingkat pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap perawatan kehamilan sesuai standar, rendahnya tingkat pendidikan dan status ekonomi masyarakat terhadap perawatan kehamilan sesuai yang dianjurkan, kurangnya partisipasi keluarga, masyarakat dan lintas program dalam program kesehatan ibu dan anak, belum optimalnya pelayanan kesehatan terhadap ibu, bayi dan balita serta kurangnya kualitas pelayanan kesehatan terhadap ibu, bayi dan balita.

b) Angka Kematian Neonatal (Kematian Bayi Baru Lahir/NNDR)

Kematian Neonatal atau kematian endogen adalah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu bulan atau 28 hari per 1.000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Kematian neonatal atau kematian bayi endogen pada umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa sejak lahir atau selama kehamilan.

Angka kematian neonatal Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 28 berikut ini :

Tabel 28.
Angka Kematian Neonatal (Kematian Bayi Baru Lahir/NNDR)
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Kelahiran Hidup		Kematian Neonatal		AK Neonatal
		Jumlah (Jiwa)	%	Jumlah (Jiwa)	%	
1	Kabupaten Pesisir Selatan	9.047	9,51	31	5,76	3,43
2	Kabupaten Solok	6.904	7,26	59	10,97	8,55
3	Kabupaten Sijunjung	4.245	4,46	39	7,25	9,19
4	Kabupaten Tanah Datar	4.732	4,97	33	6,13	6,97
5	Kabupaten Padang Pariaman	6.566	6,90	15	2,79	2,28
6	Kabupaten Agam	7.489	7,87	46	8,55	6,14
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	6.322	6,65	29	5,39	4,59
8	Kabupaten Pasaman	5.339	5,61	39	7,25	7,30
9	Kabupaten Kepulauan Mentawai	1.830	1,92	23	4,28	12,57
10	Kabupaten Dharmasraya	3.671	3,86	36	6,69	9,81
11	Kabupaten Solok Selatan	3.264	3,43	18	3,35	5,51
12	Kabupaten Pasaman Barat	8.289	8,71	59	10,97	7,12
13	Kota Padang	16.954	17,82	52	9,67	3,07
14	Kota Solok	1.426	1,50	8	1,49	5,61
15	Kota Sawahlunto	1.013	1,06	10	1,86	9,87
16	Kota Padang Panjang	1.089	1,14	10	1,86	9,18
17	Kota Bukittinggi	2.427	2,55	5	0,93	2,06
18	Kota Payakumbuh	2.838	2,98	12	2,23	4,23
19	Kota Pariaman	1.680	1,77	14	2,60	8,33
	SUMATERA BARAT	95.125	100,00	538	100,00	5,66

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat (diolah)

Dari tabel dapat dilihat bahwa dari 1.000 kelahiran hidup di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017, terjadi kematian bayi neonatal sebanyak 5-6 bayi. Kematian bayi neonatal terbanyak terdapat di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu 12-13 kematian bayi dari 1.000 kelahiran hidup.

c) Angka Kematian Post Neo-Natal (Angka Kematian Lepas Baru Lahir/PNNDR)

Kematian Post Neo-Natal (Post Neo-Natal Death Rate) adalah kematian yang terjadi pada bayi yang berumur 1

bulan sampai dengan kurang dari 1 tahun per 1.000 kelahiran hidup selama 1 tahun.

Angka Kematian Post Neo-Natal Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 29 di bawah ini :

Tabel 29.
Angka Kematian Post Neo-Natal (Kematian Lepas Baru Lahir/PNNDR)
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Kelahiran Hidup		Kematian Post Neonatal		AK Post Neonatal
		Jumlah (Jiwa)	%	Jumlah (Jiwa)	%	
1	Kabupaten Pesisir Selatan	9.047	9,51	42	6,98	4,64
2	Kabupaten Solok	6.904	7,26	84	13,95	12,17
3	Kabupaten Sijunjung	4.245	4,46	80	13,29	18,85
4	Kabupaten Tanah Datar	4.732	4,97	46	7,64	9,72
5	Kabupaten Padang Pariaman	6.566	6,90	12	1,99	1,83
6	Kabupaten Agam	7.489	7,87	18	2,99	2,40
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	6.322	6,65	26	4,32	4,11
8	Kabupaten Pasaman	5.339	5,61	12	1,99	2,25
9	Kabupaten Kepulauan Mentawai	1.830	1,92	34	5,65	18,58
10	Kabupaten Dharmasraya	3.671	3,86	15	2,49	4,09
11	Kabupaten Solok Selatan	3.264	3,43	22	3,65	6,74
12	Kabupaten Pasaman Barat	8.289	8,71	79	13,12	9,53
13	Kota Padang	16.954	17,82	89	14,78	5,25
14	Kota Solok	1.426	1,50	2	0,33	1,40
15	Kota Sawahlunto	1.013	1,06	13	2,16	12,83
16	Kota Padang Panjang	1.089	1,14	2	0,33	1,84
17	Kota Bukittinggi	2.427	2,55	7	1,16	2,88
18	Kota Payakumbuh	2.838	2,98	1	0,17	0,35
19	Kota Pariaman	1.680	1,77	18	2,99	10,71
	SUMATERA BARAT	95.125	100,00	602	100,00	6,33

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat (diolah)

Dari Tabel 29 dapat dilihat dari 1.000 kelahiran hidup di Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 terjadi kematian bayi post neo-natal sebanyak 6-7 bayi. Kematian bayi post neo-natal terbanyak terjadi di Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu sebanyak 18-19 kematian bayi dari 1.000 kelahiran hidup.

d) Angka Kematian Anak

Yang dimaksud dengan anak adalah penduduk yang berusia 1 sampai menjelang 5 tahun atau tepatnya 1 tahun sampai dengan 11 bulan 29 hari. Angka kematian anak mencerminkan kondisi kesehatan lingkungan yang langsung mempengaruhi tingkat kesehatan anak. Angka kematian anak juga dipengaruhi oleh tingkat kecukupan gizi, tingginya prevalensi penyakit menular pada anak, atau kecelakaan yang terjadi di dalam/di sekitar rumah.

Tabel 30.
Angka Kematian Anak
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Penduduk Usia 1-4 Tahun pada Pertengahan Tahun		Kematian Anak		AK Anak
		Jumlah (jiwa)	%	Jumlah (jiwa)	%	
1	Kabupaten Pesisir Selatan	27.385	8,70	5	3,94	0,18
2	Kabupaten Solok	20.220	6,43	10	7,87	0,49
3	Kabupaten Sijunjung	13.422	4,27	6	4,72	0,45
4	Kabupaten Tanah Datar	17.198	5,47	14	11,02	0,81
5	Kabupaten Padang Pariaman	23.952	7,61	2	1,57	0,08
6	Kabupaten Agam	27.808	8,84	9	7,09	0,32
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	19.775	6,29	12	9,45	0,61
8	Kabupaten Pasaman	18.202	5,79	6	4,72	0,33
9	Kabupaten Kepulauan Mentawai	4.492	1,43	4	3,15	0,89
10	Kabupaten Dharmasraya	13.837	4,40	9	7,09	0,65
11	Kabupaten Solok Selatan	10.191	3,24	2	1,57	0,20
12	Kabupaten Pasaman Barat	25.211	8,01	15	11,81	0,59
13	Kota Padang	57.278	18,21	19	14,96	0,33
14	Kota Solok	5.137	1,63	3	2,36	0,58
15	Kota Sawahlunto	4.182	1,33	3	2,36	0,72
16	Kota Padang Panjang	3.868	1,23	1	0,79	0,26
17	Kota Bukittinggi	7.669	2,44	1	0,79	0,13
18	Kota Payakumbuh	9.004	2,86	3	2,36	0,33
19	Kota Pariaman	5.766	1,83	3	2,36	0,52
	SUMATERA BARAT	314.590	100,00	127	100,00	0,40

Sumber : DKB II Tahun 2016, DKB II Tahun 2017, dan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat (diolah)

Dari Tabel 30 di atas terlihat bahwa angka kematian anak di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017 adalah 0,40 yang berarti dari 1.000 anak di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017, terdapat 0-1 kematian anak, dimana angka kematian anak tertinggi terdapat di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu sebesar 0,89 (0-1) kematian anak dari 1.000 anak.

e) Angka Kematian Balita

Balita atau bawah lima tahun adalah semua anak termasuk bayi baru lahir berumur 0 tahun sampai dengan menjelang tepat 5 tahun (0-4 tahun). Angka kematian balita adalah jumlah kematian anak 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1.000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu. Angka kematian Balita Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 31.

Dari Tabel 31 tersebut dapat diketahui angka kematian Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 adalah sebesar 1,34, ini berarti bahwa dari 1.000 balita di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017, terjadi kematian balita sebanyak 1-2 balita, dimana angka kematian balita tertinggi terdapat di Kota Sawahlunto dan Kabupaten Tanah Datar yaitu sebesar 2,96 atau 2-3 kematian balita dari 1.000 balita yang ada.

Tabel 31.
Angka Kematian Balita
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Penduduk Usia 1-4 Tahun pada Pertengahan Tahun		Kematian Balita		AK Balita
		Jumlah (Jiwa)	%	Jumlah (Jiwa)	%	
1	Kabupaten Pesisir Selatan	9.047	9,51	5	3,94	0,55
2	Kabupaten Solok	6.904	7,26	10	7,87	1,45
3	Kabupaten Sijunjung	4.245	4,46	6	4,72	1,41
4	Kabupaten Tanah Datar	4.732	4,97	14	11,02	2,96
5	Kabupaten Padang Pariaman	6.566	6,90	2	1,57	0,30
6	Kabupaten Agam	7.489	7,87	9	7,09	1,20
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	6.322	6,65	12	9,45	1,90
8	Kabupaten Pasaman	5.339	5,61	6	4,72	1,12
9	Kabupaten Kepulauan Mentawai	1.830	1,92	4	3,15	2,19
10	Kabupaten Dharmasraya	3.671	3,86	9	7,09	2,45
11	Kabupaten Solok Selatan	3.264	3,43	2	1,57	0,61
12	Kabupaten Pasaman Barat	8.289	8,71	15	11,81	1,81
13	Kota Padang	16.954	17,82	19	14,96	1,12
14	Kota Solok	1.426	1,50	3	2,36	2,10
15	Kota Sawahlunto	1.013	1,06	3	2,36	2,96
16	Kota Padang Panjang	1.089	1,14	1	0,79	0,92
17	Kota Bukittinggi	2.427	2,55	1	0,79	0,41
18	Kota Payakumbuh	2.838	2,98	3	2,36	1,06
19	Kota Pariaman	1.680	1,77	3	2,36	1,79
	SUMATERA BARAT	95.125	100,00	127	100,00	1,34

Sumber : DKB II Tahun 2016, DKB II Tahun 2017, dan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat (diolah)

f) Angka Kematian Ibu (Maternity Mortality Rate/AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan dan tempat persalinan per 100.000 kelahiran hidup. Kematian ini disebabkan karena faktor kehamilan atau komplikasi kehamilan dan kelahiran atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain.

Informasi mengenai tingginya MMR/ AKI akan bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan menjadikan kehamilan yang aman dan bebas resiko tinggi, program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran.

Angka Kematian Ibu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 32 berikut ini :

Tabel 32.
Angka Kematian Ibu (Maternal Mortality Ratio/MMR)
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kelahiran Hidup	Jumlah Kematian Ibu Maternal (Jiwa)				AKI
			Hamil	Bersalin	Nifas	Jumlah	
1	Kabupaten Pesisir Selatan	9.047	-	2	3	5	55,27
2	Kabupaten Solok	6.904	2	1	1	4	57,94
3	Kabupaten Sijunjung	4.245	1	3	2	6	141,34
4	Kabupaten Tanah Datar	4.732	2	1	3	6	126,80
5	Kabupaten Padang Pariaman	6.566	-	2	-	2	30,46
6	Kabupaten Agam	7.489	1	-	9	10	133,53
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	6.322	-	7	1	8	126,54
8	Kabupaten Pasaman	5.339	-	8	1	9	168,57
9	Kabupaten Kepulauan Mentawai	1.830	3	3	-	6	327,87
10	Kabupaten Dharmasraya	3.827	-	7	1	8	209,04
11	Kabupaten Solok Selatan	3.264	2	1	2	5	153,19
12	Kabupaten Pasaman Barat	8.289	6	11	3	20	241,28
13	Kota Padang	16.954	4	4	8	16	94,37
14	Kota Solok	1.426	1	1	-	2	140,25
15	Kota Sawahlunto	1.013	-	-	-	-	-
16	Kota Padang Panjang	1.089	-	3	-	3	275,48
17	Kota Bukittinggi	2.427	-	1	-	1	41,20
18	Kota Payakumbuh	2.838	1	1	1	3	105,71
19	Kota Pariaman	1.680	-	-	1	1	59,52
	SUMATERA BARAT	95.281	23	56	36	115	120,70

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat (diolah)

Dari Tabel 32 terlihat bahwa di Provinsi Sumatera Barat dari 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2017 terjadi 120-121 kematian ibu saat hamil, bersalin, maupun pasca bersalin. Kematian ibu terbesar terjadi di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu sebanyak 327-328 kematian ibu dari 100.000 kelahiran hidup.

b. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas penduduk baik di daerah maupun nasional. Untuk mengukur tingkat kualitas pendidikan suatu daerah, dibutuhkan beberapa data. Database kependudukan dapat memberikan beberapa yang berhubungan dengan informasi perkembangan pendidikan maupun untuk menghitung beberapa indikator untuk mengukur tingkat pencapaian pendidikan di suatu daerah. Data jumlah penduduk menurut usia sekolah SD, SLTP, dan SLTA Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017 dapat dilihat pada Tabel 33 berikut ini :

Tabel 33.
Jumlah Penduduk Menurut Usia Sekolah
Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2017

Usia Pendidikan	Jenis Kelamin (Jiwa)				Total (Jiwa)	
	Laki-Laki		Perempuan			
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Usia SD (7-12 Tahun)	324.631	48,89	302.078	48,74	626.709	48,82
Usia SLTP (13-15 Tahun)	169.836	25,58	158.978	25,65	328.814	25,61
Usia SLTA (16-18 Tahun)	169.554	25,53	158.748	25,61	328.302	25,57
JUMLAH	664.021	100,00	619.804	100,00	1.283.825	100,00

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2017 (diolah)

1) *Angka Partisipasi Kasar (APK)*

Partisipasi sekolah merupakan salah satu ukuran yang digunakan dalam menilai keberhasilan program wajib belajar.

Angka partisipasi sekolah mengukur daya serap sektor pendidikan terhadap penduduk usia sekolah, dimana angka ini memperhitungkan adanya perubahan umur penduduk terutama penduduk umur muda.

Dalam hal ini meningkatnya presentase jumlah murid bukan berarti partisipasi sekolah juga meningkat, karena ukuran perubahan jumlah murid sekolah tidak langsung berpengaruh terhadap partisipasi sekolah.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah murid, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum dimasing-masing tingkat atau jenjang pendidikan.

Tabel Angka Partisipasi Kasar (APK)/Gross Enrollment Ratio Provinsi Sumatera Barat untuk Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 34, dimana dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa APK Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 untuk jenjang pendidikan SD adalah sebesar 106,83 persen, ini berarti pada jenjang pendidikan SD ini banyak anak-anak usia diatas 12 tahun tetapi masih sekolah di tingkat SD/ sederajat atau sebaliknya adanya siswa yang lebih muda dari usia standar (7-12 tahun) yang masuk jenjang pendidikan SD. Hal ini menunjukkan bahwa siswa tersebut masuk sekolah pada usia yang lebih muda. Sementara untuk jenjang pendidikan SLTP dan SLTA APK masih berada di

bawah 100 persen yang berarti jumlah murid usia berapapun yang bersekolah pada jenjang SLTP dan SLTA masih lebih sedikit bila dibandingkan dengan jumlah penduduk pada usia SLTP dan SLTA.

Tabel 34.
Angka Partisipasi Kasar (APK)/Gross Enrollment Ratio
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

Jenjang Pendidikan (Level of Education)	Siswa/Mahasiswa (Pupils/Student)	Penduduk (Population)	APK (GER)
SD/Primary School	669.511	626.709	106,83
a. SD	640.046		
b. SLB	4.532		
c. MI	22.677		
d. Paket A	1.970		
e. ULA	286		
SLTP/Junior SS	315.469	328.814	95,94
a. SMP	218.400		
b. SLB	1.130		
c. MTs	89.150		
d. Paket B	4.670		
e. Wustha	2.119		
SLTA/Senior SS	273.259	328.302	83,23
a. SMA	145.361		
b. SLB	506		
c. MA	32.184		
d. SMK	86.638		
e. Paket C	8.168		
f. Ulya	402		

Sumber : DKB II Tahun 2017, Kemendikbud dan Kemenag (diolah)

2) *Angka Partisipasi Murni (APM)*

Angka Partisipasi Murni adalah persentase siswa dengan umur yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama.

Angka Partisipasi Murni ini dapat menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah pada tingkat pendidikan tertentu. Seperti halnya APK, APM juga merupakan indikator

daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Namun APM merupakan merupakan indikator daya serap yang lebih baik dibandingkan APK, karena melihat atau menunjukan partisipasi penduduk pada kelompok usia standar pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar kelompok umurnya.

Angka Partisipasi Murni (APM)/Net Enrollment Ratio (NER) Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 35 berikut ini :

Tabel 35.
Angka Partisipasi Murni (APM)/Net Enrollment Ratio
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

Jenjang Pendidikan (Level of Education)	Siswa/Mahasiswa (Pupils/Student)	Penduduk (Population)	APM (NER)
SD/Primary School	585.220	626.709	93,38
a. SD	563.008		
b. SLB	2.677		
c. MI	19.185		
d. Paket A	137		
e. ULA	213		
SLTP/Junior SS	235.048	328.814	71,48
a. SMP	170.397		
b. SLB	896		
c. MTs	61.870		
d. Paket B	498		
e. Wustha	1.387		
SLTA/Senior SS	206.042	328.302	62,76
a. SMA	114.183		
b. SLB	474		
c. MA	22.213		
d. SMK	68.045		
e. Paket C	818		
f. Ulya	309		

Sumber : DKB II Tahun 2017, Kemendikbud, dan Kemenag (diolah)

Dari Tabel 35 dapat diketahui bahwa APM Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017 untuk jenjang pendidikan SD/Sederajat adalah 93,38 persen, artinya bahwa dari 100 penduduk usia 7-12

tahun 93 orang bersekolah dibangku SD/Sederajat. APM penduduk usia 13-15 tahun yang duduk dibangku SLTP/Sederajat sebesar 71,48 persen dan lebih tinggi dibandingkan dengan partisipasi SLTA yang hanya sebesar 62,76 persen. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi murid yang tinggal kelas atau terlalu cepat sekolah.

3) *Angka Putus Sekolah (APS)*

Angka Putus Sekolah murid menyajikan presentase murid yang putus sekolah menurut jenjang pendidikan.

Angka Putus Sekolah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 tersaji dalam Tabel 36 di bawah ini :

Tabel 36.
Angka Putus Sekolah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

Jenjang Pendidikan	Jumlah Murid	Jumlah Murid Putus Sekolah	Angka Putus Sekolah (APS)
SD	669.511	777	0,12
SLTP	315.469	575	0,18
SLTA	273.259	1.100	0,40

Sumber : Kemdikbud, Kemenag, dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat (diolah)

c. **Ekonomi**

Indonesia telah meratifikasi ketentuan Pasal 2 ayat (1) ILO Convention No. 138 concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 yang menetapkan bahwa batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja yang diberlakukan di wilayah Republik Indonesia adalah 15 (lima belas) tahun.

Ketentuan ini telah diaplikasikan dalam penyusunan statistik terkait ketenagakerjaan sehingga berdasarkan statistik dan indeks pembangunan ketenagakerjaan yang diterbitkan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Angkatan Kerja didefinisikan sebagai penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

1) Jumlah Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja (Bekerja dan Menganggur/Pencari Kerja

a) Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja

Tenaga kerja (Manpower) adalah seluruh penduduk dalam usia kerja (15 tahun keatas) yang potensial dapat memproduksi barang dan jasa.

Indikator ini berguna sebagai wacana pengambil kebijakan dalam menyusun rencana ketenagakerjaan. Disamping itu juga untuk mengetahui berapa banyak tenaga kerja (penduduk usia kerja) potensial.

Penghitungan persentase tenaga kerja dilaksanakan dengan membandingkan antara jumlah penduduk usia 15 tahun keatas (usia kerja) dengan jumlah penduduk keseluruhan.

Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 37 di bawah ini, dimana pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa persentase tenaga kerja di Provinsi Sumatera Barat kondisi per 31 Desember 2017 adalah sebesar 74,91 persen dari jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 37.
Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja
Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2017

No	Kabupaten/Kota	Usia Kerja (15 Tahun Keatas)	Jumlah Penduduk	Persen Naker
1	Kabupaten Pesisir Selatan	393,776	519,522	75.80
2	Kabupaten Solok	285,121	377,292	75.57
3	Kabupaten Sijunjung	172,860	234,915	73.58
4	Kabupaten Tanah Datar	285,821	367,754	77.72
5	Kabupaten Padang Pariaman	348,767	464,560	75.07
6	Kabupaten Agam	400,992	526,841	76.11
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	284,075	375,478	75.66
8	Kabupaten Pasaman	233,000	316,620	73.59
9	Kabupaten Kep. Mentawai	61,296	85,669	71.55
10	Kabupaten Dharmasraya	151,855	207,883	73.05
11	Kabupaten Solok Selatan	133,882	178,687	74.93
12	Kabupaten Pasaman Barat	312,417	429,904	72.67
13	Kota Padang	668,831	887,675	75.35
14	Kota Solok	51,704	71,723	72.09
15	Kota Sawahlunto	48,283	65,042	74.23
16	Kota Padang Panjang	41,186	56,562	72.82
17	Kota Bukittinggi	87,554	119,183	73.46
18	Kota Payakumbuh	99,340	135,209	73.47
19	Kota Pariaman	67,693	90,727	74.61
	SUMATERA BARAT	4,128,453	5,511,246	74.91

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2017 (diolah)

Ini berarti bahwa jumlah tenaga kerja tersebut harus diikuti permintaan tenaga kerja (kesempatan kerja) yang cukup pula, agar tidak akan terjadi pengangguran yang cukup besar. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota harus memikirkan tersedianya kesempatan kerja ini di masing-masing daerahnya.

b) Jumlah dan Proporsi Angkatan Kerja (Bekerja dan Menganggur/ Pencari Kerja)

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (berumur 15 tahun keatas) yang selama seminggu sebelum pencacahan,

bekerja atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja dan mereka yang tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan. Jumlah dan Proporsi Angkatan Kerja (Bekerja dan Menganggur/Pencari Kerja) ini dapat dilihat pada Tabel 38 berikut ini :

Tabel 38.
Jumlah dan Proporsi Angkatan Kerja
Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2017

No	Kabupaten/Kota	Angkatan Kerja (Jiwa)			Jumlah Tenaga Kerja
		Bekerja	Pencari Kerja	Jumlah Angker	
1	Kabupaten Pesisir Selatan	191,709	12,128	203,837	393,776
2	Kabupaten Solok	161,742	10,422	172,164	285,121
3	Kabupaten Sijunjung	104,130	3,578	107,708	172,860
4	Kabupaten Tanah Datar	160,026	6,183	166,209	285,821
5	Kabupaten Padang Pariaman	169,769	12,095	181,864	348,767
6	Kabupaten Agam	216,687	9,581	226,268	400,992
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	188,957	5,045	194,002	284,075
8	Kabupaten Pasaman	121,924	8,914	130,838	233,000
9	Kabupaten Kep. Mentawai	43,354	865	44,219	61,296
10	Kabupaten Dharmasraya	101,690	3,953	105,643	151,855
11	Kabupaten Solok Selatan	74,140	4,345	78,485	133,882
12	Kabupaten Pasaman Barat	187,103	7,783	194,886	312,417
13	Kota Padang	383,818	39,844	423,662	668,831
14	Kota Solok	30,226	1,889	32,115	51,704
15	Kota Sawahlunto	29,127	1,922	31,049	48,283
16	Kota Padang Panjang	22,264	1,279	23,543	41,186
17	Kota Bukittinggi	56,121	4,185	60,306	87,554
18	Kota Payakumbuh	64,612	2,307	66,919	99,340
19	Kota Pariaman	37,573	2,385	39,958	67,693
	SUMATERA BARAT	2,344,972	138,703	2,483,675	4,128,453

Sumber : DKB Semester II 2017 dan Dinas Nakertrans Provinsi Sumatera Barat (diolah)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah angkatan kerja Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017 adalah sebesar 2.483.675 jiwa dengan jumlah angkatan kerja terbanyak berada di Kota Padang yaitu sebesar 423.662 jiwa dan angkatan kerja terkecil berada di Kota Padang Panjang

sebanyak 23.543 jiwa. Untuk penduduk bekerja dan pencari kerja, jumlah terbanyak juga berada di Kota Padang yaitu masing-masing sebesar 383.818 dan 39.844 jiwa. Sementara itu untuk jumlah penduduk bekerja terkecil berada di Kota Padang Panjang sebesar 22.264 dan jumlah pencari kerja terkecil berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan jumlah hanya sebanyak 865 jiwa.

2) *Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK)*

Angka partisipasi angkatan kerja menyajikan data yang menggambarkan banyaknya angkatan kerja, yaitu penduduk yang sedang bekerja dan yang mencari pekerjaan dari penduduk usia 15 tahun keatas terhadap penduduk usia 15 tahun keatas.

Indikator ini bermanfaat untuk mengetahui bagian dari tenaga kerja yang benar-benar terlibat atau berusaha terlibat dalam kegiatan produktif yang dapat menghasilkan barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu.

Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017 dapat dilihat pada Tabel 39 dimana dari hasil perhitungan diperoleh APAK Provinsi Sumatera Barat sebesar 60,16 persen, artinya 60,16 persen penduduk usia 15 tahun keatas tahun yang terlibat atau berusaha terlibat (mencari pekerjaan) dalam kegiatan produktif. Semakin tinggi APAK berarti semakin banyak penduduk usia kerja yang terlibat atau berusaha terlibat dalam kegiatan produktif.

Dari Tabel 39 terlihat bahwa penduduk yang berumur 15-19 tahun mempunyai APAK paling rendah yaitu sebesar 26,86 persen, sedangkan penduduk yang berumur 50-54 tahun memiliki APAK paling tinggi yaitu sebesar 81,11 persen.

Tabel 39.
Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK)
Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2017

Kelompok Umur (Tahun)	Angkatan Kerja (Jiwa)			Jumlah Bukan Angker	Jumlah Tenaga Kerja	APAK
	Bekerja	Pencari Kerja	Jumlah Angker			
15-19	109,658	34,501	144,159	392,604	536,763	26.86
20-24	197,840	52,067	249,907	250,471	500,378	49.94
25-29	229,515	18,714	248,229	177,425	425,654	58.32
30-34	305,094	7,259	312,353	131,539	443,892	70.37
35-39	315,225	6,883	322,108	98,024	420,132	76.67
40-44	282,607	4,532	287,139	87,265	374,404	76.69
45-49	252,987	3,743	256,730	72,705	329,435	77.93
50-54	227,821	2,592	230,413	53,667	284,080	81.11
55-59	182,534	4,857	187,391	70,480	257,871	72.67
> 60	241,691	3,555	245,246	310,598	555,844	44.12
JUMLAH	2,344,972	138,703	2,483,675	1,644,778	4,128,453	60.16

Sumber : DKB Semester II 2017 dan Dinas Nakertrans Provinsi Sumatera Barat (diolah)

3) *Jumlah dan Proporsi Penduduk yang Bekerja menurut Jenis Pekerjaan*

Indikator ini menunjukkan proporsi penduduk yang bekerja menurut jenis pekerjaan terhadap jumlah penduduk yang bekerja di setiap lapangan pekerjaan.

Proporsi penduduk yang bekerja menurut jenis pekerjaan menunjukkan distribusi atau penyebaran penduduk yang bekerja di suatu daerah pada waktu tertentu.

Indikator ini berguna untuk membantu pemerintah daerah dalam memfokuskan kebijakan ketenagakerjaan.

Jumlah dan Proporsi Penduduk yang Bekerja menurut Jenis Pekerjaan dapat dilihat pada Tabel 40, dimana dapat diketahui bahwa persentase jenis pekerjaan terbanyak yang menjadi sumber pendapatan penduduk Sumatera Barat adalah

wiraswasta sebesar 52,10 persen, diikuti oleh jenis pekerjaan pertanian/peternakan sebesar 34,92 persen.

Dari proporsi jenis pekerjaan tersebut, dapat dilihat bahwa penduduk Sumatera Barat memiliki karakteristik tersendiri dalam memilih pekerjaan sebagai sumber pendapatannya yaitu pekerjaan yang membutuhkan keterampilan individu dan tidak banyak bergantung pada orang lain. Kebanyakan pekerjaan seperti ini merupakan pekerjaan dibidang yang menawarkan jasa dan perdagangan. Namun demikian, dengan persentase yang relatif masih cukup besar yaitu lebih dari sepertiga penduduk bekerja yang memiliki jenis pekerjaan di bidang pertanian/peternakan, maka dapat juga dikatakan masyarakat Sumatera Barat masih merupakan bagian dari masyarakat agraris.

Jika dilihat proporsi per wilayah Kabupaten/Kota jenis pekerjaan yang menjadi sumber penghasilan penduduk untuk wilayah Kabupaten lebih banyak didominasi oleh penduduk yang memiliki pekerjaan di bidang pertanian/peternakan, selanjutnya diikuti oleh penduduk yang memiliki jenis pekerjaan wiraswasta. Sementara di tujuh Kota yang ada di Sumatera Barat, penduduknya lebih banyak memiliki jenis pekerjaan sebagai wiraswasta dan aparatur pejabat negara. Artinya di daerah perkotaan penduduk sudah mulai meninggalkan jenis pekerjaan yang bersifat agraris, kecuali di dua daerah kota yaitu Sawahlunto sebesar 15,78 persen dan Payakumbuh sebesar 15,53 persen penduduknya relatif masih cukup banyak yang memiliki jenis pekerjaan di bidang pertanian/peternakan.

**PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

2017

KODE	KABUPATEN/KOTA	Jumlah Penduduk Bekerja (Jiwa)	Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan															
			Aparatur/ Pejabat Negara		Tenaga Pengajar		Wiraswasta		Pertanian/ Peternakan		Nelayan		Agama/ Kepercayaan		Kesehatan		Lainnya	
			Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%
1301	Kabupaten Pesisir Selatan	156.332	9.851	6,30	2.807	1,80	57.338	36,68	75.753	48,46	9.746	6,23	88	0,06	653	0,42	96	0,06
1302	Kabupaten Solok	120.723	7.285	6,03	1.619	1,34	48.371	40,07	62.963	52,15	148	0,12	30	0,02	305	0,25	2	0,00
1303	Kabupaten Sijunjung	77.481	4.887	6,31	1.539	1,99	28.426	36,69	42.176	54,43	28	0,04	44	0,06	343	0,44	38	0,05
1304	Kabupaten Tanah Datar	123.441	9.085	7,36	2.619	2,12	62.795	50,87	47.964	38,86	281	0,23	111	0,09	514	0,42	72	0,06
1305	Kabupaten Padang Pariaman	139.994	7.907	5,65	1.432	1,02	93.074	66,48	35.189	25,14	1.467	1,05	427	0,31	485	0,35	13	0,01
1306	Kabupaten Agam	174.493	11.626	6,66	3.709	2,13	101.257	58,03	55.509	31,81	1.560	0,89	145	0,08	659	0,38	28	0,02
1307	Kabupaten Lima Puluh Kota	122.514	8.053	6,57	1.184	0,97	52.912	43,19	59.950	48,93	48	0,04	51	0,04	297	0,24	19	0,02
1308	Kabupaten Pasaman	128.084	6.107	4,77	1.289	1,01	42.729	33,36	77.515	60,52	26	0,02	33	0,03	379	0,30	6	0,00
1309	Kabupaten Kep. Mentawai	25.442	2.254	8,86	578	2,27	5.845	22,97	14.956	58,78	1.437	5,65	176	0,69	188	0,74	8	0,03
1310	Kabupaten Dharmasraya	72.487	4.322	5,96	1.461	2,02	38.525	53,15	27.684	38,19	15	0,02	29	0,04	435	0,60	16	0,02
1311	Kabupaten Solok Selatan	58.653	4.299	7,33	571	0,97	24.705	42,12	28.691	48,92	13	0,02	20	0,03	305	0,52	49	0,08
1312	Kabupaten Pasaman Barat	142.662	6.727	4,72	2.666	1,87	49.319	34,57	77.982	54,66	5.019	3,52	52	0,04	821	0,58	76	0,05
1371	Kota Padang	291.162	46.460	15,96	11.828	4,06	214.539	73,68	10.389	3,57	4.670	1,60	287	0,10	2.866	0,98	123	0,04
1372	Kota Solok	23.862	4.812	20,17	517	2,17	16.541	69,32	1.739	7,29	5	0,02	24	0,10	224	0,94	0	0,00
1373	Kota Sawahlunto	21.733	3.416	15,72	308	1,42	14.380	66,17	3.429	15,78	3	0,01	18	0,08	143	0,66	36	0,17
1374	Kota Padang Panjang	19.270	3.547	18,41	1.019	5,29	13.239	68,70	1.175	6,10	6	0,03	31	0,16	246	1,28	7	0,04
1375	Kota Bukittinggi	41.968	6.175	14,71	1.830	4,36	32.261	76,87	1.082	2,58	17	0,04	52	0,12	543	1,29	8	0,02
1376	Kota Payakumbuh	44.653	7.001	15,68	1.535	3,44	28.838	64,58	6.934	15,53	8	0,02	39	0,09	297	0,67	1	0,00
1377	Kota Pariaman	28.195	4.736	16,80	696	2,47	19.499	69,16	1.990	7,06	980	3,48	41	0,15	242	0,86	11	0,04
	SUMATERA BARAT	1.813.149	158.550	8,74	39.207	2,16	944.593	52,10	633.070	34,92	25.477	1,41	1.698	0,09	9.945	0,55	609	0,03

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2017 (diolah)

Tabel 40. Jumlah dan Proporsi Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2017

4) Pengangguran Terbuka

Pengangguran Terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan, atau mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Angka pengangguran terbuka berguna sebagai acuan bagi pemerintah dalam pembukaan lapangan kerja baru. Disamping itu, *trend* indikator ini akan menunjukkan keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun.

Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017 dapat dilihat pada Tabel 41 berikut ini :

Tabel 41.
Tingkat Pengangguran Terbuka
Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2017

Kelompok Umur (Tahun)	Angkatan Kerja (Jiwa)			Jumlah Bukan Angker	Jumlah Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka
	Bekerja	Pencari Kerja	Jumlah Angker			
15-19	109,658	34,501	144,159	392,604	536,763	23.93
20-24	197,840	52,067	249,907	250,471	500,378	20.83
25-29	229,515	18,714	248,229	177,425	425,654	7.54
30-34	305,094	7,259	312,353	131,539	443,892	2.32
35-39	315,225	6,883	322,108	98,024	420,132	2.14
40-44	282,607	4,532	287,139	87,265	374,404	1.58
45-49	252,987	3,743	256,730	72,705	329,435	1.46
50-54	227,821	2,592	230,413	53,667	284,080	1.12
55-59	182,534	4,857	187,391	70,480	257,871	2.59
> 60	241,691	3,555	245,246	310,598	555,844	1.45
JUMLAH	2,344,972	138,703	2,483,675	1,644,778	4,128,453	5.58

Sumber : DKB Semester II 2017 dan Dinas Nakertrans Provinsi Sumatera Barat (diolah)

Besarnya angka pengangguran terbuka mempunyai implikasi sosial yang luas karena mereka yang tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan. Semakin tinggi angka pengangguran terbuka, maka akan semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkan, seperti kriminalitas. Dan sebaliknya apabila angka pengangguran terbuka semakin rendah, maka akan semakin stabil kondisi sosial dalam masyarakat. Pada Tabel 41 terlihat bahwa tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Barat sebesar 5,58 persen, artinya 5,58 persen penduduk berusia 15 tahun keatas berusaha terlibat di dalam kegiatan produktif. Angka pengangguran terbesar terlihat pada kelompok umur 15-19 tahun yaitu sebesar 23,93 persen, sedangkan yang terkecil adalah pada kelompok umur 50-54 tahun yaitu sebesar 1,12 persen.

d. Sosial

1) *Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial*

Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017 ini dapat dilihat pada Tabel 42, berikut ini :

PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN PROVINSI SUMATERA BARAT

2017

No	Jenis PMKS	Kabupaten												Kota							Jumlah
		Pessel	Solok	Sijunjung	T.Datar	P. Prmn	Agam	50 Kota	Pasaman	Mentawai	Drmsrya	Solsel	Pasbar	Padang	Solok	Swlunto	P.Panjang	B.Tinggi	Pykbmh	Prmn	
1	Anak Balita Terlantar	137	106	2.443	23	91	93	116	-	37	97	2	86	15	4	18	1	45	16	61	3.391
2	Anak Terlantar	1.357	463	9.266	154	455	623	1.300	361	46	245	114	372	834	672	36	24	580	62	237	17.201
3	Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	9	7	15	22	6	10	9	2	3	25	4	10	97	6	1	1	4	10	8	249
4	Anak Jalanan	-	1	-	-	9	29	5	2	25	1	-	14	710	4	-	-	25	5	8	838
5	Anak Dengan Kedisabilitas	506	299	211	247	635	440	874	288	97	133	60	135	1.016	-	120	60	134	165	98	5.518
6	Anak Korban Tindak Kekerasan	-	36	7	426	154	11	3	-	-	1	-	21	15	-	-	-	32	2	1	709
7	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	56	30	50	16	91	12	159	2	-	-	-	6	798	-	4	-	4	3	1	1.232
8	Lanjut Usia Terlantar	3.118	1.885	3.206	3.625	3.875	3.365	6.810	3.714	3.673	491	1.472	788	1.303	532	506	324	1.908	220	444	41.259
9	Penyandang Disabilitas	1.276	654	727	1.300	2.181	1.983	2.068	1.145	423	457	438	654	1.865	304	491	183	390	277	459	17.275
10	Tuna Susila	-	41	6	-	16	5	58	-	-	-	-	17	143	8	-	-	5	1	1	301
11	Gelandangan	-	30	-	30	-	20	14	5	-	-	-	22	159	3	-	1	-	1	1	286
12	Pengemis	11	56	15	10	-	32	24	37	-	7	-	12	210	15	3	4	9	15	17	477
13	Pemulung	17	12	5	7	-	37	2	3	2	-	-	22	75	85	5	10	83	62	52	479
14	Kelompok Minoritas	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	15	99	-	-	-	7	3	-	134
15	Bekas Warga Binaan Lapas (BWBLP)	1	99	27	81	243	66	140	12	-	35	-	38	370	93	17	-	15	48	31	1.316
16	Orang Dengan HIV/AIDS	-	4	12	1	60	-	9	-	-	-	-	-	400	-	-	-	36	2	1	525
17	Korban Penyalahgunaan Napza	5	55	52	29	105	17	107	-	1	6	-	51	390	35	2	3	470	39	16	1.383
18	Korban Trafficking	-	36	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	54
19	Korban Tindak Kekerasan	-	63	525	58	14	2	290	36	-	-	-	22	20	8	6	-	-	7	3	1.054
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	-	20	89	16	-	2	46	-	-	6	-	3	-	-	-	-	-	2	1	185
21	Korban Bencana Alam	-	1.033	949	104	2.195	70	413	2.250	-	-	2.022	125	78	-	75	-	1.137	1	34	10.486
22	Korban bencana Sosial	-	-	37	171	8	194	14	15	-	14	50	43	700	-	50	-	-	7	2	1.305
23	Perempuan Rawan Sosial	3.531	1.480	3.100	1.448	3.302	1.358	2.528	1.131	529	502	1.319	1.294	95	158	462	278	820	491	755	24.581
24	Fakir Miskin	21.868	20.545	10.799	16.771	19.615	23.612	22.451	18.174	9.273	8.609	8.269	23.987	27.427	2.256	1.003	2.123	5.508	5.745	2.983	251.018
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	25	135	13	20	90	47	375	153	-	7	-	21	33	96	9	1	-	7	26	1.058
26	Komunitas Adat Terpencil	-	-	-	-	-	-	50	776	2.460	78	-	302	-	-	-	-	-	-	-	3.666
	SUMATERA BARAT	31.917	27.090	31.554	24.559	33.146	2.030	37.875	28.106	16.569	10.714	13.750	28.060	36.867	4.279	2.808	3.013	11.212	7.191	5.240	385.980

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat

Tabel 42. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2017

2) Proporsi Penduduk Penyandang Cacat

Indikator ini menguraikan jumlah dan proporsi penyandang cacat dirinci menurut jenis kelamin dan kelompok umur. Jumlah penduduk penyandang cacat Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017 dapat dilihat pada Tabel 43, yang menunjukkan bahwa dari seluruh penduduk penyandang cacat di Provinsi Sumatera Barat, penduduk penyandang cacat mental/jiwa adalah yang terbanyak yaitu sebesar 1.354 jiwa (27,05 persen), diikuti oleh penyandang cacat fisik sebanyak 1.178 jiwa (23,53 persen), sedangkan yang terkecil adalah penyandang cacat lainnya yaitu sebesar 423 jiwa (8,45 persen).

Tabel 43.
Jumlah Penduduk Penyandang Cacat Menurut Jenis Kelamin
Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2017

No	Jenis Kecacatan	Jenis Kelamin (Jiwa)				Total (Jiwa)	
		Laki-Laki		Perempuan			
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Cacat Fisik	686	23,61	492	23,42	1.178	23,53
2	Cacat Netra/Buta	274	9,43	210	10,00	484	9,67
3	Cacat Rungu/Wicara	487	16,76	475	22,61	962	19,22
4	Cacat Mental/Jiwa	865	29,78	489	23,27	1.354	27,05
5	Cacat Fisik dan Mental	348	11,98	257	12,23	605	12,09
6	Cacat Lainnya	245	8,43	178	8,47	423	8,45
	JUMLAH	2.905	100,00	2.101	100,00	5.006	100,00

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2017 (diolah)

Sementara itu, untuk Angka Penyandang Cacat (APC) Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017 berdasarkan Kabupaten/ Kota dapat dilihat pada Tabel 44 di bawah, dimana angka penduduk penyandang cacat di Provinsi Sumatera Barat sebesar 0,09 persen, artinya bahwa sebagian kecil penduduk di Provinsi Sumatera Barat yang menyandang cacat. Namun ini tetap harus

menjadi perhatian pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk tetap memberikan pelayanan sosial bagi mereka. Bila diklasifikasikan menurut Kabupaten/Kota, maka angka penyandang cacat terbesar berada di Kota Sawahlunto yaitu sebesar 0,32 persen, diikuti oleh Kota Pariaman sebesar 0,23 persen dan Kota Solok sebesar 0,20 persen. Sedangkan angka penyandang cacat yang terkecil berada di Kota Payakumbuh yang hanya sebesar 0,01 persen diikuti oleh Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 0,03 persen serta Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Padang Pariaman sebesar 0,04 persen.

Tabel 44.
Angka Penyandang Cacat Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2017

No	Kabupaten/Kota	Jenis Kecacatan (Jiwa)						Jumlah Penduduk	APC
		Cacat Fisik	Cacat Netra/ Buta	Cacat Rungu/ Wicara	Cacat Mental/ Jiwa	Cacat Fisik & Mental	Cacat Lainnya		
1	Kabupaten Pesisir Selatan	59	17	35	50	19	22	519.522	0,04
2	Kabupaten Solok	66	30	38	79	42	17	377.292	0,07
3	Kabupaten Sijunjung	72	40	81	54	45	26	234.915	0,14
4	Kabupaten Tanah Datar	171	53	120	226	79	30	367.754	0,18
5	Kabupaten Padang Pariaman	43	17	24	52	24	6	464.560	0,04
6	Kabupaten Agam	140	36	57	163	48	22	526.841	0,09
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	22	11	21	41	11	13	375.478	0,03
8	Kabupaten Pasaman	133	82	132	178	76	19	316.620	0,20
9	Kabupaten Kepulauan Mentawai	22	7	12	15	8	9	85.669	0,09
10	Kabupaten Dharmasraya	17	10	32	15	15	10	207.883	0,05
11	Kabupaten Solok Selatan	22	12	29	17	20	3	178.687	0,06
12	Kabupaten Pasaman Barat	46	28	40	60	27	32	429.904	0,05
13	Kota Padang	204	63	208	217	102	140	887.675	0,11
14	Kota Solok	31	14	37	39	14	10	71.723	0,20
15	Kota Sawahlunto	41	12	45	50	29	34	65.042	0,32
16	Kota Padang Panjang	20	9	14	13	5	6	56.562	0,12
17	Kota Bukittinggi	12	16	7	24	5	11	119.183	0,06
18	Kota Payakumbuh	2	1	2	2	3	1	135.209	0,01
19	Kota Pariaman	55	26	28	59	33	12	90.727	0,23
	SUMATERA BARAT	1.178	484	962	1.354	605	423	5.511.246	0,09

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2017 (diolah)

3. Mobilitas Penduduk

Migrasi penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah administrasi lainnya, yang merefleksikan perbedaan pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan fasilitas pembangunan antara satu daerah dengan daerah lain.

Analisis tentang migrasi atau mobilitas penduduk merupakan indikator yang penting bagi terlaksananya pembangunan manusia seutuhnya. Tingkat mobilitas penduduk baik mobilitas permanen maupun non permanen akan tampak nyata pada satuan unit administrasi yang lebih kecil dari Provinsi, sehingga analisis mobilitas akan lebih baik bila dilakukan pada wilayah administrasi setingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan maupun Desa/Kelurahan.

Berkaitan dengan arus migrasi, indikator yang digunakan dalam perhitungannya adalah :

- 1) Migrasi Masuk (Mi)
- 2) Migrasi Keluar (Mo)
- 3) Migrasi Neto (Mn)
- 4) Migrasi Bruto (Mb)
- 5) Persentase migrasi dari perdesaan ke perkotaan

Ukuran-ukuran indikator tersebut bermanfaat untuk mengetahui apakah suatu daerah (Kabupaten/Kota merupakan daerah yang memiliki daya tarik bagi penduduk di wilayah sekitarnya atau wilayah lainnya untuk melakukan migrasi. Sebaliknya juga menunjukkan apakah suatu daerah, karena berbagai keterbatasan sumber daya, adanya tekanan atau alasan-alasan tertentu menjadi faktor pendorong bagi penduduk di wilayahnya untuk berpindah ke daerah lain. Angka migrasi biasanya dihitung menurut kelompok umur dan jenis kelamin.

a. Angka Migrasi Masuk (in-migration/Mi)

Angka yang menunjukkan banyaknya yang masuk per 1.000 penduduk di suatu Kabupaten/Kota tujuan dalam waktu satu tahun. Angka Migrasi Masuk per Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 45 berikut ini :

Tabel 45.
Angka Migrasi Masuk Per Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Angka Migrasi Masuk
		Pada Pertengahan Tahun	Migrasi Masuk	
1	Kabupaten Pesisir Selatan	518.121	68.664	132,53
2	Kabupaten Solok	375.984	2.728	7,26
3	Kabupaten Sijunjung	233.832	3.982	17,03
4	Kabupaten Tanah Datar	366.397	5.398	14,73
5	Kabupaten Padang Pariaman	462.651	7.780	16,82
6	Kabupaten Agam	525.088	13.341	25,41
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	374.214	3.984	10,65
8	Kabupaten Pasaman	315.575	19.081	60,46
9	Kabupaten Kep. Mentawai	84.468	842	9,97
10	Kabupaten Dharmasraya	206.016	2.093	10,16
11	Kabupaten Solok Selatan	177.809	1.593	8,96
12	Kabupaten Pasaman Barat	428.631	11.675	27,24
13	Kota Padang	884.402	9.316	10,53
14	Kota Solok	69.833	1.526	21,85
15	Kota Sawahlunto	64.574	1.270	19,67
16	Kota Padang Panjang	54.749	1.305	23,84
17	Kota Bukittinggi	117.411	1.861	15,85
18	Kota Payakumbuh	132.286	2.804	21,20
19	Kota Pariaman	89.722	2.229	24,84

Sumber : DKB II Tahun 2016, DKB II Tahun 2017, dan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota (diolah)

Dari tabel dapat diketahui bahwa angka migrasi masuk tertinggi berada di Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 132,53 yang berarti ada sebanyak 132-133 orang penduduk yang masuk ke Kabupaten Pesisir Selatan per 1.000 penduduk yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Sementara itu, angka migrasi masuk terendah berada di

Kabupaten Solok yaitu hanya sebesar 7,26, ini berarti hanya sebanyak 7-8 orang penduduk yang masuk ke Kabupaten Solok dari 1.000 penduduk yang ada di Kabupaten Solok.

Tingginya angka migrasi masuk ke Kabupaten Pesisir Selatan ini disebabkan karena Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu Kabupaten yang wilayahnya menjadi lokasi transmigrasi. Sementara rendahnya angka migrasi masuk ke Kabupaten Solok disebabkan karena lokasi wilayah Kabupaten Solok berdekatan dengan 3 (tiga) Kota yaitu Kota Padang, Kota Solok dan Kota Sawahlunto sebagaimana dipahami daerah yang berupa Kota memiliki daya tarik bagi penduduk untuk melakukan migrasi baik dalam mencari pekerjaan, melakukan usaha yang bersifat jasa dan perdagangan, dan akses pendidikan yang lebih berkualitas.

b. Angka Migrasi Keluar (out-migration/Mo)

Angka yang menunjukkan banyaknya migran keluar dari suatu Kabupaten/Kota per 1.000 penduduk daerah asal dengan waktu satu tahun. Angka Migrasi Keluar per Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 46, dimana angka migrasi keluar terbesar sebagaimana terlihat pada tabel tersebut juga terdapat pada Kabupaten Pesisir Selatan yaitu sebesar 95,56, dimana ini berarti ada sebanyak 95-96 orang penduduk yang keluar dari Kabupaten Pesisir Selatan dari 1.000 penduduk yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, sedangkan angka migrasi keluar terkecil berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 4,45, dimana berarti 4-5 orang penduduk yang keluar (pindah) dari Kabupaten Kepulauan Mentawai dari 1.000 penduduk yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Tingginya angka migrasi keluar dari Kabupaten Pesisir Selatan ini disebabkan karena tingginya keinginan penduduk Pesisir Selatan untuk meraih tingkat upah yang lebih tinggi, mendapatkan fasilitas pendidikan yang lebih baik, dan merantau ke tempat sanak saudara yang telah berhasil (faktor budaya) di tempat tujuan di luar Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 46.
Angka Migrasi Keluar Per Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Angka Migrasi Keluar
		Pada Pertengahan Tahun	Migrasi Keluar	
1	Kabupaten Pesisir Selatan	518.121	49.512	95,56
2	Kabupaten Solok	375.984	7.270	19,34
3	Kabupaten Sijunjung	233.832	5.812	24,86
4	Kabupaten Tanah Datar	366.397	7.191	19,63
5	Kabupaten Padang Pariaman	462.651	12.316	26,62
6	Kabupaten Agam	525.088	15.606	29,72
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	374.214	4.840	12,93
8	Kabupaten Pasaman	315.575	19.477	61,72
9	Kabupaten Kep. Mentawai	84.468	376	4,45
10	Kabupaten Dharmasraya	206.016	7.342	35,64
11	Kabupaten Solok Selatan	177.809	2.171	12,21
12	Kabupaten Pasaman Barat	428.631	4.272	9,97
13	Kota Padang	884.402	10.183	11,51
14	Kota Solok	69.833	1.659	23,76
15	Kota Sawahlunto	64.574	1.310	20,29
16	Kota Padang Panjang	54.749	1.342	24,51
17	Kota Bukittinggi	117.411	2.906	24,75
18	Kota Payakumbuh	132.286	2.700	20,41
19	Kota Pariaman	89.722	2.331	25,98

Sumber : DKB II Tahun 2016, DKB II Tahun 2017, dan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota (diolah)

Sementara rendahnya angka migrasi keluar dari Kabupaten Kepulauan Mentawai disebabkan oleh faktor geografis berupa Kabupaten yang terdiri dari kepulauan sehingga penduduknya membutuhkan biaya yang lebih besar untuk melakukan migrasi

keluar, karena akses perhubungan dan sarana transportasi yang kurang memadai baik kuantitas dan kualitas. Selain itu tingkat pendidikan yang rendah juga mempengaruhi keputusan untuk melakukan migrasi keluar, karena akan sulit bersaing untuk mendapatkan pekerjaan di daerah tujuan.

c. Angka Migrasi Neto (nett-migration/Mn)

Angka ini merupakan selisih antara migrasi masuk dan migrasi keluar. Apabila migrasi masuk lebih besar daripada migrasi keluar maka disebut migrasi neto positif. Sedangkan jika migrasi keluar lebih besar daripada migrasi masuk disebut migrasi neto negatif. Angka Migrasi Neto per Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 47.

Dari Tabel 47 tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 4 (empat) Kabupaten/Kota yang memiliki Angka Migrasi Neto yang Positif yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kota Payakumbuh. Ini berarti untuk keempat Kabupaten/Kota tersebut lebih banyak penduduk yang masuk (datang) dibandingkan penduduk yang keluar (pindah). Sedangkan 15 (lima belas) Kabupaten/Kota lainnya memiliki Angka Migrasi Neto Negatif yang berarti lebih banyak penduduk yang keluar (pindah) bila dibandingkan dengan penduduk yang masuk (datang) ke masing-masing Kabupaten/Kota tersebut.

Lebih banyaknya Kabupaten/Kota yang memiliki angka Migrasi Neto Negatif bisa dipahami, karena faktor budaya merantau bagi penduduk Sumatera Barat masih cukup kuat mempengaruhi keputusan untuk melakukan migrasi keluar.

Sementara pada tiga kabupaten yang angka Migrasi Neto-nya Positif disebabkan karena adanya program transmigrasi. Untuk kota

Payakumbuh yang juga memiliki angka Migrasi Neto Positif diduga karena perkembangan kota yang cukup pesat sebagai imbas dari telah sangat padatnya aktivitas perekonomian di kota terdekat yaitu Bukittinggi. Selain itu kota Payakumbuh juga merupakan kota antara atau penghubung antara pusat perekonomian Sumatera Barat yaitu kota Padang dan Bukittinggi dengan provinsi Riau yaitu kota Pekanbaru.

Tabel 47.
Angka Migrasi Neto Per Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Angka Migrasi Neto	Jenis Migrasi Neto
		Pada Pertengahan Tahun	Migrasi Masuk	Migrasi Keluar		
1	Kabupaten Pesisir Selatan	518.121	68.664	49.512	36,96	Positif
2	Kabupaten Solok	375.984	2.728	7.270	- 12,08	Negatif
3	Kabupaten Sijunjung	233.832	3.982	5.812	- 7,83	Negatif
4	Kabupaten Tanah Datar	366.397	5.398	7.191	- 4,89	Negatif
5	Kabupaten Padang Pariaman	462.651	7.780	12.316	- 9,80	Negatif
6	Kabupaten Agam	525.088	13.341	15.606	- 4,31	Negatif
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	374.214	3.984	4.840	- 2,29	Negatif
8	Kabupaten Pasaman	315.575	19.081	19.477	- 1,25	Negatif
9	Kabupaten Kep. Mentawai	84.468	842	376	5,52	Positif
10	Kabupaten Dharmasraya	206.016	2.093	7.342	- 25,48	Negatif
11	Kabupaten Solok Selatan	177.809	1.593	2.171	- 3,25	Negatif
12	Kabupaten Pasaman Barat	428.631	11.675	4.272	17,27	Positif
13	Kota Padang	884.402	9.316	10.183	- 0,98	Negatif
14	Kota Solok	69.833	1.526	1.659	- 1,90	Negatif
15	Kota Sawahlunto	64.574	1.270	1.310	- 0,62	Negatif
16	Kota Padang Panjang	54.749	1.305	1.342	- 0,68	Negatif
17	Kota Bukittinggi	117.411	1.861	2.906	- 8,90	Negatif
18	Kota Payakumbuh	132.286	2.804	2.700	0,79	Positif
19	Kota Pariaman	89.722	2.229	2.331	- 1,14	Negatif

Sumber : DKB II Tahun 2016, DKB II Tahun 2017, dan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota (diolah)

d. Transmigrasi

Tujuan transmigrasi ditekankan pada pengelolaan sumberdaya alam sesuai potensi daerah melalui pembukaan lahan baru guna menciptakan lapangan kerja untuk menarik transmigran menuju daerah tersebut. Data Penempatan Transmigrasi di Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017 dapat dilihat pada Tabel 48 di bawah ini :

Tabel 48.
Data Penempatan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat
Per 31 Desember 2017

No	Kabupaten/Kota	Penempatan Transmigrasi						Total	
		Menurut Daerah Asal		Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM)		Pola Transmigrasi PIR/PIR BUN dan PIR SUS			
		KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa
1	Kabupaten Pesisir Selatan	4.931	20.158	1.275	3.962	-	-	6.206	24.120
2	Kabupaten Solok	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kabupaten Sijunjung	3.966	16.527	500	1.808	-	-	4.466	18.335
4	Kabupaten Tanah Datar	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kabupaten Padang Pariaman	50	261	-	-	-	-	50	261
6	Kabupaten Agam	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	3.781	16.068	-	-	1.637	6.984	5.418	23.052
8	Kabupaten Pasaman	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kabupaten Kepulauan Mentawai	1.511	6.043	-	-	-	-	1.511	6.043
10	Kabupaten Dharmasraya	10.230	44.125	50	214	2.550	10.617	12.830	54.956
11	Kabupaten Solok Selatan	2.144	9.084	-	-	1.644	7.194	3.788	16.278
12	Kabupaten Pasaman Barat	3.814	16.249	-	-	-	-	3.814	16.249
13	Kota Padang	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Kota Solok	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Kota Sawahlunto	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Kota Padang Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Kota Bukittinggi	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Kota Payakumbuh	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Kota Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUMATERA BARAT	30.427	128.515	1.825	5.984	5.831	24.795	38.083	159.294

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat (diolah)

4. Kepemilikan Dokumen Kependudukan

a. Kepemilikan Kartu Keluarga

Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga berguna untuk mengetahui jumlah keluarga yang ada di Provinsi Sumatera Barat yang telah memiliki Kartu Keluarga per 31 Desember 2017, dan dapat dilihat pada Tabel 49 berikut ini :

Tabel 49.
Kepemilikan Kartu Keluarga Provinsi Sumatera Barat
Per 31 Desember 2017

No	Kabupaten/Kota	Jumlah KK	Kepemilikan KK	%
1	Kabupaten Pesisir Selatan	140.735	135.579	96,34
2	Kabupaten Solok	100.163	87.611	87,47
3	Kabupaten Sijunjung	62.636	57.974	92,56
4	Kabupaten Tanah Datar	103.076	101.794	98,76
5	Kabupaten Padang Pariaman	117.021	113.666	97,13
6	Kabupaten Agam	139.080	137.577	98,92
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	113.100	102.377	90,52
8	Kabupaten Pasaman	85.624	51.187	59,78
9	Kabupaten Kep. Mentawai	21.947	17.862	81,39
10	Kabupaten Dharmasraya	57.863	55.556	96,01
11	Kabupaten Solok Selatan	48.781	47.507	97,39
12	Kabupaten Pasaman Barat	111.176	108.344	97,45
13	Kota Padang	235.551	223.916	95,06
14	Kota Solok	18.723	18.480	98,70
15	Kota Sawahlunto	18.653	17.737	95,09
16	Kota Padang Panjang	14.985	14.915	99,53
17	Kota Bukittinggi	32.554	32.528	99,92
18	Kota Payakumbuh	37.413	33.819	90,39
19	Kota Pariaman	22.571	22.006	97,50
	SUMATERA BARAT	1.481.652	1.380.435	93,17

Sumber : DKB Semester II 2017 dan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota (diolah)

Dari Tabel 49 diatas terlihat bahwa persentase kepemilikan Kartu Keluarga dari jumlah keluarga yang ada di Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 93,17 persen dengan persentase terbesar berada di Kota Bukittinggi yaitu sebesar 99,92 persen, sementara persentase

terkecil berada di Kabupaten Kepulauan Pasaman yaitu sebesar 59,78 persen.

b. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) berguna untuk mengetahui jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat yang telah memiliki KTP-el per 31 Desember 2017 dan dapat dilihat pada Tabel 50 di bawah ini :

Tabel 50.
Kepemilikan KTP-el Provinsi Sumatera Barat
Per 31 Desember 2017

No	Kabupaten/Kota	Wajib KTP (Jiwa)	Kepemilikan KTP-el (Jiwa)	%
1	Kabupaten Pesisir Selatan	373.546	283.508	75,90
2	Kabupaten Solok	269.857	217.364	80,55
3	Kabupaten Sijunjung	163.360	140.213	85,83
4	Kabupaten Tanah Datar	271.978	241.111	88,65
5	Kabupaten Padang Pariaman	329.526	256.852	77,95
6	Kabupaten Agam	380.513	321.435	84,47
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	269.259	243.000	90,25
8	Kabupaten Pasaman	220.357	161.930	73,49
9	Kabupaten Kep. Mentawai	57.381	49.374	86,05
10	Kabupaten Dharmasraya	143.911	127.038	88,28
11	Kabupaten Solok Selatan	126.861	91.510	72,13
12	Kabupaten Pasaman Barat	294.698	231.412	78,53
13	Kota Padang	637.162	561.359	88,10
14	Kota Solok	48.962	44.475	90,84
15	Kota Sawahlunto	45.863	42.569	92,82
16	Kota Padang Panjang	39.051	35.299	90,39
17	Kota Bukittinggi	83.114	74.712	89,89
18	Kota Payakumbuh	94.296	84.787	89,92
19	Kota Pariaman	64.170	56.597	88,20
	SUMATERA BARAT	3.913.865	3.264.545	83,41

Sumber : Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester II 2017 (diolah)

Dari tabel terlihat bahwa kepemilikan KTP-el Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017 adalah sebesar 83,41 dari total wajib KTP yang ada. Capaian kepemilikan KTP-el ini harus terus ditingkatkan

sampai dengan target 100 persen, untuk itu perlu adanya inovasi-inovasi dalam pelayanan khususnya untuk mengejar target wajib KTP yang ada agar semua wajib KTP memiliki KTP-el.

c. Kepemilikan Akta

1) Kepemilikan Akta Kelahiran

Persentase kepemilikan Akta Kelahiran berguna untuk mengetahui jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat yang telah memiliki Akta Kelahiran per 31 Desember 2017 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 51 berikut ini :

Tabel 51.
Kepemilikan Akta Kelahiran Provinsi Sumatera Barat
Per 31 Desember 2017

NO	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepemilikan Akta Kelahiran (Jiwa)	%
1	Kabupaten Pesisir Selatan	519.522	193.632	37,27
2	Kabupaten Solok	377.292	138.559	36,72
3	Kabupaten Sijunjung	234.915	87.530	37,26
4	Kabupaten Tanah Datar	367.754	139.330	37,89
5	Kabupaten Padang Pariaman	464.560	155.312	33,43
6	Kabupaten Agam	526.841	159.057	30,19
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	375.478	137.173	36,53
8	Kabupaten Pasaman	316.620	83.898	26,50
9	Kabupaten Kep. Mentawai	85.669	37.278	43,51
10	Kabupaten Dharmasraya	207.883	57.276	27,55
11	Kabupaten Solok Selatan	178.687	49.008	27,43
12	Kabupaten Pasaman Barat	429.904	124.599	28,98
13	Kota Padang	887.675	251.118	28,29
14	Kota Solok	71.723	36.600	51,03
15	Kota Sawahlunto	65.042	31.388	48,26
16	Kota Padang Panjang	56.562	43.044	76,10
17	Kota Bukittinggi	119.183	71.524	60,01
18	Kota Payakumbuh	135.209	43.156	31,92
19	Kota Pariaman	90.727	37.731	41,59
	SUMATERA BARAT	5.511.246	1.877.213	34,06

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2017 (diolah)

Persentase kepemilikan akta kelahiran Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017 masih sangat rendah yaitu hanya 34,06

dari jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat. Ini menunjukkan bahwa masih sangat rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus akta kelahiran ini khususnya untuk penduduk yang sudah berusia 18 tahun keatas karena mereka merasa tidak lagi memerlukan dokumen akta kelahiran ini. Untuk itu, kepemilikan akta kelahiran ini hanya ditargetkan untuk penduduk yang berusia 0-18 tahun, dimana pada tahun 2017 ditargetkan kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun adalah 85 persen dari jumlah penduduk usia 0-18 tahun.

2) Kepemilikan Akta Perkawinan

Persentase kepemilikan Akta Perkawinan berguna untuk mengetahui jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat yang memiliki Akta Perkawinan per 31 Desember 2017 yang dapat dilihat pada Tabel 52.

Untuk persentase kepemilikan Akta Perkawinan Provinsi Sumatera Barat ini juga sangat kecil yaitu hanya sebesar 20,48 persen dari jumlah penduduk dengan status kawin. Hal ini disebabkan karena data kepemilikan Akta Perkawinan ini hanya diperoleh dari database penduduk yang ada di Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota yang sifatnya adalah berdasarkan laporan dari penduduk yang melakukan perkawinan, karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya mengeluarkan Akta Perkawinan untuk perkawinan non muslim, maka data kepemilikan akta perkawinan muslim hanya bisa didapat apabila penduduk yang bersangkutan melaporkan perkawinannya tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dari Tabel 52 juga dapat dilihat bahwa persentase kepemilikan akta perkawinan terbesar adalah Kota Sawahlunto yaitu sebesar 75,25 persen dan terkecil adalah Kabupaten Pesisir Selatan hanya sebesar 2,13 persen.

Tabel 52.
Kepemilikan Akta Perkawinan Provinsi Sumatera Barat
Per 31 Desember 2017

NO	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Status Kawin (Jiwa)	Kepemilikan Akta Perkawinan (Jiwa)	%
1	Kabupaten Pesisir Selatan	232.162	4.936	2,13
2	Kabupaten Solok	166.896	65.917	39,50
3	Kabupaten Sijunjung	109.307	60.695	55,53
4	Kabupaten Tanah Datar	167.008	56.460	33,81
5	Kabupaten Padang Pariaman	183.312	11.734	6,40
6	Kabupaten Agam	220.467	36.011	16,33
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	179.566	18.985	10,57
8	Kabupaten Pasaman	133.569	23.664	17,72
9	Kabupaten Kep. Mentawai	36.609	12.071	32,97
10	Kabupaten Dharmasraya	103.276	21.715	21,03
11	Kabupaten Solok Selatan	82.379	9.116	11,07
12	Kabupaten Pasaman Barat	185.354	32.146	17,34
13	Kota Padang	400.052	72.756	18,19
14	Kota Solok	31.230	22.900	73,33
15	Kota Sawahlunto	29.439	22.152	75,25
16	Kota Padang Panjang	23.825	13.743	57,68
17	Kota Bukittinggi	52.284	1.883	3,60
18	Kota Payakumbuh	61.296	1.507	2,46
19	Kota Pariaman	35.808	10.086	28,17
	SUMATERA BARAT	2.433.839	498.477	20,48

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2017 (diolah)

3) Kepemilikan Akta Perceraian

Persentase kepemilikan Akta Perceraian berguna untuk mengetahui jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki Akta Perceraian per 31 Desember 2017, dapat dilihat pada Tabel 53, dimana dapat diketahui bahwa persentase

kepemilikan Akta Perceraian di Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017 adalah sebesar 14,55 persen dari jumlah perceraian hidup yang ada.

Tabel 53.
Kepemilikan Akta Perceraian Provinsi Sumatera Barat
Per 31 Desember 2017

NO	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Status Cerai Hidup (Jiwa)	Kepemilikan Akta Perceraian (Jiwa)	%
1	Kabupaten Pesisir Selatan	7.046	28	0,40
2	Kabupaten Solok	2.805	672	23,96
3	Kabupaten Sijunjung	2.009	172	8,56
4	Kabupaten Tanah Datar	4.802	896	18,66
5	Kabupaten Padang Pariaman	7.002	262	3,74
6	Kabupaten Agam	7.084	1.769	24,97
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	3.598	596	16,56
8	Kabupaten Pasaman	3.072	217	7,06
9	Kabupaten Kep. Mentawai	479	27	5,64
10	Kabupaten Dharmasraya	1.542	92	5,97
11	Kabupaten Solok Selatan	1.976	183	9,26
12	Kabupaten Pasaman Barat	4.014	425	10,59
13	Kota Padang	9.924	2.316	23,34
14	Kota Solok	918	497	54,14
15	Kota Sawahlunto	923	334	36,19
16	Kota Padang Panjang	881	243	27,58
17	Kota Bukittinggi	1.508	99	6,56
18	Kota Payakumbuh	1.786	68	3,81
19	Kota Pariaman	1.301	224	17,22
	SUMATERA BARAT	62.670	9.120	14,55

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2017 (diolah)

Sama halnya dengan kepemilikan Akta Perkawinan, untuk kepemilikan Akta Perceraian ini, data juga diperoleh dari penduduk yang melaporkan perceraian. Bila penduduk yang telah bercerai tidak melaporkan perceraian, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak akan memiliki data terhadap perceraian tersebut, khususnya untuk perceraian penduduk muslim yang dilakukan di Pengadilan Agama,

karena Dinas Dukcapil hanya mengeluarkan Akta Perceraian untuk penduduk non muslim. Untuk itu perlu adanya kesadaran masyarakat untuk melaporkan setiap peristiwa perceraian yang terjadi sehingga bisa dilakukan pencatatan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di masing-masing Kabupaten/Kota.

4) Kepemilikan Akta Kematian

Persentase kepemilikan Akta Kematian berguna untuk mengetahui jumlah penduduk yang memiliki Akta Kematian di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 54 dimana besarnya persentase kepemilikan Akta Kematian tersebut adalah sebesar 62,47 persen dari jumlah penduduk mati (meninggal) pada tahun 2017 dengan persentase tertinggi berada di Kota Solok sebesar 141,24 persen sedangkan persentase terendah berada di Kabupaten Pasaman Barat sebesar 17,29 persen. Khusus untuk Kota Solok bisa memiliki persentase lebih dari 100 persen disebabkan oleh banyaknya penduduk yang sudah meninggal sebelum tahun 2017 tapi baru mengurus Akta Kematian pada Tahun 2017.

Data jumlah penduduk mati (meninggal) dan kepemilikan Akta Kematian ini diperoleh dari penduduk yang melaporkan peristiwa (kejadian) kematian saja, sehingga terlihat bahwa kesadaran penduduk untuk melaporkan dan membuat Akta Kematian masih sangat kurang sekali. Mereka hanya melaporkan peristiwa kematian disaat perlu untuk membuat Akta Kematian saja seperti untuk mengurus pensiun. Beberapa Kabupaten/Kota bahkan pernah membuat suatu inovasi agar masyarakat memiliki kesadaran untuk melaporkan peristiwa

kematian seperti memberikan kompensasi bagi masyarakat (keluarga penduduk yang meninggal) yang telah melaporkan peristiwa kematian tersebut.

Tabel 54.
Kepemilikan Akta Kematian Provinsi Sumatera Barat
Per 31 Desember 2017

NO	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Meninggal (Jiwa)	Kepemilikan Akta Kematian (Jiwa)	%
1	Kabupaten Pesisir Selatan	1.804	1.114	61,75
2	Kabupaten Solok	1.643	945	57,52
3	Kabupaten Sijunjung	904	440	48,67
4	Kabupaten Tanah Datar	6.060	3.582	59,11
5	Kabupaten Padang Pariaman	5.085	5.085	100,00
6	Kabupaten Agam	2.737	2.737	100,00
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	49	49	100,00
8	Kabupaten Pasaman	1.970	862	43,76
9	Kabupaten Kep. Mentawai	350	208	59,43
10	Kabupaten Dharmasraya	222	222	100,00
11	Kabupaten Solok Selatan	941	570	60,57
12	Kabupaten Pasaman Barat	5.756	995	17,29
13	Kota Padang	1.177	321	27,27
14	Kota Solok	354	500	141,24
15	Kota Sawahlunto	998	916	91,78
16	Kota Padang Panjang	810	810	100,00
17	Kota Bukittinggi	320	109	34,06
18	Kota Payakumbuh	742	279	37,60
19	Kota Pariaman	1.496	1.133	75,74
	SUMATERA BARAT	33.418	20.877	62,47

Sumber : Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota (diolah)

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Data kependudukan dapat memberikan gambaran mengenai status data kependudukan yang ada saat ini di Provinsi Sumatera Barat, termasuk kesenjangan pembangunan. Dari gambaran tersebut dapat memberikan sejumlah rekomendasi untuk menyusun kebijakan daerah, penelitian, dan sebagai dasar bagi pendataan yang lain yang berkaitan dengan kependudukan. Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 ini agar dapat digunakan oleh instansi pemerintah/swasta maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan. Dalam buku ini telah disajikan data kependudukan berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2017 yang telah diolah, data pendukung dari lintas sektor, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Selanjutnya untuk mengetahui lebih lanjut tentang kondisi ke depan tentang penduduk dan permasalahannya, maka Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat ini akan disajikan secara berkala. Pada Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat mendatang akan dilakukan berbagai usaha untuk menyajikan data yang lebih lengkap, akurat dan valid, antara lain dengan memperbaiki sistem yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat dan melibatkan instansi vertikal yang ada di Provinsi Sumatera Barat, seperti Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama (KUA), Pengadilan Agama, dan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mengolah dan menyajikan data kependudukan ini, karena data-data pendukung dari instansi vertikal

tersebut juga sangat dibutuhkan dalam menyajikan data-data dalam Profil Perkembangan Kependudukan ini, khususnya terkait dengan data kualitas penduduk.

Data yang valid dan akurat juga sangat tergantung pada karakter dan perilaku masyarakat sendiri, sehingga diharapkan masyarakat yang melakukan registrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Sumatera Barat dapat memberikan dan mengisi biodatanya dengan benar dan lengkap serta tidak terlambat melakukan registrasi dan melaporkan apabila terjadi peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pindah dan datang.

B. SARAN

Demikian yang dapat kami susun dan sajikan dalam buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017. Kami menyadari, Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 ini masih jauh dari sempurna. Kami berharap kritikan dan saran yang membangun, baik dari pengguna data maupun pemerhati masalah kependudukan, demi sempurnanya penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Semoga buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 ini berguna bagi kita semua, khususnya pengambil kebijakan dalam pembangunan yang berwawasan kependudukan.